

IMPOR

POLITIK PANGAN INDONESIA



RIYONO

IMPOR

Politik Pangan Indonesia

Penulis: Riyono

Editor: Khabib Mustakhfirul

Desain Sampul: Noor Aziz Prabanistian

Tata Letak: Sirojul Munir

Penerbit

Ziqron Studio

Cetakan Pertama, 2021

ISBN: 978-623-5559-18-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanya buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

Prakata Penulis

Puji syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT yang memberikan anugerahNya berupa nikmat kesehatan, kesempatan, dan kemampuan sehingga buku yang berjudul "Impor Politik Pangan Nasional" bisa saya susun dan tata sampai selesai.

Buku ini adalah kumpulan gagasan dan kritikan serta usulan solusi tentang kondisi kedaulatan pangan nasional. Carut marutnya tata kelola pangan, khususnya beras membuat petani dan rakyat menjadi korbannya. Impor beras saat panen raya membuat harga gabah petani sekarat. Seolah petani tidak mampu menyediakan pangan untuk negaranya. Memang ironi, tapi faktanya impor sering menjadi senjata utama memenuhi gudang negara atas nama cadangan pangan nasional walaupun harus mengorbankan kepentingan petani.

Negara seolah menyerah pada saat petani terus bekerja. Negara seolah lemah di hadapan pemburu rente impor yang sangat mengiurkan. Berdasarkan data BPS, terlihat bahwa Indonesia rutin melakukan impor beras sejak tahun 2000-2019.

Berkut ini merupakan rincian data impor beras dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada 2016 Indonesia mengimpor 1.283.178 ton beras dengan nilai USD 531,84 juta. Tiga negara yang paling banyak memasok beras, yakni Thailand sebanyak 557.890 ton

dengan nilai USD 243,13 juta. Vietnam sebanyak 535.557 ton dengan nilai USD 212,60 juta, dan Pakistan sebanyak 134.832 ton dengan nilai USD 49,12 juta.

Di tahun 2017, Indonesia mengimpor 305.274 ton beras dengan nilai USD 143,64 juta. Tiga negara paling banyak memasok beras, yakni Thailand sebanyak 108.944 ton senilai USD 60,28 juta, Pakistan sebanyak 87.500 ton dengan nilai USD 34,79 juta, dan Myanmar sebanyak 57.475 ton senilai USD 19,54 juta.

Tahun 2018 Indonesia mengimpor 2.253.824 ton beras dengan nilai mencapai USD 1,037 miliar. Tiga negara paling banyak memasok beras, yakni Thailand sebanyak 795.600 ton dengan USD 386,53 juta, Vietnam sebanyak 767.180 ton dengan nilai USD 360,74 juta, dan India sebanyak 337.999 ton dengan nilai USD 139,15 juta.

Tahun 2019 Indonesia mengimpor 444.508 ton beras dengan nilai mencapai USD 184,25 juta. Tiga negara yang paling banyak memasok beras, yakni Pakistan sebanyak 182.564 ton dengan nilai USD 67,81 juta, Myanmar sebanyak 166.700 ton dengan nilai USD 56,28 juta, dan Thailand sebanyak 53.278 ton dengan nilai USD 38,56 juta.

Tonase yang mencapai ribuan sampai jutaan ton mengandung hitungan "keuntungan" yang sangat menjanjikan. Memang sangat menggiurkan bagi para mafia impor beras. Kerja tidak melanggar hukum positif

layaknya orang koruspi, namun bisa mereguk keuntungan triliunan rupiah dalam sekali transaksi impor.

Faisal Basri, seorang ekonom senior UI, mencontohkan adanya praktik pemburuan rente dalam setiap komoditas pangan strategis, salah pada Oktober 2019. Harga beras eceran di Indonesia Rp13.978/kg. Pada waktu yang sama, harga beras Vietnam setara dengan Rp4.561. Ada selisih harga Rp 9.471. Selisih harga yang lebih dari tiga kali lipat itu amat menggiurkan dari sisi keuntungan. Seandainya pun dibandingkan dengan harga eceran tertinggi untuk beras medium di Jawa (Rp9.450/kg), selisihnya dengan beras Vietnam masih dua kali lipat.

Katakanlah beras impor Vietnam sampai di pasar domestik menjadi Rp7.000/kg, keuntungan yang diraup setidaknya Rp2.500/kg. Dikalikan dengan 1 juta ton, maka keuntungan bersih bisa mencapai Rp2,5 triliun. Angka keuntungan yang sangat fantastis. Bisnis apa yang dalam sekali transaksi bisa trilyunan yang didapatkan.

Negara harusnya tidak boleh kalah, faktanya sering kalah dan menyerah kepada pemburu rente ini. Impor adalah senjata para kapitalis untuk melemahkan kedaulatan sebuah negara. Akibat dari impor akan menjadi disintensif bagi petani untuk meningkatkan produktifitas padi, mengurangi devisa cadangan negara, dan paling parah ketergantungan terhadap produk pangan luar negeri.

Penulis ucapkan terima kasih kepada istriku tercinta, Birrel Abwenie, dan anak - anakku, Mbak Asma mujahidah, Mas Fatih Al Bana, Mas Faiq Ramadhan, Mas Ibrohim, dan Mbak Azizah yang sering aku repoti dengan waktu lebih untuk menuntaskan tulisan ini. Ucapan terima kasih tak terhingga untuk ayah dan ibu tercinta di Magetan yang senantiasa mengirimkan energi kebaikan berupa doa untuk kami sekeluarga. Terkhusus ucapan terima kasih juga kepada Ustad Ahmad Syaikh (Presiden PKS) dan Doktor Suswono yang sudah memberikan kata pengantar pada buku ini. Beliau yang sering mendorong agar rajin menulis dan membukukan kerja dan pemikiran kader serta pimpinan PKS.

Buku ini tentu banyak kekurangan, masih banyak ide dan gagasan yang perlu dicari demi kedaulatan pangan nasional kita. Waktunya Indonesia berdaulat dengan pangan lokal asli Indonesia.

Semarang, 1 Desember 2021
Riyono

Kata Pengantar I

Petani Mampu "Melawan" Impor

Pangan merupakan kebutuhan manusia paling esensial (penting). Karena itu, ketersediaan pangan bagi masyarakat luas harus terjamin. Untuk mencapainya, dibutuhkan tekad, kesungguhan, kerja keras, dan pendekatan sistematis dari semua pihak.

Sektor pertanian tentu berperan penting bagi keberlangsungan suatu negara. Untuk memenuhi kebutuhan pangan serta menjaga stabilitas nasionalnya, sebuah negara tentu membutuhkan suplai komoditas pangan yang cukup. Sebagai bukti, di tengah pandemi Covid-19, pertanian menjadi sektor esensial mendukung imunitas rakyat menangkal penyebaran virus Corona. Pertanian juga penyumbang kedua Pendapatan Domestik Bruto (PDB) setelah sektor industri.

Sektor pertanian menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Sektor pertanian, dengan ujung tombaknya para petani, sedianya menjadi 'pahlawan' buat keatahanan bangsa. Petani merupakan pejuang pangan yang tiada pernah meminta balas jasa. Perjuangannya menyediakan pangan sudah menjadi tradisi sejak jaman kemerdekaan. Peran serta petani sangat nyata, menyediakan hasil bumi di depan rumah, dekat jalan yang dilewati pejuang kemerdekaan. Berbagai

hasil pertanian, beras, ubi, talas, ketela, dan aneka sayur dikorbankan untuk memberi dukungan kepada para pejuang. Semangat pengorbanan melekat pada jiwa petani.

Dalam situasi krisis pun petani tetap mampu menyediakan pangan, seperti halnya saat negara dihantam pandemi. Kinerja petani tetap bagus, sektor pertanian terus tumbuh diantara 17 sektor ekonomi yang sempat negatif sepanjang 2020.

Kinerja positif 16.24% membuktikan bahwa sektor inilah sebagai penyelamat ekonomi nasional saat ini. Petani dan semua turunan pertanian dalam arti luas bisa memberikan kontribusi positif. Petani sebagai aktor utama yang memproduksi bahan-bahan pangan sangat berperan saat ini ditengah pandemi untuk mengurangi potensi kerugian sampai level pedesaan. Inilah jasa petani kita.

Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, telah mencanangkan visi “Terwujudnya ketahanan pangan berbasis kedaulatan dan kemandirian pangan.” sebagaimana diamanahkan oleh UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Karenanya, pembangunan ketahanan pangan dan pengaturan kebijakan pangan yang dikeluarkan pemerintah seyogyanya mendorong para pelakunya semakin giat dalam mengusahakan dengan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Artinya harus ada insentif yang merangsang petani untuk bekerja lebih semangat.

Kebijakan impor yang masih diterapkan Pemerintah, sesungguhnya masih bisa ditolerir sepanjang hanya untuk menutup kekurangan, sehingga tidak berdampak ke petani. Sekiranya petani protes keras, pasti karena terdampak dari kebijakan impor yang tidak terukur. Dampak yang dirasakan langsung adalah jatuhnya harga komoditi produk pertanian yang memukul langsung petani. Aksi petani jagung yang protes saat kunker Presiden ke Blitar menjadikannya viral, demikian pula aksi petani cabai di Kudus yang merusak hasil panennya. Kebijakan impor beras 1.5 juta ton yang geger akhirnya dibatalkan karena tekanan publik yang kuat, meski masih saja kecolongan ada impor 41.600 ton beras yang dirilis BPS.

Pengaturan impor komoditi yang ketat merupakan keniscayaan, sepanjang ada kemauan politik yang kuat. Kebijakan pengaturan impor tentu akan berdampak pada para pemburu rente. Keberanian Pemerintah penting, mengingat dampaknya bisa mematikan gairah bertani. Dengan didukung data ketersediaan yang akurat, kebijakan pembatasan impor, saat saya menjabat Menteri Pertanian, ternyata bisa mengangkat kembali semangat para petani dan peternak yang tadinya lesu karena hasil usahanya tidak menjanjikan, akibat impor melebihi dari kebutuhan. Keberpihakan kepada petani merupakan prasyarat utama jika kita ingin mewujudkan ketahanan pangan berbasis mandiri dan berdaulat.

Untuk menghindari kesimpangsiuran diperlukan kajian ilmiah yang mendalam tentang ketimpangan yang terjadi antara visi pemerintah dalam bidang ketahanan pangan dan pertanian, di mana salah satunya bertujuan untuk mensejahterakan para petani. Fakta dan realitas yang terjadi di lapangan, petani masih tergolong masyarakat miskin. Sementara kebijakan impor pangan justru sering menjadi langkah dan pilihan utama pemerintah dalam pengadaan pangan. Negara yang ketahanan pangannya bergantung dari impor tentu sangat rawan, karena bisa berdampak pada krisis sosial dan politik bila negara eksportir menahan pahalannya.

Kajian yang ilmiah dan mendalam ini tentu sangat berguna sebagai salah satu masukan buat para pemangku kebijakan atau pemerintah dalam mengambil kebijakan pangan dan pertanian ke depan. Ini agar visi dan misi pemerintah dalam kebijakan pangan dan pertanian dapat terealisasi. Sehingga petani hidup sejahtera bukan lagi sekedar utopia.

Buku yang ditulis saudara Riyono tentang Impor Pangan yang berisi kritikan, solusi, dan sikap PKS terhadap kebijakan impor ini bisa memberikan gambaran dan ulasan, bahwa impor bukan jalan terbaik untuk hadirkan kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Impor sering menyusahkan petani dan merugikan bangsa kita. Petani mampu dan bisa sediakan pangan dengan tangan sendiri sepanjang ada insentif yang menjanjikan.

Insya Allah, jika didukung kemauan politik yang kuat dari Presiden Jokowi dimana dalam kampanyenya pernah menjanjikan "Stop Impor", hal yang mudah untuk direalisasikan..... Semoga!

DR Suswono

Menteri Pertanian RI 2004 - 2009

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS 2020 - 2025

Kata Pengantar II

Indonesia dikenal sebagai Negara Agraris. Alasannya, karena tersedia lahan pertanian yang luas dan banyak penduduk yang berprofesi sebagai petani. Karena itu, soal pertanian akan selalu menjadi isu strategis.

Pertanian kian membetot perhatian publik ketika berbagai persoalan membelitnya mampu mengancam eksistensi kita sebagai Negara Agraris. Salah satunya tentang prediksi Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Diperkirakan pada 2063 tak ada lagi profesi petani. Hal ini seiring dengan turunnya pekerja di sektor pertanian. Pada tahun 1976, persentase pekerja Indonesia di sektor pertanian mencapai 65,8 persen. Pada tahun 2019 turun signifikan, hanya 28 persen.

Belum lagi isu soal menurunnya luas panen padi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan sebesar 20.610 hektar atau 0,19 persen. Tahun 2020 menjadi 10,66 juta hektar dari sebelumnya 10,68 juta hektar pada 2019. Hal lain yang jadi persoalan adalah kebijakan impor komoditas pertanian yang berdampak negatif pada petani.

Pada konteks inilah PKS sangat peduli dengan isu pertanian. Dijadikannya pertanian sebagai salah satu bidang dalam struktur kepengurusan DPP, DPW, hingga

DPD menjadi salah satu buktinya. Di luar itu, narasi dan aksi pimpinan, kader, struktur partai juga terus menerus menunjukkan kepeduliannya pada pertanian. Hadirnya buku ini menjadi bukti tak terbantahkan.

Saya memberikan apresiasi khusus kepada Saudara Riyono yang menulis buku ini. Terbitnya karya tulis ini menunjukkan bahwa kesadaran literasi (*Literacy Awareness*) di PKS semakin meningkat. Sudah banyak buku yang dihasilkan oleh Pimpinan PKS, Struktur, Aleg PKS di Parlemen, dan kader di berbagai wilayah. Semoga kesadaran ini akan terus meningkat sehingga apa yang telah kita lakukan akan terekam abadi. Menjadi warisan bagi generasi kini dan mendatang.

Ahmad Syaikhu

Presiden PKS

Daftar Isi

Prakata Penulis	iii
Kata Pengantar I	vii
Kata Pengantar II.....	xii
Daftar Isi	xiv
Kebijakan Pangan di ASEAN	1
Mencermati Politik Globalisasi Pertanian	7
Pangan dan Dialog Peradaban	15
Petani dan Politik Pangan.....	23
Politik Perberasan Belum Jelas.....	29
Sampai Kapan Kita Impor?	35
Dampak Impor Beras bagi Petani	39
Bulog vs Mafia Impor Beras?	45
Pertanian Tidak “Wajib”	51
Gula yang Semakin Pahit.....	59
Mencari Kedelai yang Hilang	63
Pangan Lokal untuk Keluarga	67
Kebijakan Pangan di Pulau Karimunjawa	73
Konflik Petani dan Pengkavlingan Lahan	81
Pemuda Kembalilah ke Desa	87

Hilangnya Pemuda Petani dan Nelayan	93
Ijtihad Politik Pangan Jokowi	99
Politik Dagang Sapi Australia	105
Impian Petani Indonesia	109
Petani vs TNI.....	115
Menjaga Semangat Petani Milenial	121
La Nina dan Nasib Petani	125
Membangkitkan Kesejahteraan Petani.....	129
Politik Pangan Jokowi Impor?	135
Menjawab Ancaman Krisis Pangan	143
Antraks dan Budaya Makan Ikan	149
Sawit dan Dialog Peradaban.....	155
Kenaikan PPN Meningkatkan Harga, Menambah Petani, Peternak dan Nelayan Miskin.....	163
Pak Jokowi, Harga Garam Rakyat 200/kg, Gak Ada Efek pertumbuhan 7%	165
Pak Presiden, Anggaran untuk Petani dan Nelayan Jangan di Potong	167
Pak Jokowi, Petani Muda Hanya 8% bukan 29%....	169
Indonesia Bisa Rugi 115 T karena Perubahan Iklim, Petani Akan Semakin Susah.	171

PPN 12%, Impor Pangan Semakin Menggila, Produk Dalam negeri semakin Lemah.....	173
Sisa 1.7 Juta Beras Impor tahun 2018, Masih mau Impor 2021?	175
Petani, Akademisi, DPR sudah tolak Impor beras. Ada apa Ngotot Impor?	177
Mana Janji 4000 ha Lahan garam dan harga 1000 rupiah/kg, kok Impor Garam 3 juta ton?	179
Petani, Akademisi, DPR Sudah Tolak Impor Beras. Ada Apa Ngotot Impor?	181
Dukung Bulog Tidak Impor Beras, Tidak Ada Toleransi Buat Mafia Impor	183
Pak Jokowi, Harga Gabah Petani Anjlok Karena kebijakan Impor.	185
Impor Beras Percepat Hilangnya Petani Indonesia, Petani Asing Semakin Sejahtera	187
<i>Food Estate</i> Jelas Potensi Kegagalanya, Kenapa Diteruskan?	189
Pak Jokowi Katanya Benci Produk Asing, Kok Impor beras 1,5 Juta Ton?.....	193
Indeks Pangan Kalah Sama Ethiopia, Malu Sama Petani.....	195

Pak Jokowi, Subsidi Pupuk Bukan ke Petani, tapi ke Pabrik Pupuk.....	197
<i>Omnibus Law</i> Sengsarakan Petani, Sejahterakan Importir	199
Kinerja Petani Bagus di Tengah Pandemi, tapi Belum Sejahtera.....	201
Kalah di Perundingan WTO, Ayam Impor Serbu Indonesia, 68% Ayam Nasional dikuasai Asing.....	205
Lampiran Dokumentasi	209
Tentang Penulis	219

Kebijakan Pangan di ASEAN

Isu pangan dalam KTT ASEAN cukup menarik untuk kita diskusikan. Pertumbuhan jumlah penduduk dari 7 miliar sampai 9 miliar di tahun 2045 menjadi ancaman serius bagi ketersediaan pangan dunia. PBB merilis bahwa saat ini ada 1 miliar penduduk dunia dalam kondisi kelaparan. Gejolak harga pangan dunia memiliki imbas kepada perdagangan dan perekonomian nasional. Khususnya dalam bidang pangan yang mulai menghantui negara-negara ASEAN. Dalam KTT ke-18, ASEAN bersepakat untuk melakukan kerja sama regional menghadapi ancaman krisis pangan dan energi. Khusus pangan, ASEAN sepakat untuk meningkatkan produksi pangan melalui membangun cadangan beras, investasi di bidang pertanian, termasuk kerja sama di bidang *research* dan inovasi.

SBY menyampaikan jika para pemimpin peserta konferensi menyatakan bahwa 10 negara anggota ASEAN *plus* Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan sebagai tiga mitra dialog hendaknya terus meningkatkan produksi pangan, khususnya produksi beras untuk menjamin ketahanan pangan kawasan. Salah satu langkah cepat yang harus kita ambil adalah pelaksanaan *ASEAN Integrated Food Security Framework* secara komprehensif dengan focus utama bidang penelitian dan investasi pangan. Melihat pembahasan dan rencana ASEAN dalam

memenuhi kebutuhan pangannya berorientasi kepada swasembada pangan, belum mengarah kepada ketahanan pangan nasional. Cirinya dengan cadangan pangan yang cukup, peningkatan produksi beras dan investasi di bidang pangan.

Pengalaman membuktikan bahwa orientasi swasembada telah mengantarkan negeri di kawasan ASEAN akhirnya mengubah strategi dan kebijakan nasionalnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Malaysia memilih tidak menjadi negara swasembada beras, tetapi kebutuhan pangan rakyatnya terpenuhi. Sebaliknya, Indonesia yang mengejar swasembada beras, tetapi rakyatnya masih memakan beras miskin yang didatangkan dari Vietnam.

Swasembada dan Ketahanan Pangan

Ilustrasi yang membedakan secara tegas antara swasembada pangan dengan ketahanan pangan. Bostawa misalnya, sebagai negara dengan pendapatan perkapita sedang, tapi mengalami defisit pangan yang kronis karena minimnya lahan pertanian. Strategi ketahanan pangan nasionalnya adalah swasembada, tetapi akhirnya lebih berorientasi pada *self-reliance* yang mana secara formal mengesahkan kontribusi yang hakiki dari pangan import terhadap ketahanan pangan nasional.

Thompson dan Cowan (2000 dalam Lassa, 2006) mencatat perubahan kebijakan dan pendefinisian formal

ketahanan pangan dalam kaitannya dengan globalisasi perdagangan yang terjadi di beberapa Negara. Contohnya, Malaysia mendefinisikan ulang ketahanan pangannya sebagai swasembada 60% pangan nasional. Sisanya, 40% didapatkan dari impor pangan. Malaysia kini memiliki tingkat ketahanan pangan yang kokoh. Ini memberikan ilustrasi yang jelas bahwa ketahanan pangan dan swasembada adalah dua hal yang berbeda.

Swasembada pangan umumnya merupakan capaian peningkatan ketersediaan pangan dengan wilayah nasional, sedangkan ketahanan pangan lebih mengutamakan akses setiap individu untuk memperoleh pangan yang bergizi untuk sehat dan produktif. Definisi ketahanan pangan sangat bervariasi, namun umumnya mengacu definisi dari Bank Dunia (1986) dan Maxwell dan Frankenberger (1992) yakni "*akses semua orang setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat (secure access at all times to sufficient food for a healthy life)*". Indonesia menerapkannya dalam Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996, di mana ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Lassa (2006) dengan mengadopsi Stevens et al. (2000), telah memberikan ilustrasi yang sangat baik mengenai negara-negara yang melakukan swasembada

pangan dengan kondisi ketahanan pangannya. Negara-negara kategori A (USA, Canada, Australia, Brunei) memiliki kapasitas pangan yang paling kuat karena memiliki kondisi pangan ideal di mana mereka mampu berswasembada pangan, tetapi sekaligus juga memiliki ketahanan pangan yang kuat. Sedangkan Negara C seperti Singapura, Norwegia, dan Jepang sama sekali tidak swasembada pangan, namun memiliki fondasi ketahanan pangan yang jauh lebih kuat dari negara-negara kategori B seperti Indonesia, Filipina, dan Myanmar.

Melihat kajian di atas, kita bisa membaca kebijakan dalam KTT ASEAN yang disampaikan SBY dalam kebijakan pangan masih jauh dari harapan ketahanan pangan dunia. Kuatnya ketersediaan pangan di Amerika, Jepang, Norwegia, Australia dikarenakan pilihan ketahanan pangan yang diutamakan, bukan swasembada pangan yang kondisi ini semakin sulit diterapkan di kawasan ASEAN karena keterbatasan sumber daya alam dan lingkungan yang semakin kritis.

Lambung Pangan ASEAN

Ketahanan pangan berbasis akses pangan menjadi kunci utama penyelesaian masalah pangan di kawasan ASEAN. Konektifitas antar Negara ASEAN dalam masalah pangan menjadi pekerjaan pokok yang harus segera diselesaikan. Kebijakan penelitian pangan harus kembali diorientasikan kepada empat sasaran pokok

ketahanan pangan. Akses, ketersediaan, distribusi, dan keamanan pangan. Empat pilar ini bisa disatukan dalam kebijakan ketahanan pangan ASEAN berbasis sumber daya lokal masing-masing negara. Adanya lumbung pangan ASEAN sangat penting bagi cadangan pangan jika terjadi krisis pangan berkepanjangan. Lumbung pangan sejatinya merupakan penerapan sistem gotong-royong atau konektifitas dalam pemenuhan kebutuhan pangan ASEAN.

Lumbung pangan ASEAN dapat menjadi *linked* antar negara anggota yang berbentuk penelitian, investasi, pendidikan atau kerjasama suplai pangan yang terjadwal dan memiliki standar yang diakui oleh semua anggota. Keberadaan lumbung pangan sejatinya merupakan contoh penerapan kebijakan ekonomi kelembagaan yang digagas oleh Prof. Purbayu, di mana ekonomi akan maju jika secara kelembagaan memiliki basis yang kuat untuk mengatur dan menentukan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil. ASEAN yang merupakan kawasan negara baru berkembang membutuhkan kejelasan sikap dan ketegasan kebijakan untuk menjadi kawasan “bebas” rakyat kelaparan. Keberadaan lumbung pangan ASEAN akan menjadi alternatif di tengah cengkraman kapitalisme pangan yang sudah mengakibatkan penderitaan dan kemiskinan di negara berkembang. KTT ASEAN sudah usai dan semoga dampaknya dirasakan oleh masyarakat miskin terutama kebutuhan pangan mereka esok hari akan terpenuhi.

“

Ketahanan pangan berbasis akses pangan menjadi kunci utama penyelesaian masalah pangan di kawasan ASEAN. Konektifitas antar Negara ASEAN dalam masalah pangan menjadi pekerjaan pokok yang harus segera diselesaikan.

”

Mencermati Politik Globalisasi Pertanian

Kehancuran Uni Soviet dan Yugoslavia dikarenakan adanya embargo pangan oleh Amerika Serikat. Saat krisis pangan global 2008 yang melanda 37 negara, semua bangsa berpikir tentang bagaimana menyelamatkan diri dari bahaya kelaparan rakyatnya. Semakin meroketnya harga pangan dunia mengakibatkan meningkatnya jumlah orang miskin di dunia. FAO merilis data jumlah warga dunia yang teracancam kelaparan mencapai 1 Miliar orang. Bahkan, tiga negara di kawasan Afrika Timur, yaitu Ethiopia, Kenya, dan Somalia sudah diambang hilang karena rakyatnya terancam mati kelaparan. Sebanyak 20% rakyat mengalami malnutrisi dan 7 juta warganya terancam kelaparan.

Proses globalisasi pertanian ini sangat dan amat menarik bagaimana diskusi untuk menyediakan pangan bagi dunia bergeser. Semula setiap negara bertanggungjawab atas ketahanan pangannya masing-masing, kini petani harus bertanggungjawab atas ketersediaan pangan seluruh dunia. Gagasan inilah yang menjadi asumsi perdagangan bebas di bidang pertanian yang dikampanyekan oleh WTO, dan didukung oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Kanada. Ekspor pangan harus digenjut, tidak boleh dihambat oleh negara, sehingga tersedialah pangan di seluruh dunia.

Aliran komoditas pertanian harus bebas. Sejauh menyangkut korporasi, dikatakan juga bahwa semakin korporasi pangan itu menjadi efisien, semakin korporasi mampu menghasilkan pangan. Kondisi di atas akhirnya membuat hancurnya Uni Soviet, ancaman kematian rakyat Somalia, dan meroketnya harga pangan disebabkan adanya liberalisasi perdagangan pertanian dan cengkraman global kapitalis group WTO, AOA (*Agreement on Agriculture*) yang mengkampanyekan paham perdagangan bebas yang tidak pernah berpikir akan nasib petani dan buruh tani yang merupakan sumber utama keuntungan mereka. Isu ini serius harus kita dalami untuk menghindarkan Indonesia dari jebakan globalisasi pertanian yang akan membunuh bangsa ini. Mampukah dunia pertanian Indonesia mengimbangi arus politik global pertanian?

Jebakan Globalisasi Pertanian

Studi yang dilakukan oleh Cato Institute pada 2005 menunjukkan bahwa petani di negara-negara maju (yang tergabung dalam OECD), menerima subsidi sebesar US\$ 279 milyar atau sekitar 30 persen pendapatan dari pertanian seluruhnya. Petani Amerika Serikat menerima US\$ 46,5 miliar dari pemerintahnya atau sekitar 18 persen dari pendapatan pertanian total Amerika. Masih di Amerika Serikat, setiap keluarga petani mendapat US\$ 79.961 atau 26 persen lebih tinggi dari pendapatan rata-

rata nasional. Yang tak kalah mengejutkan, dua pertiga dari subsidi itu dibagi kepada 10 persen petani terkaya (Daniella Markheim dan Brian M. Riedl). Ini membuktikan bahwa globalisasi negara maju yang dituntut dalam forum WTO kepada negara-negara berkembang ibaratnya adalah omong kosong belaka. Mereka meminta subsidi kepada petani dihapus agar meningkatkan daya saing. Namun, di dalam negeri sendiri mereka memberikan subsidi yang luar biasa untuk memproteksi petani dan pengusaha bidang pertanian. Fakta bahwa tahun 1998, Indonesia menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia yaitu 4,8 juta ton beras. Tahun 2001, total impor komoditas pangan utama Indonesia (yaitu beras, jagung, bungkil kedele, kacang tanah, gandum) nilainya telah mencapai Rp 11,8 triliun. Kini pangan jadi ajang bermain aktor-aktor kuat (pedagang besar, importir besar, pemburu rente). Ini menunjukkan bahwa cengkraman globalisasi telah menggerogoti Indonesia. Itulah jebakan pertama.

Jebakan globalisasi berikutnya adalah dominasi perdagangan dunia. AS dan Uni Eropa ingin menguasai perdagangan dunia yang saat ini sedang dipegang oleh Jepang dan China sebagai saingan terberat mereka. Penerapan pajak bea masuk yang sempat 0 persen terhadap komoditi strategis membuat Indonesia seperti "*sampah*" bagi negara adikuasa. Padahal mereka menerapkan bea masuk terhadap produk yang masuk ke

negara mereka. Aturan yang berbelit dan sulit membuat produk dalam negeri sulit menembus pasar global.

Jebakan terakhir globalisasi pertanian bagi bangsa ini di level regional adalah berlakunya ACFTA. ACFTA atau *ASEAN-China Free Trade Area* mulai berlaku pada 1 Januari 2010 dengan menggunakan prinsip perdagangan bebas. Perdagangan bebas tersebut didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan, yakni hambatan yang diterapkan pemerintah dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Kebijakan ini menuai pro kontra, bahkan sempat diusulkan untuk dilakukan renegotiasi oleh KADIN. Namun, banyak juga yang mendukung kebijakan ini dengan alasan menambah daya saing produk dalam negeri. Semua jebakan di atas nampaknya belum mampu diatasi oleh bangsa ini, khususnya perdagangan dunia pertanian. Membanjirnya buah impor, semakin langkanya buah-buah dalam negeri dan bertambahnya angka kemiskinan dikalangan pertanian membuat jebakan globalisasi pertanian ibarat angin puting beliung bagi pertanian Indonesia.

Perangkat kebijakan bidang pertanian yang dibuat negara ini untuk mengantisipasi globalisasi pertanian masih banyak yang belum berpihak kepada pelaku utama pertanian, yaitu petani. Buktinya sampai saat ini UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (PPP) belum disahkan. RUU ini sudah masuk dalam prolegnas sejak

zamannya Megawati, sampai presiden SBY sudah dua kali belum juga disahkan. Nasib RUU PPP seperti petani yang masih terpinggirkan dan selalu dikalahkan dalam pembuatan kebijakan. Inilah faktanya.

Beberapa agenda ke depan

Menghindari globalisasi dalam pertanian nampaknya berat. Pilihannya adalah menghadapi dan mempersiapkan semua potensi bangsa ini menjadi modal utama memenangkan persaingan global. Termasuk menjadikan petani sebagai aktor utama pembangunan bangsa ini menikmati kesejahteraan. Kebijakan yang berorientasi kepada *proo grow, pro job dan pro poor* khususnya petani harus dikuatkan. Pertama, membuat perangkat kebijakan yang mendukung proteksi petani dalam negeri. Segera disahkannya RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi agenda utama dalam upaya melindungi petani dan dunia pertanian agar tidak semakin terseret dalam arus globalisasi tanpa perlindungan dari negara. Perlindungan ini sangat penting untuk memberikan jaminan berlangsungnya persaingan yang sehat bagi produk yang telah susah payah mereka hasilkan.

Kedua, penguatan kelembagaan usaha petani. Selama ini yang disorot adalah lemahnya organisasi petani, sering dilupakan yang tidak kalah penting adalah penguatan kelembagaan petani. Gapoktan menjadi

alternatif untuk bisa mengembangkan bisnis pertanian. Kekuatan petani Cina dan Jepang adalah karena kuatnya asosiasi dan lembaga usaha pertanian yang memiliki power di hadapan penguasa. Kelembagaan usaha dan asosiasi petani harus bersatu dalam menghadapi persaingan global ini jika tidak ingin dilibas oleh petani bangsa lain.

Ketiga, membangkitkan potensi lokal. Potensi lokal dalam berbagai bentuk telah membuktikan adanya ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi krisis global. Masyarakat disadarkan akan kecintaan produk dalam negeri, walaupun memang harus diakui bahwa produk kita kalah berkualitas dengan produk impor. Karakter cinta tanah air harus dimunculkan untuk menjadikan produk dalam negeri menjadi tuan di negerinya sendiri. Tirulah Uganda sebagai produsen pertanian organik terbesar dunia yang tahan akan globalisasi pertanian yang melanda dunia. Kita juga bisa belajar dari Palestina yang sedang dilanda konflik, namun berhasil memenuhi kebutuhan sendiri. Keberhasilan itu berangkat dari kebijakan Kementerian Pertanian Palestina di Gaza yang memegang prinsip ekonomi di bidang pertanian, yang disandarkan pada upaya melepaskan diri dari ketergantungan terhadap barang-barang impor serta mendukung dihasilkannya berbagai produk lokal.

Tiga langkah diatas setidaknya mampu membendung derasnya arus globalisasi politik pertanian yang bernapaskan kapitalisme barat yang hanya mengenal keuntungan semata. Sekarang pilihan itu ada di pemerintah, mau atau tidak?

“

Menghindari globalisasi dalam pertanian nampaknya berat. Pilihannya adalah menghadapi dan mempersiapkan semua potensi bangsa ini menjadi modal utama memenangkan persaingan global. Termasuk menjadikan petani sebagai aktor utama pembangunan bangsa ini menikmati kesejahteraan.

”

Pangan dan Dialog Peradaban

Forum ekonomi dunia yang baru saja selesai dilaksanakan menyisakan pertanyaan besar. Dunia sedang dilanda krisis pangan. Ada hampir 1 Miliar manusia terancam kelaparan di saat 2 Miliar manusia lain sedang kegemukan. Topik pangan selalu menarik untuk didiskusikan sepanjang waktu, mengingat masalah pangan merupakan masalah hidup dan matinya suatu peradaban. Sejarah telah membuktikan pangan menjadi kunci kemajuan bangsa.

Kegagalan Sultan Agung dalam memerangi VOC karena gudang pangannya dibakar oleh tentara VOC. Pasukan Mataram kocar-kacir dan kekurangan pangan sehingga tamatlah perlawanan Sultan Agung. Penderitaan Muhammad SAW akibat boikot oleh kaum Qurois juga berkenaan dengan kebutuhan pangan. Kisah sedih pengikut Muhammad SAW yang memakan kulit kambing kering menjadi gambaran betapa amat berbahanya jika manusia tidak tercukupi kebutuhan pangannya. Somalia, Ethiopia, dan Kenya meregang nyawa juga karena 20% penduduknya malnutrisi dan kekurangan pangan. Somalia bisa hilang dari peta dunia jika PBB tidak segera menyelamatkan penduduknya yang kekurangan pangan dan gizi dalam waktu tiga bulan ke depan.

Kelaparan di dunia 60 persen berada di kawasan Asia dan Pasifik, diikuti oleh negeri sub Sahara dan Afrika sebesar 24 persen, serta Amerika Latin dan Karibia 6 persen. Setiap tahun orang yang menderita kelaparan bertambah 5,4 juta jiwa. Bahkan, setiap tahunnya 36 juta jiwa rakyat mati karena kelaparan dan gizi buruk. Puncaknya pada 2010, PBB melalui FAO merilis informasi yang menyatakan terdapat 975 juta jiwa manusia di dunia yang terancam kelaparan dan kematian. Dunia gagal mengatasi kelaparan, cita-cita FAO untuk mengurangi angka kelaparan sebanyak 575 juta jiwa tahun 2015 sulit akan terealisasi.

Pentingnya posisi pangan akhirnya melahirkan Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) dimulai sejak *Food and Agriculture Organization* (FAO) menetapkan *World Food Day* melalui Resolusi PBB No. 1/1979 yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan FAO Conference ke 20, November 1979 di Roma, Italia, yang dihadiri oleh 147 negara anggota FAO. Sejak saat itu disepakati bahwa mulai tahun 1981, seluruh negara anggota FAO termasuk Indonesia memperingati HPS secara nasional pada setiap tanggal 16 Oktober bertepatan dengan tanggal terbentuknya FAO. Pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-31 FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) telah menetapkan tema "*Food Prices from Crisis to Stability*". Tema ini dipilih dengan memperhatikan dampak langsung penurunan produktivitas pangan dunia akibat perubahan

iklim global. FAO pun menyarankan kepada setiap negara untuk mengkaji harga pangan yang terus meningkat dan mengantisipasi rawan pangan dan kelaparan.

Ketahanan Pangan Nasional

Ketahanan pangan nasional akan tercapai jika ketahanan pangan keluarga tercapai. Ketahanan pangan keluarga tercapai jika ketahanan pangan individu tercapai. Ketahanan pangan individu akan tercapai dengan adanya kedaulatan pangan individu dalam memenuhi kebutuhan pangan dirinya sendiri. Kedaulatan pangan menurut Studi pustaka yang dilakukan oleh IFPRI (1999) diperkirakan terdapat 200 definisi dan 450 indikator tentang ketahanan pangan (Weingärtner, 2000). Menurut Undang-undang Pangan No.7 Tahun 1996 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan pangan memiliki lima unsur yang harus dipenuhi. Pertama, berorientasi pada rumah tangga dan individu. Kedua, berdimensi waktu. Setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses. Ketiga, menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan sosial. Keempat, berorientasi pada pemenuhan gizi. Kelima, ditujukan untuk hidup sehat dan produktif. Lima unsur diatas harus dipenuhi oleh individu

dan rumah tangga untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang kuat secara pangan. Namun, jika unsur-unsur di atas tidak mampu kita penuhi, maka kerawanan pangan akan menggerogi bangsa ini. Ingat kisah tragis kelaparan di Ethiopia yang telah menjadikan negara tersebut “hilang” dari peredaran dunia.

Bahkan merujuk pada hasil Konferensi Internasional Kedaulatan Pangan di Selingue, Mali tahun 2007 yang dihadiri oleh 500 perwakilan dari 80 negara, terdapat tambahan tujuh prinsip kedaulatan pangan. Pangan sebagai hak asasi manusia, pembaharuan agrarian, melindungi sumber kekayaan alam, pengaturan ulang perdagangan pangan, mengakhiri kelaparan dunia, perdamaian dan solidaritas sosial, serta prinsip demokrasi ekonomi. Melihat indikator-indikator di atas, nampaknya ketahanan pangan nasional kita masih jauh dari harapan. BPS merilis data sampai tahun 2011 ini penerima raskin masih menyentuh angka 71 juta jiwa setara 27% penduduk Indonesia. Bahkan, dana untuk pemenuhan pangan impor mencapai angka 7 triliun. Sesuatu yang sangat fantastis, namun membahayakan karena mengindikasikan jika bangsa kita semakin terancam krisis pangan nasional.

Kebijakan Politik Pangan

Soekarno saat peletakan batu pertama kampus IPB 1954, mengatakan bahwa masalah pangan adalah masalah

hidup atau mati. Ini membuktikan bahwa pangan bisa menjadi alat politik yang mematikan secara cepat ataupun lambat. Buktinya ketergantungan kita kepada pangan impor sangat tinggi, dan ini diketahui oleh asing sehingga akan dengan mudah bangsa ini dijajah secara ekonomi melalui pendekatan pemenuhan pangan nasional. Impor beras telat menjadi alat politik yang ampun untuk terus menekan Indonesia agar mengakui bahwa penduduk Indonesia sedang kelaparan.

Terbukanya data pangan nasional akan semakin membuat ketahanan pangan nasional terancam. Oleh karena itu, melihat situasi internasional yang sedang dilanda krisis pangan serta dampak pemanasan global telah dirasakan oleh bangsa ini perlu langkah politik yang jelas dan tegas agar pangan menjadi alat politik yang memperkuat ketahanan pangan nasional, bukan sebaliknya yang malah melemahkan ketahanan pangan nasional. Kebijakan politik pangan yang harus dilakukan bangsa ini harus mengacu kepada pencapaian MGDs yang *pro job, pro poor, pro growth*. Pengurangan angka kelaparan dan rawan pangan menjadi sasaran pokok sebagaimana harapan bangsa ini bahwa kemiskinan semakin berkurang.

Pertama, penguatan UU Pangan no 7 tahun 1996. Saat ini UU Pangan sedang di bahas oleh DPR menjadi UU Pangan yang lebih akomodatif dan menjangkau

kepentingan masa depan. Masuknya pangan impor yang membanjiri pasar-pasar tradisional harus diatur dengan tegas oleh UU agar kepala daerah tidak berani membuat kebijakan yang sering merugikan rakyat banyak dan hanya menguntungkan kaum kapitalis.

Substansi UU Pangan mampu menghadirkan pangan yang aman dan bergizi serta cukup untuk kebutuhan bangsa sendiri. Berbagai kasus impor akhir-akhir ini seperti impor sayur-sayuran, kentang, dan beras terjadi karena lemahnya kebijakan nasional dalam melindungi produk dalam negeri. Jepang bisa kita contoh dengan menerapkan bea masuk impor beras sampai hampir 500 persen.

Kedua, strategi pemantapan ketersediaan pangan meliputi peningkatan cadangan pangan masyarakat sesuai dengan potensi lokal, pemantapan infrastruktur produksi pertanian, optimalisasi lahan yang ada, baik sawah, ladang, pekarangan, kebun dan kolam/tambak yang ada. Langkah operasional strategi ini bisa dilakukan melalui program pembangunan Lumbung Pangan Rakyat yang difungsikan sebagai KUD dan pasar optimalisasi ladang dengan menanam cabai sebagai komoditi mahal sehingga tidak mendatangkan dari luar. Turki telah memberikan contoh bagaimana mereka memiliki komoditas terigu yang menjadi langganan Indonesia untuk pemenuhan dalam negeri. Bahkan, Palestina mampu memehuni kebutuhan

sayur-sayuran dari bangsa mereka sendiri walaupun dalam kondisi tidak menentu.

Ketiga, strategi pemantapan diversifikasi konsumsi pangan meliputi penyediaan suplai pangan dengan mengembangkan sumberdaya lokal (unggulan wilayah), peningkatan KAP (*Knowledge, Attitude, Practice*) melalui gerakan tentang konsumsi pangan yang beragam dan gizi seimbang serta aman. Peningkatan *income* diversifikasi berarti menambah pangan di luar beras. Potensi pangan lokal bangsa ini jumlah dan jenisnya jutaan, tetapi masih sangat minim dengan sentuhan teknologi dan inovasi modern.

Kita lihat Cina sebagai raksasa dunia mampu menjadikan rakyatnya memiliki usaha skala UMKM yang menghidupi bangsa mereka sendiri tanpa harus tergantung dengan pangan impor. Saat ini konsumsi pangan beras masyarakat Indonesia sudah mencapai angka 90 persen, artinya masyarakat selalu berorientasi kepada beras dan beras. Kalau belum makan nasi maka belum dianggap makan. Inilah kesalahan kolektif bangsa ini yang diakibatkan kesalahan kebijakan masa lalu dengan selalu “memberaskan” masyarakat yang makan jagung, tiwul, sagu, dan aneka makanan nusantara.

Sudah 32 tahun hari pangan sedunia kita peringati, berbagai tema pangan telah menghiasi diskusi publik dunia. Kenyataannya jumlah penduduk dunia yang

kelaparan semakin meningkat. Mampukah bangsa Indonesia menjadi lumbung pangan dunia? Harusnya mampu karena negeri ini sangat kaya raya dengan segala pangan lokal yang dengan kebijakan dan dukungan teknis, maka pangan untuk semua akan terwujud.

Petani dan Politik Pangan

Sejarah membuktikan bahwa pangan menjadi alat politik, sudah terjadi sejak zaman dulu. Kekalahan pasukan Sultan Agung Mataram dalam melawan VOC diakibatkan karena gudang/lumbung pangan prajurit mataram dibumihanguskan oleh VOC. Kisah Nabi Muhammad yang diboikot oleh suku qurais dan diasingkan di sebuah lembah dan dilarang melakukan transaksi jual beli bahan pangan mengakibatkan “penderitaan” pengikut islam waktu itu. Saat ini hampir 1 miliar penduduk dunia mengalami kelaparan akibat adanya krisis pangan yang melanda dunia saat ini.

Petani sebagai aktor utama dalam penyediaan pangan dalam arti beras saat ini juga mengalami kondisi yang menyedihkan. Krisis pangan saat ini semakin parah karena ditambah dengan perubahan iklim yang ekstrem membuat banyak kegagalan panen di mana-mana. Kondisi petani di saat pangan melimpah juga belum banyak mengubah nasib mereka, tetap saja miskin dan mewariskan kemiskinan itu kepada anak cucunya bermodalkan lahan sawah yang hanya 0,5 Ha. Saat pangan melimpah, harganya jatuh dan tidak cukup untuk menutup biaya produksi yang pada akhirnya petani rugi. Saat kondisi pangan sulit, harga komoditas pertanian naik. Petani tidak banyak merasakan kenaikan produksi

mereka. Yang merasakan justru para cukong dan bandar besar yang untung berlipat – lipat atas jerih payah petani.

Kondisi di atas disebabkan oleh politik. Politik sebagai alat melahirkan kebijakan dan pengaruh yang kuat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Indonesia yang 80% penduduknya tinggal di wilayah pedesaan dan pesisir membutuhkan politik pangan yang jelas dari penguasa dan wakil rakyatnya. Politik pangan menempatkan urusan pangan sebagai urusan pokok rakyat harus diprioritaskan, bukan seperti saat ini di mana urusan pertanian yang menangani masalah produksi pangan hanya menjadi “lipstick” dengan istilah urusan pilihan, bukan urusan wajib yang artinya kalau dipilih, ya akan diberikan dukungan anggaran. Namun, jika tidak dipilih, cukup ada saja dan tidak bisa memberikan kontribusi bagi pemenuhan pangan masyarakat.

Politik pangan harus didukung oleh wakil rakyat dan esksekutif. Karena pangan menjadi salah satu pilar ketahanan nasional di samping energi, keamanan, dan moral. Politik pangan telah menjadikan negara–negara besar seperti Amerika, China menguasai hampir 60% produk pangan dunia. Mereka leluasa menjajah negara di kawasan Asia dan dunia umumnya karena kebijakan politik pangan mereka jelas. Politik pangan yang diterapkan adalah beorientasi kepada proses mengangkat harkat dan kesejahteraan petani. Jadilah petani dan usaha pertanian di negara–negara tersebut anak emas yang

mendapatkan perhatian besar dalam sisi kebijakan politik, anggaran, dan perlindungan dari berbagai gangguan.

Kebijakan Politik Pangan

Petani sebagai obyek akan politik pangan harus ditempatkan sebagai “mitra” dalam penentuan kebijakan pangan. Selama ini petani hanya menerima kebijakan tanpa adanya keterlibatan dalam menentukan arah kebijakan pangan nasional. Adanya Bulog, Kementan, Kementrian Perdagangan sering membuat arus kebijakan tidak sinkron, kadang malah berbenturan satu dengan yang lain. Sebagai contoh, kebijakan Impor beras telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar 1,5 juta ton beras tahun 2011. Namun, menteri perdagangan akan menambah impor beras menjadi 1,7 juta ton. Pada posisi ini Bulog dan Kementan tidak bisa berbuat banyak, walaupun kementan menyampaikan surplus beras tahun 2011 berkisar 15 hingga 16 juta ton. Melihat masih lemahnya kordinasi dan sinkronisasi antar departemen, munculnya ego sektoral serta rendahnya implemetasi kebijakan politik pangan nasional, rasanya sulit bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan secara nasional.

Melihat masalah di atas, pemerintah harus kembali kepada kebijakan politik pangan yang berorientasi kepada kesejahteraan petani dan kemandirian pangan nasional. Untuk mencapai itu politik pangan dikembalikan sebagai

soko guru politik nasional melalui pendekatan dalam berbagai perspektif yang utuh. Pertama, politik pangan sebagai pilar kesejahteraan nasional. Artinya bahwa politik harus mengembalikan urusan pangan sebagai masalah pokok yang harus segera diselesaikan. Urusan pangan yang meliputi pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti beras, jagung, lauk pauk harus mendapatkan dukungan yang penuh. Sebagai contoh, lahirnya UU Perlindungan Petani untuk melindungi petani dan usaha pertanian agar tidak hancur oleh kebijakan luar.

Perspektif politik pangan sebagai penyelamatan dan optimalisasi potensi pertanian. Potensi pertanian Indonesia ibarat laut yang tidak pernah habis airnya, artinya bahwa kekayaan alam pertanian Indonesia selalu mampu memberikan pangan kepada rakyat selama potensi ini dipelihara secara berkelanjutan. Kalau politik pangan sebagai pilar kesejahteraan nasional menghadirkan regulasi yang berpihak kepada petani, maka perspektif penyelamatan dan optimalisasi adalah upaya memanfaatkan kekayaan alam pertanian untuk petani, bukan hanya dinikmati oleh pemodal saja.

Keberadaan dunia pertanian nasional merupakan asset anak negeri yang akan kita wariskan kepada generasi mendatang. Pertanyaannya adalah apakah dunia pertanian 100 tahun ke depan akan bisa menjawab tantangan kebutuhan pangan dunia? Tergantung saat ini apa yang kita lakukan. Jika kita menghancurkan pertanian

sendiri maka generasi ke depan akan selalu mengingat bahwa penyebab kelaparan dan kemiskinan adalah kita saat ini yang mengeksploitasi pertanian secara tersistem dan terencana.

“

Jika kita menghancurkan pertanian sendiri maka generasi ke depan akan selalu mengingat bahwa penyebab kelaparan dan kemiskinan adalah kita saat ini yang mengeksploitasi pertanian secara tersistem dan terencana.

”

Politik Perberasan Belum Jelas

Mulai Februari, petani akan melaksanakan panen raya. Saat gembira ini sering tidak dinikmati oleh petani karena masalah harga gabah yang cenderung turun. Sejak 2009 sampai 2011, pemerintah belum merubah kebijakan mengenai HPP gabah dan beras sehingga ini menimbulkan kekhawatiran petani jika harga turun saat panen terjadi lagi. Pemerintah baru akan mengajukan usulan HPP tahun 2012 sebesar 27–28% dari kebijakan yang lama. Tentunya ini akan sangat menyenangkan petani jika memang kemudian benar disetujui oleh presiden.

Sektor pertanian dan petani di negeri ini memang masih belum beruntung jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia atau Thailand yang telah memperoleh perlakuan istimewa dari pemerintah, perlindungan terhadap sektor pertanian menjadikan petani mampu memproduksi hasil pertanian dengan optimal dan bahkan bisa diekspor untuk menambah pendapatan mereka.

Petani di negeri ini dituntut untuk selalu menyediakan beras murah untuk mengamankan sektor industri dengan menyediakan bahan baku murah bagi para pekerja di kota. Selain itu, sektor pertanian juga dituntut untuk mengamankan variabel makro pertumbuhan ekonomi sehingga hukumnya “haram” jika harga beras naik dan daya beli masyarakat turun, petani

terus dipaksa untuk menerima logika impor beras yang notabnya petani mampu memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.

Kebijakan mengenai beras nasional memang sampai saat ini masih sering tumpang tindih antara regulator dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Bulog sebagai badan penyangga pangan nasional yang sering tidak sinergi dalam praktik untuk mendukung kebijakan yang lebih berpihak kepada petani. Kementan menghendaki adanya serapan gabah dan beras yang maksimal saat panen raya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, namun Bulog sering tidak mampu menyerap gabah petani karena harga yang mahal dan HPP tidak menjangkaunya.

Bea Impor

Sampai saat ini ekonomi perberasan negeri ini masih belum jelas. Rendahnya perlindungan terhadap produksi pertanian membuat spekulasi beras bermain dengan terus mendatangkan beras impor karena memiliki keuntungan yang berlipat ganda. Bea masuk beras impor saat ini sebesar Rp 450/kg. Bea masuk ini sangatlah tidak memihak petani karena pada tahun 2000 pemerintah sudah mengenakan bea masuk Rp 430/kg. Sudah 11 tahun pemerintah hanya menaikkan Rp 20/kg, sehingga kondisi ini merangsang impor akan terus berjalan. Bandingkan dengan Jepang yang menerapkan bea impor masuk beras

sebesar 351 yen /kg, Thailand sebesar 60% dari harga HPP.

Sampai Oktober 2011, impor beras masuk ke Indonesia sudah mencapai 536.000 ton dikontrak 1,6 Juta ton yang akan dilakukan oleh Bulog. Jelas ini dirangsang oleh kecilnya bea masuk dan besarnya keuntungan yang diperoleh Bulog bersama importir. Catatan Bulog tahun 2011 bisa mendapatkan keuntungan dari beras impor senilai 892,9 Miliar. Sebuah keuntungan yang sangat besar karena lemahnya kebijakan bea masuk, keuntungan instan tanpa “keringat” dengan impor ini akhirnya menjadikan ekonomi perberasan nasional kacau balau.

Sejak Indonesia lepas dari IMF, acuan utama dalam sistem perdagangan global adalah WTO. Waktunya kita membuat kebijakan perberasan nasional yang menjadikan negara Indonesia sebagai lumbung pangan Asia dengan segala potensi pertanian yang memang mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sudah saatnya Indonesia lepas dari ketergantungan kepada barang impor, apalagi menganut sistem pasar bebas dan menjadikan beras sebagai komoditas yang diperdagangkan antar bangsa.

Ciri utama ekonomi beras kita adalah oligopsonis, di mana pembeli dapat menentukan dan mempengaruhi harga pasar yang mengakibatkan posisi petani dalam kondisi yang tidak menguntungkan karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menentukan harga jual beras dan gabah. Resikonya sangat besar jika urusan pangan

diserahkan kepada pasar, harus ada intervensi pemerintah untuk mencegah gejolak harga yang terjadi.

Kebijakan bea masuk impor yang melindungi petani akan mampu meredam spekulasi beras dan termasuk mengerem Bulog melakukan impor saat petani panen raya. Kebijakan bea masuk saat ini yang hanya Rp 450/kg bisa dinaikkan menjadi minimal Rp 1000/kg. Bea masuk sebesar ini masih dalam batas komitmen kita dengan WTO. Namun, jika pemerintah tidak berani menaikkan bea masuk impor dan impor beras kita tetap terjadi maka pengaruh gejolak harga akan sangat tinggi.

Kaman Nainggolan (2005), mengatakan bahwa volume perdagangan beras hanya sekitar 5% atau sekitar 11-12 juta ton per tahun dari total produksi global. Jumlah penduduk Indonesia yang sudah mencapai 238 juta jiwa merupakan pasar potensial impor dengan total pengeluaran beras sekitar 25% dari pendapatan rumah tangga sangat berbahaya jika bea impor masuk tetap kecil dan kita terus mengandalkan pasokan beras internasional.

Langkah perbaikan

Di atas kita sudah gambarkan bahwa kondisi politik perberasan nasional masih membutuhkan perangkat kebijakan nasional secara utuh. Menaikkan bea masuk impor beras dari Rp 450/kg menjadi Rp 1000/kg merupakan kebijakan protektif ekonomi dalam kerangka perdagangan internasional. Perangkat yang kita butuhkan

untuk menjadikan kebijakan ekonomi perberasan menjadi kuat adalah kembali kepada bangsa kita sendiri. Langkah-langkah perbaikan yang bisa kita lakukan dalam upaya mewujudkan kuatnya ekonomi politik perberasan nasional.

Pertama, aspek politik perdagangan internasional. Permintaan menaikkan bea masuk impor sampai angka Rp 1000/kg akan mengurangi ransangan impor dalam negeri sehingga kemungkinan kenaikan harga beras di pasar internasional akan berkurang. Kejadian impor beras tahun 1998 yang mencapai angka hampir 3 juta ton beras membuat harga beras internasional naik sekitar 33%. Keberanian pemerintah untuk menghentikan impor beras akan berdampak secara psikologis kepada pasar dan menggiatkannya kembali produksi nasional.

Kedua, segera menetapkan HPP sedini mungkin. Minimal HPP sudah harus ditetapkan sejak bulan Januari akhir. Keterlambatan penetapan HPP akan membuat Bulog terlambat menyerap gabah petani. Akibatnya jika sudah panen harga tinggi dan HPP rendah membuat harga gabah anjlok sehingga Bulog tidak bisa menyerap gabah petani karena HPP tidak mencukupi. Alasan klasik ini harus dihilangkan dengan penetapan HPP lebih awal. Penetapan HPP harusnya dilakukan setiap tahun mengikuti perkembangan harga di tingkat petani.

Ketiga, kebijakan fiskal pertanian dengan adanya subsidi. Memang anggaran pertanian 16 Triliun tidak

cukup untuk menjadikan Indonesia negara berswasembada. Harusnya kebijakan fiskal ini minimal 20% dari APBN untuk pertanian. Subsidi pupuk, benih, saprotan harus terus ditingkatkan setiap tahun. Langkah subsidi ini akan memberikan efek bagi pengembangan usaha dan industry pertanian dalam skala yang lebih luas. Tahun 2002, Amerika Serikat memberikan subsidi kredit sebesar 7,7 miliar dolar AS dalam bentuk kredit ekspor dan pangan komersial. Politisi DPR hendaknya memberikan perhatian lebih untuk subsidi bagi petani.

Keempat, penguatan infrastruktur pertanian. Hilangnya produksi saat panen sekitar 10% menjadikan kerugian tersendiri bagi petani. Jeleknya saluran irigasi mengakibatkan tersendatnya pasokan air saat masa pemeliharaan tanaman, rusaknya jaringan pertanian membuat kendala tersendiri bagi petani sehingga menambah ongkos produksi. Walaupun Thailand rata-rata produktifitas lahannya hanya 3,0 ton/ha, namun mereka mampu mengimpor berasnya ke Indonesia yang kapasitas produksi kita bisa mencapai 6-7 ton/ha. Keberhasilan Thailand karena sarana irigasi, infrastruktur jalan sudah mendukung dan mengarah kepada industri.

Langkah perbaikan di atas akan sedikit mengobati ekonomi politik perberasan yang sering merugikan petani. Nasihat Muhammad Bin Rasyid Al Maktoum, jika kereta adalah politik, dan kudanya adalah ekonomi maka kuda harus berada di depan, bukan sebaliknya.

Sampai Kapan Kita Impor?

Semua presiden negeri ini semua menyisakan masalah impor, khususnya pangan yang sampai sekarang cenderung terus meningkat. Belum ada presiden yang berhasil menghentikan atau mengurangi impor pangan dengan produksi dalam negeri. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama Januari-Juni 2011, nilai impor pangan mencapai US\$5,36 miliar atau sekitar Rp45 triliun. Nilai impor pangan semester I tahun 2011 lebih tinggi jika dibandingkan dengan semester yang sama tahun 2010. BPS juga mencatat, nilai impor pangan pada tahun lalu sebesar US\$4,66 miliar atau setara dengan Rp39,91 triliun.

Perkiraan nilai impor akan terus meningkat di tahun 2012 ini, diperkirakan naik sekitar 10%. Kenaikan impor tahun 2010 ke 2011 sekitar 7%, kondisi ini membuat sedih bangsa ini. Kenapa impor selalu menjadi andalan utama dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri? Bukankah kita negeri agraris dan maritim yang kaya akan segalanya.

Krisis Pangan

Dunia memang sedang dilanda krisis pangan. Kelaparan di dunia 60 persen berada di kawasan Asia dan Pasifik, diikuti oleh negeri sub Sahara dan Afrika sebesar 24 persen, serta Amerika Latin dan Karibia 6 persen.

Setiap tahun orang yang menderita kelaparan bertambah 5,4 juta jiwa. Bahkan, setiap tahunnya 36 juta jiwa rakyat mati karena kelaparan dan gizi buruk. Puncaknya 2010 PBB melalui FAO merilis terdapat 975 juta jiwa manusia di dunia yang terancam kelaparan dan kematian.

Dunia gagal mengatasi kelaparan, cita- cita FAO untuk mengurangi angka kelaparan sebanyak 575 juta jiwa tahun 2015 sulit akan terealisasi. Versi pemerintah angka kemiskinan masih sekitar 13% atau setara 30 juta jiwa. Penduduk miskin negeri ini mencapai angka sekitar 25% atau setara 60 juta jiwa dengan standar ADB. Standar kemiskinan yang digunakan ADB adalah penghasilan di bawah 1,25 dollar AS per hari (sekitar Rp 10.625). Rencana pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan sekitar 8-10% gagal terealisasi. Kebutuhan pangan sebagai kebutuhan pokok masyarakat tidak mampu dipenuhi, penerima raskin yang mencapai 71 juta jiwa memberikan gambaran rakyat negeri ini masih kelaparan. Masih ada 17,4% penderita gizi buruk dan malnutrisi yang meghantui bayi, bahkan kecenderungan akan terus naik jika pemerintah gagal menyediakan pangan bergizi untuk masyarakat.

Kondisi di atas menggambarkan bahwa krisis pangan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup masa depan dan generasi bangsa ini. Keberadaan kebijakan yang selalu pro dengan pasar dan kapitalisme menjadikan impor sebagai alasan untuk menstabilkan

kondisi makro ekonomi nasional. Ketergantungan kepada impor jelas sangat berbahaya disaat nantinya kondisi negara pengespor pangan sedang dilanda masalah. Kita lihat Thailand yang sedang mengalami krisis produksi pangan akibat bencana banjir.

Keputusan Penting

Jared Diamond dalam bukunya, *Collapse : How Societies Choose to fail or succeed* (2005), memasukkan Indonesia selain Nepal dan Kolombia sebagai peradaban yang mungkin dekat dengan keruntuhan. Ya, mungkin analisis ini bisa terjadi jika negeri ini masih terus menggantungkan pangan dari bangsa lain. Keruntuhan bukan secara hukum negara bubar, namun negeri ini akan “dikendalikan” oleh bangsa lain yang berarti tidak memiliki kedaulatan. Jonh Perkin (2005) juga sudah mengingatkan akan bahaya impor karena Indonesia adalah negera besar yang kaya akan segalanya. Kekurangan bangsa ini menurut Perkin yakni pemimpin kita mudah menerima upeti. Itu saja.

Negeri ini tidak boleh lagi mengambil keputusan yang salah, khususnya soal impor pangan. Penataan lembaga pangan nasional haruslah menjadi prioritas. Jangan biarkan kelembangaan pangan kita centang perenang tidak jelas alur dan arah kordinasinya. Pangan lokal biarkan menjadi menu favorit, kita tidak ingin “memberaskan” Indonesia. Kekayaan alam harus terus

diteliti untuk peningkatan diversifikasi pangan nasional. Soekarno memilih menghentikan impor dari Malaysia walaupun rakyatnya kelaparan. Namun, keputusan ini memberikan dampak luar biasa bagi nelayan kita. Ada harapan yang dijanjikan Soekarno bahwa kita bisa hidup tanpa harus makan dari impor yang menguntungkan bangsa lain. Pertanyaannya sapa kapan kita akan terus impor? Siapa yang akan bisa menjawab kalau bukan kita sendiri.

Dampak Impor Beras bagi Petani

Kebijakan impor beras adalah kebijakan “haram” bagi negara agraris seperti Indonesia. Keharaman kebijakan ini memang belum difatwakan oleh MUI seperti ramai-ramainya usul fatwa haram bagi pejabat dan orang kaya yang mengkonsumsi BBM bersubsidi. Namun jika kita jujur, masalah beras sama beratnya dengan masalah energi yang juga dilanda krisis di negeri ini. Namun, apakah menjadi solusi jika kemudian masalah pangan ini diselesaikan dengan impor beras? Padahal, menurut pemerintah sendiri kita cukup pangannya? Kebijakan yang tumpang tindih inilah yang membuat petani semakin menderita. Kebijakan dibuat mengikuti selera pasar bebas yang hanya berfikir *bisnis oriented*.

Sejarah Impor Beras

Agus Saifulloh (2000) menyatakan bahwa Krisis ekonomi yang terjadi mulai pertengahan 1997 dan diperburuk oleh penurunan produksi beras akibat El-Nino telah menyebabkan ketahanan pangan berada pada posisi yang sangat rawan. Impor pangan mengalami hambatan akibat rendahnya kepercayaan internasional terhadap kemampuan devisa Indonesia. Perilaku *panic buying* semakin sering dijumpai akibat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan suplai pangan.

Mulai dari tahun 1984 sampai dengan 1993, Indonesia mengimpor rata-rata 160 ribu ton beras pertahun. Jumlah ini kemudian meningkat menjadi rata-rata 1,10 juta ton pertahun pada periode 1994-1997. Pada masa krisis 1998-2000, jumlah ini meningkat lagi menjadi 4.65 juta tahun. Walau kemudian ada sedikit penurunan, sepanjang 2001-2005, impor beras bertahan di atas 2 juta ton pertahunnya, yang membuat Indonesia praktis selalu berada pada lima besar negara pengimpor beras. (Supadi dalam M Ikhsan Modjo, Kajian Monash Indonesian Islamic Student Westall: 2006)

Akibat El-Nino, produksi beras mengalami penurunan secara tajam pada tahun 1997 dan 1998, masing-masing 3,34 persen dan 0,03 persen. Setelah swasembada beras tercapai pada tahun 1984, Indonesia kembali sebagai pengimpor beras yang besar pada tahun 1990-an. Meskipun produksi beras masih naik pada tahun-tahun tertentu, namun karena kebutuhan yang terus meningkat maka impor masih dilakukan untuk menutup kekurangan produksi beras dalam negeri.

Dampak El-Nino sangat menekan suplai beras di pasar domestik yang masih defisit sehingga diperlukan impor yang lebih besar dari keadaan normal. Pada tahun 1998 jumlah impor mencapai 5,8 juta juta ton. Impor tersebut sebagian berasal dari impor komersial, *soft loan* dan *grant* dari negara donor seperti Jepang, Thailand, Vietnam, Malaysia, Itali, Amerika Serikat. Secara nasional,

adanya impor tersebut dianggap sangat membantu penyediaan beras bagi masyarakat. Kisah pedih impor beras ini membuat frustrasi dan sedih petani yang telah bersusah payah berjuang swasembada beras nasional pada tahun 2004. Bahkan, SBY mendapat penghargaan dari FAO karena keringat petani, namun impor sekarang sebanyak 500.000 ton beras yang dilakukan oleh Bulog kembali membangkitkan luka lama petani.

Ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negara pengimpor pangan terbesar dunia. Hampir 60% kebutuhan pangan nasional diambil dari petani asing. Tampaknya SBY juga diam seribu bahasa menyaksikan kondisi ini.

Manajemen beras nasional

Mulai Juli 2011, Bulog memastikan akan mengimpor beras dari Vietnam sebanyak 500.000 ton dengan alasan untuk stabilisasi harga pangan menjelang puasa dan lebaran. Ini sangat kontradiktif dengan pernyataan Menko Perekonomian bahwa Indonesia cukup pangan, dan rakyat tidak perlu khawatir. Nampaknya, kebijakan Menko ini hanya pada tataran ucapan dan tidak dilaksanakan oleh Bulog ataupun Menteri Perdagangan. Kesalahan dalam menafsirkan intruksi Menko membuat 25 juta keluarga petani yang saat ini berkecukupan produksi beras menjerit.

Beras ada, kenapa impor? Berarti pengelolaan beraslah yang perlu diperbaiki kembali. Pernyataan BPS tanggal 1 Maret 2011 yang mengatakan bahwa bulan Mei hingga Juli biasanya beras akan banyak terserap masyarakat sehingga cadangan bisa menepis. Sedangkan mulai bulan April hingga Juni, siklus beras sedang banyak-banyaknya. Menurut BPS, manajemen beraslah yang bermasalah saat ini, bukan soal ketersediaan berasnya. Manajemen beras selama ini ditangani oleh Bulog sebagai lembaga pangan nasional. Pekerjaan Bulog adalah menyerap gabah petani, mengolah, dan menjualnya kembali untuk mendapatkan profit serta mengelola beras miskin yang dibagikan kepada masyarakat.

Selama ini, itulah kerja Bulog, namun dua pekerjaan ini selalu menjadi masalah setiap tahun. Angka penyerapan gabah petani yang rendah dan kualitas raskin yang jelek terus menerus menjadi berita nasional setiap bulan Mei hingga Juli. Pada akhirnya, solusinya adalah impor dengan alasan tunggal, menjaga cadangan pangan nasional dan menekan lajunya inflasi akibat kenaikan harga. Tidak ada terobosan Bulog dan Menteri Perdagangan dalam mengantisipasi kenaikan harga setiap tahun, operasi pasar menjadi ritual wajib setiap tahun.

Petani kembali menjadi korban akibat operasi pasar. Beras menjadi naik harganya di pedesaan yang tidak terjangkau operasi pasar. Sesungguhnya operasi pasar yang dilakukan hanya obat psikologis yang tidak

banyak berpengaruh kepada petani dan buruh tani di pedesaan. Namun, pemerintah menjadikan ini cara paling jitu menangani masalah kenaikan harga. Manajemen beras menjadi penyebab utama impor beras nasional.

Dampak bagi petani

Dampak psikologis sekarang semakin sulit menemukan petani muda yang bangga dengan profesinya. Petani sekarang usianya sudah di atas 50 tahunan. Kondisi ini akan mengancam produksi pangan nasional. Hilangnya kebanggaan sebagai petani diakibatkan iklim politik pertanian yang tidak mendukung. Anggaran pertanian hanya 2 persen dari APBN, atau sekitar 16,38 triliun. Political will presiden terhadap pertanian masih sangat kurang.

Dampak berikutnya, urbanisasi mengancam perkotaan. Urbanisasi pemuda tani yang minim ketrampilan akan menambah masalah diperkotaan, minimnya lahan pekerjaan akhirnya menjadikan pemuda desa banyak yang menjadi beban sosial di perkotaan. Kondisi ini akan semakin memperparah kondisi kota yang sudah penuh dengan penduduk.

Matinya perekonomian pedesaan, hijrahnya pemuda tani ke kota membuat sawah akan ditinggalkan dan akhirnya dijual. Inilah yang akan membahayakan pembangunan nasional, hilangnya SDM di pedesaan merupakan agen perubahan yang signifikan. Jika tidak ada

pemuda, maka pelan tapi pasti perekonomian pedesaan akan semakin tertinggal jauh. Artinya, kemiskinan akan menjadi hantu gentanyangan di pedesaan. Dampak impor beras bukan hanya soal hitungan angka inflasi atau mengenai perburuan rente para tengkulak, namun impor beras akan mengerus identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa agraris.

Bulog vs Mafia Impor Beras?

Pengakuan Jendral Buwas Kepala Bulog bahwa tidak ada pembahasan soal impor beras dalam pengambilan keputusan impor beras 1 juta ton cukup mengagetkan publik. Sebagai pelaksana urusan pangan,harusnya Bulog ikut memberikan masukan dan pertimbangan terkait kebijakan strategis nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sangat aneh dan bisa jadi ada miskordinasi antar lembaga pemerintah dalam keputusan impor beras. Bagaimana jadinya Bulog tidak tau soal impor beras ini? Nampaknya, mafia sudah bekerja lebih canggih dan rapi masuk ke lorong dalam pengambil keputusan sampai sekelas Jendral Buwas melontarkan ke publik akan "ketidaktahuannya". Pernyataan ini bisa dimaknai sebagai "ancaman" dan peringatan agar jangan main-main dengan impor beras yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak.

Menurut Buwas, data per 14 Maret 2021, stok beras Bulog mencapai 883.585 ton. Terdiri dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 859.877 ton dan beras komersial sebanyak 23.708 ton. Perkiraan panen mulai Maret-April 2021. Penyerapan beras oleh Bulog pada periode itu untuk CBP bisa mencapai 390.800 ton. Artinya, setelah panen raya, pasokan beras untuk CBP saja sudah lebih dari 1 juta ton.

Ini data Bulog jelas ada surplus 1 juta ton beras. Lalu siapa yang menghendaki impor? Bisa jadi ada kekuatan luar pengejar rente impor yang bernilai besar. Pemerintah tidak boleh kalah. Sikat mafia impor beras.

Rente Impor Beras

Menilik Data BPS, terlihat bahwa Indonesia rutin melakukan impor beras sejak tahun 2000-2019. Data impor beras dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada 2016, Indonesia mengimpor 1.283.178 ton beras dengan nilai USD 531,84 juta. Tiga negara yang paling banyak memasok beras, yakni Thailand sebanyak 557.890 ton dengan nilai USD 243,13 juta. Vietnam sebanyak 535.557 ton dengan nilai USD 212,60 juta, dan Pakistan sebanyak 134.832 ton dengan nilai USD 49,12 juta.

Di Tahun 2017, Indonesia mengimpor 305.274 ton beras dengan nilai USD 143,64 juta. Tiga negara paling banyak memasok beras, yakni Thailand sebanyak 108.944 ton senilai USD 60,28 juta, Pakistan sebanyak 87.500 ton dengan nilai USD 34,79 juta, dan Myanmar sebanyak 57.475 ton senilai USD 19,54 juta.

Tahun 2018, Indonesia mengimpor 2.253.824 ton beras dengan nilai mencapai USD 1,037 miliar. Tiga negara paling banyak memasok beras, yakni Thailand sebanyak 795.600 ton dengan USD 386,53 juta, Vietnam sebanyak 767.180 ton dengan nilai USD 360,74 juta, dan India sebanyak 337.999 ton dengan nilai USD 139,15 juta.

Tahun 2019, Indonesia mengimpor 444.508 ton beras dengan nilai mencapai USD 184,25 juta. Tiga negara yang paling banyak memasok beras, yakni Pakistan sebanyak 182.564 ton dengan nilai USD 67,81 juta, Myanmar sebanyak 166.700 ton dengan nilai USD 56,28 juta, dan Thailand sebanyak 53.278 ton dengan nilai USD 38,56 juta.

Tonase yang mencapai ribuan sampai jutaan ton mengandung hitungan "keuntungan" yang sangat menjanjikan. Memang sangat menggiurkan bagi para mafia impor beras. Kerja tidak melanggar hukum positif layaknya orang koruspi, namun bisa mereguk keuntungan triliunan rupiah dalam sekali transaksi impor.

Faisal Basri, seorang ekonom senior UI, mencontohkan adanya praktik pemburuan rente dalam setiap komoditas pangan strategis. Salah satunya pada Oktober 2019. Harga beras eceran di Indonesia Rp13.978/kg. Pada waktu yang sama, harga beras Vietnam setara dengan Rp4.561/kg. Ada selisih harga Rp 9.471. Selisih harga yang lebih dari tiga kali lipat itu amat menggiurkan dari sisi keuntungan. Seandainya pun dibandingkan dengan harga eceran tertinggi untuk beras medium di Jawa (Rp9.450/kg), selisihnya dengan beras Vietnam masih dua kali lipat.

Katakanlah beras impor Vietnam sampai di pasar domestik menjadi Rp7.000/kg, keuntungan yang diraup setidaknya Rp2.500/kg. Dikalikan dengan 1 juta ton, maka

keuntungan bersih bisa mencapai Rp2,5 triliun. Angka keuntungan yang sangat fantastis. Bisnis apa yang dalam sekali transaksi bisa triliunan yang didapatkan.

Mungkin bisnis haram narkoba kelas dunia yang menyamainya. Makanya para rente terus bergentayangan ke semua jalur agar disetujui. Sudah banyak kasus impor beras berujung penjara karena rente impor ini sangat dzolim dan merugikan kedaulatan negara serta petani yang sudah berjuang menyediakan pangan secara tertatih karena serbuan impor.

Harus Tegas

Jangan beri celah mafia impor yang merusak kedaulatan pangan dan menyakiti petani Indonesia. Bulog harus berani menyampaikan kepada Presiden bahwa kebijakan impor ini merugikan Bulog dan petani. Kalimat ini harus keluar dari Jendral Buwas jika ingin membuktikan bahwa Jendra Buwas memang benar-benar Buwas atau bahasa jawanya kejam kepada para mafia impor dan semua *beking* yang ada di belakangnya. Tidak peduli siapa pun di belakangnya, Bulog sebagai lembaga pangan harus bersifat tegas dan lugas.

Namun, nampaknya Bulog dan Buwas tidak akan mampu. Pengakuan bahwa Bulog hanya bisa masuk ke 6% pangsa pasar pangan nasional dan 94% dikuasai oleh sindikasi memang membuat kebijakan soal pangan terbentur dengan kepentingan bisnis para mafia impor.

Penguatan Bulog dan Satgas Pangan yang sudah ada sampai level kabupaten kota harus dilakukan. Mafia impor tidak boleh diberi kesempatan merusak dengan selalu mengandalkan impor. Ketegasan Bulog dan Jendral Buwas dalam urusan impor pangan harus mewarnai Badan Pangan Nasional (BPN) yang baru saja dibentuk oleh Presiden. Hadirnya BPN menjadi alat baru para komprador asing yang menjadi mafia impor untuk merusak kedaulatan pangan nasional.

“

Mafia impor tidak boleh diberi kesempatan merusak dengan selalu mengandalkan impor.

”

Pertanian Tidak “Wajib”

Negeri agraris ini pernah mengalami krisis hebat karena inflasi yang mencapai 650%. Akibatnya, harga beras menjadi melonjak dari Rp17.500/kg menjadi Rp50.000/kg pada kuartal keempat sehingga rakyat banyak yang kelaparan. Kondisi ini terjadi pada tahun 1965 di saat negeri ini dipimpin oleh Soeharto di awal masa orde baru. Soeharto dengan cepat memulihkan kondisi ekonomi dalam jangka waktu tiga tahun. Tahun 1969, kondisi ekonomi nasional mulai membaik dan inflasi tertekan pada titik yang aman. Soeharto terus melakukan perbaikan ekonomi negara dengan tujuan pemantapan stabilitas ekonomi nasional. Pertanian sebagai pilihan untuk terus membangkitkan asa bangsa yang baru saja bangkit dari keterupukan di era orde lama.

Pertanian di zaman Soeharto mengalami kemajuan yang pesat. Berbagai upaya dan kebijakan dikeluarkan untuk mengangkat harkat martabat petani. Berbagai kebijakan mulai dari Bimas, kelompecapir, KUD yang dikemas dalam Trilogi pembangunan akhirnya menjadikan bangsa ini mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Soeharto diminta memberikan ceramah dalam forum PBB tentang keberhasilan dalam pencapaian ketahanan pangan dengan swasembada beras. Soeharto dengan segala kontroversinya di ujung masa

pemerintahan telah menorehkan catatan emas dalam pembangunan pertanian nasional.

Namun, kondisi pasca Soeharto seolah-olah pertanian menjadi anak tiri di negeri agraris ini. Masa transisi BJ Habibie menorehkan tinta emas dengan kebebasan demokrasi sehingga lahirlah puluhan parpol peserta pemilu. Tidak banyak cerita karena masa pemerintahan yang singkat. Sayangnya, di akhir 1998 negeri ini menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia. Sebanyak 4,8 Juta ton beras diimpor untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Bahkan, PDB pertanian hanya tumbuh 0.88% terendah dalam sejarah negeri agraris ini.

Di era Gus Dur dan Megawati pun pertanian juga belum menjadi prioritas utama dalam kebangkitan ekonomi nasional. Era Megawati yang terkenal dengan pembelaan kepada *wong cilik* nyatanya juga masih memandang sebelah mata pertanian. Bahkan, produk pertanian berupa kedelai dan kelapa sawit ditukar dengan Pesawat Shukoi dan helikopter yang senilai 1 triliun. Sedangkan impor beras terus jalan, harga gabah anjlok dan subsidi pertanian semakin berkurang.

Era SBY sudah hampir 10 tahun berjalan. Pertanian nampaknya dikembalikan kepada rel utamanya walaupun masih setengah hati. Prestasi swasembada beras 2004 mengangkat pamor Indonesia di dunia internasional setelah hampir 20 tahun menunggu

prestasi ini. Kebijakan pertanian diperkuat dengan lahirnya RPPK (revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan) tahun 2005 yang membawa angin segar lahirnya UU Penyuluhan dan rancangan UU Pemberdayaan dan Perlindungan Petani. Kementerian Pertanian mencatat PDRB sektor pertanian tahun 2010 mencapai 737,8 triliun atau 82 kali dari nilai APBN sebesar 9 triliun. Sedangkan tahun 2011, PDRB diperkirakan sebesar 760 triliun atau 45 kali dari APBN tahun 2011 sebesar 16,7 triliun. Prestasi di atas nampaknya belum memberikan nilai yang signifikan jika melihat kebijakan secara makro terhadap dunia pertanian. Kesan bahwa pertanian masih menjadi “tumbal” ekonomi nasional sering terjadi disaat harga beras naik pemerintah kebingungan dengan operasi pasar, padahal kenaikan harga beras sedikit menguntungkan petani.

Urusan pilihan, bukan wajib

Sejak digulirkan konsep otonomi daerahlah menjadikan pertanian semakin tidak terurus. Disebutkan dalam pasal 1 angka 4 PP No.38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 7 ayat (4) (PP No, 38/2007) disebutkan

bahwa urusan pilihan meliputi: kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan, dan ketransmigrasian. Kondisi ini menjadikan kemajuan pertanian di daerah sangat tergantung pada perencanaan pembangunan daerah.

Peraturan ini telah menjadikan daerah yang kaya akan potensi pertanian belum tentu menjadikan pertanian sebagai urusan wajib, namun justru hanya menjadi urusan pilihan yang pastinya akan cenderung diabaikan dalam proses perencanaan. Akibatnya, pemerintah provinsi dan Kabupaten hanya mengalokasikan pertanian sekitar 1–5% dari APBD yang ada. Inilah titik kritis pertanian sejak diserahkan urusannya ke daerah. Padahal, secara potensi harusnya pertanian mendapatkan alokasi anggaran minimal 20% dari APBD untuk dapat mengembangkan pertanian menuju industri yang handal.

Jelas kebijakan ini akan sulit sinkron dengan kebijakan pusat yang mana pertanian menjadi urusan yang sangat rentan dengan kondisi ekonomi politik nasional. Misalnya kenaikan harga beras, maka sektor pertanian akan dituding menjadi biang keladinya. Tentu ini tidak *fair*. Kondisi ini dipicu oleh “kesalahan” kebijakan yang menyerahkan urusan pertanian hanya menjadi urusan pilihan, bukan urusan wajib.

Belajar kepada Thailand, negeri pengekspor beras yang perlindungan sektor pertaniannya sangatlah kuat.

Kebijakan pertanian menjadi urusan wajib di mana pemerintah menjadikan anggaran pertanian sebagai anggaran prioritas APBN, khususnya perlindungan terhadap petani dan produk pertanian. Negara Haiti mampu memproduksi beras 170.000 ton/tahun dan mampu memenuhi kebutuhan 95% pangan nasionalnya, Amerika sebagai Bapak Liberalisme menjadikan pertanian sebagai benteng keseimbangan ekonominya dengan menggandakan subsidi untuk pertanian mencapai US \$ 1,7 Miliar atau rata-rata US \$ 232/hektar. 30 negara maju mengalokasikan anggaran pertanian setara dengan 30% dari anggaran nasional. Indonesia hanya mengalokasikan 0,16% dari APBN. Ini terjadi karena memang pertanian bukan urusan wajib hanya pilihan jika digunakan.

Masa depan pertanian

Studi yang dilakukan oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) pada 2003 di Afrika menunjukkan bahwa setiap tambahan US\$1 pendapatan petani berpotensi menambah pendapatan antara US \$ 0,96–US \$1,88. Artinya ada kenaikan signifikan jika pertanian maju, dengan laju pertumbuhan penduduk satu tahun 1,34% maka diperlukan pertumbuhan pertanian sebesar 3–4 % per tahun. Pengentasan kemiskinan melalui pertanian sangatlah efektif dibandingkan dengan sektor lain. Faktanya 70% penduduk negeri ini adalah petani dan 70% negeri ini adalah daratan dengan potensi pertanian tinggi.

Sedangkan 70% penduduk negeri ini ada di wilayah pedesaan. Secara alami ini sangat mendukung bagi pengentasan kemiskinan. Pengembangan agribisnis pedesaan menjadi pilihan pokok dalam upaya mengembalikan kejayaan pertanian nasional.

Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah agar pertanian menjadi garda depan kebangkitan ekonomi nasional haruslah integral dan menyentuh kebijakan dasar pembangunan pertanian. Pertama, kembalikan urusan pertanian sebagai urusan wajib bukan urusan pilihan. Mengubah PP no 38/2007 hanya membutuhkan keberanian presiden dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Selama urusan pertanian hanya bersifat pilihan maka jangan mimpi negeri ini akan berjaya dengan pertanian. Terbukti sektor pertanian adalah satu-satunya sektor yang mampu bertahan dari krisis dan memberikan sumbangan PDRB paling besar nasional.

Kedua, komitmen politik pemerintah dan DPR dalam pengesahan UU Perlindungan dan Pemberdayaan petani sangat dibutuhkan. UU ini sudah terkatung-katung sejak zaman Megawati. Adanya UU ini akan memberikan jaminan dan kepastian nasib petani yang dilibas oleh liberalisme perdagangan internasional atas nama impor. Perlindungan dari aspek kebijakan ini sangat penting agar urusan pertanian ada kepastian hukumnya. Jika monyet saja dilindungi oleh UU, sangat ironis jika petani dan pertanian diabaikan.

Ketiga, tataran teknis substansial adalah pengembangan SDM pertanian. Semakin menurunnya minat mahasiswa pertanian dalam 10 tahun terakhir cukup mengkhawatirkan karena akan berimbas kepada pengembangan industri pertanian masa depan. Jika saat ini tren SMK menciptakan mobil, hendaknya pemerintah bisa membuat SMK pertanian di setiap kabupaten/kota sentra pertanian sehingga SDM pertanian akan mengalami regenerasi. Penguasaan teknologi, transfer pengetahuan dan inovasi agribisnis akan muncul dari sini.

Keempat, keberpihakan sektor keuangan. Cita-cita bank pertanian memang harusnya segera direalisasikan. Pembiayaan pertanian oleh petani terbukti memiliki nilai macet yang sedikit dibandingkan kredit macet para konglomerat hitam. Keberhasilan Muhammad Yunus dengan Greeman Bank bisa menjadi contoh Indonesia dalam pemberdayaan petani di pedesaan. Minimnya kredit pertanian serta tingginya bunga bank pertanian menjadikan petani enggan berurusan dengan bank. Jepang memberikan bunga bank hanya 1% per tahun. Seharusnya Indonesia juga bisa.

“

Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah agar pertanian menjadi garda depan kebangkitan ekonomi nasional haruslah integral dan menyentuh kebijakan dasar pembangunan pertanian.

”

Gula yang Semakin Pahit

Kebijakan PPN 10% bagi petani tebu yang dikeluarkan oleh Menku membuat semakin berat beban petani tebu rakyat. Kondisi pergulaan nasional semakin berat, kebutuhan nasional 5-6 juta ton per tahun dengan impor 2,7 juta ton dan produksi nasional 3.3 juta ton.

Mimpi swasembada gula 2020 akan semakin jauh karena petani semakin enggan menanam tebu dikarenakan terus merugi. Apalagi dikenakan pajak 10%. Dari berbagai kunjungan dan pertemuan bersama petani, pabrik gula keluhannya sama, yakni gula semakin "pahit", swasembada entah kapan, apalagi kesejahteraan petani tebu.

Kenapa pahit?

Permasalahan pertebuan nasional sudah parah. Pertama, ambruknya pusat pembibitan tebu nasional membuat varietas bibit unggul tebu sulit didapatkan petani. Bibit yang dipakai oleh petani adalah bibit KW 3 karena memang saat ini pemerintah dan swasta belum mampu menyediakan. Riset sudah semakin jarang.

Kedua, ketersediaan pupuk yang terbatas bagi petani sangat menyulitkan. Pembatasan hanya 2 Ha yang mendapat subsidi pupuk semakin menjadikan petani tebu terengah-engah mendapatkan pupuk. Belum lagi pupuk yang semakin sulit didapatkan.

Ketiga, pabrik gula yang sudah tidak kompetitif. Rencana penutupan 23 pabrik dari 45 membuat resah 1,7 juta pegawainya. Selain itu, pabrik gula umurnya sudah mendekati satu abad. Sudah infisiensi dari sisi produksi sehingga banyak yang sudah ditutup dan ada yang dimerger. Sedangkan, revitalisasi pabrik melalui pembangunan pabrik sejumlah 28 pabrik masih tahap rencana.

Belum selesai pemerintah melakukan revitalisasi PG dan pembebanan sisi *on farm* sampai *off farm* tiba-tiba menteri keuangan mengeluarkan kebijakan soal pajak 10% bagi gula petani dan pembeli. Belum lagi kuota impor gula yang ditaksir asosiasi mencapai 4 juta ton.

Ketiga permasalahan di atas memberikan gambaran bahwa gula sebenarnya sudah "pahit" dari mulainya.

Sebagai gambaran saat ini rata-rata pendapatan petani tebu dengan luasan lahan 900 meter persegi dalam satu kali panen hanya mendapat 2 juta rupiah kotor. Bagaimana mau sejahtera kalau kondisi petani tebu seperti ini?

Saat ini produktifitas tanaman tebu petani baru 75 ton/ha dengan rendemen 7-7.5% dan biaya menghasilkan gula kurang lebih 10.000/kg. Kondisi ini tidak stabil karena regulasi soal rendemen di level provinsi dan kabupaten serta PG belum berpihak kepada petani.

Kapan Swasembada?

Pemerintah harusnya memahami kondisi pergulaan nasional dan kesejahteraan petani tebu, petani jangan dikenakan pajak 10% jika ingin swasembada gula. Jika tidak dibatalkan maka siap-siap saja produksi gula akan anjlok karena petani enggan menanam tebu kembali. Impor gula akan semakin menggila.

Sekarang ada 6073 ton gula rakyat yang masih *ngendon* di gudang-gudang PG se Jawa Tengah. Bahkan, gula pabrik gula juga belum terjual, produksi 2015 pernah baru terjual maret 2016. Serbuan gula impor yang merembes ke pasar tradisional membuat harga gula rakyat tercekik.

Kondisi di tahun 2017 juga semakin susah karena regulasi yang belum berpihak dan kondisi hulu sampai hilir juga tidak beranjak membaik. Cita-cita swasembada jauh panggang dari api.

Swasembada gula analisis saya baru akan bisa tercapai tahun 2027. Cita-cita 2020 sulit terealisasi dengan kondisi sekarang. Swasembada kunci utama kenaikan kesejahteraan petani tebu. Bisa tercapai dengan syarat. Pertama, revitalisasi pabrik gula selesai tahun 2019. 28 pabrik baru dengan total investasi yang bisa mencapai 30 triliun harus disinergikan antara pemerintah dan swasta.

Kedua, penyediaan lahan sekitar 1 juta Ha bagi petani tebu. Saat ini data lahan tebu yang ada sekitar

482.239 Ha dengan rincian lahan tebu rakyat 291.000 Ha atau 60% lahan nasional. Lahan tebu non rakyat 113.000 Ha atau 23%. Masih butuh lahan 500 ribuan Ha. Ini syarat mutlak soal lahan jika ingin swasembada.

Terakhir, kesejahteraan petani tebu. Impor gula harus dibuat *roadmap* untuk dikurangi dalam sepuluh tahun ke depan. Gula rakyat harus naik melalui rendemen tebu yang minimal 8%. Saat ini hanya maksimal 6-7% sehingga masih jauh dari harapan.

Mencari Kedelai yang Hilang

Tahu dan tempe adalah salah satu budaya makan rakyat Indonesia. Kedelai adalah *gold from the soil*, protein lengkap dan tinggi. Tidak ada tahu tempe pasti akan membuat pengunjung rumah makan bertanya-tanya, “Mana lauk kesukaanku? Enak nih tahu tempe sama sambel pedas.”

Ya, tahu tempe sudah jadi makanan pokok bangsa ini. Wajar jika sekarang harganya naik karena bahan dasarnya mahal dan langka sehingga menjadikan rakyat kebingungan. Kalaupun ada, harganya pasti mahal. Di Semarang dan Pemalang harga per kilo sudah 9000-9500 rupiah yang biasanya 5000-7000 rupiah.

Ke mana hilangnya kedelai? Atau kenapa kedelai jadi masalah tiap tahun? Bukan akhir tahun 2020 atau awal 2021 saja kejadian ini, 2019 juga sudah ramai. Mari kita lihat dengan jernih permasalahan kedelai ini dalam skala lebih luas, menjangkau kedaulatan pangan rakyat.

Pertama, memang faktualnya kebutuhan kedelai kita sudah jauh dari kapasitas produksi nasional. Penduduk 260 juta dengan pola makan yang rutin 3 kali sehari setidaknya butuh 2,5 juta ton kedelai untuk konsumsi hampir 90% dan industri hanya 10% yang muaranya tetap membutuhkan kedelai.

Sejak 2008 sampai 2017, produksi kedelai nasional kisaran 1,2-1,3 ton/ha dengan kebutuhan 1,9-2,5 juta/ton

per tahun. Pada tahun 2021 berkisar 320.000 ton atau lebih rendah dibandingkan produksi tahun 2019 yang mencapai 420.000 ton. Ada defisit 2,1 juta ton yang harus dipenuhi dari impor.

Konsumsi kedelai rakyat di tahun 2010 mencapai kisaran 8.53 kg/kapita per tahun. Hingga tahun 2020, konsumsi kedelai bisa lebih dari 10.00 kg/kapita per tahun.

Jumlah yang semakin terus meningkat di tengah produksi kedelai nasional yang terus menurun, yang akhirnya untuk pemenuhan pemerintah "wajib" impor hampir 80% setiap tahunnya.

Jadi kalau mau berhenti impor rasanya tidak mungkin. Kenyataan ini harus diterima dengan kesadaran tinggi. Walau impor ini kebijakan pahit yang sering dimainkan oleh para mafia.

Kedua, jika impor menjadi wajib lalu apa yang bisa dilakukan agar kedelai tidak hilang dan rakyat tetap bisa menikmati dengan harga terjangkau? Jawabannya, pemerintah harus konsisten dalam kebijakan dan kesadaran akan swasembada kedelai yang sudah dicanangkan 2020.

Sisi akademis dan bisnis kedelai semua tahu, menanam kedelai beresiko tinggi, biaya mahal, tenaga banyak dan kurang kompetitif dengan komoditas lain. Belum perbenihan yang jalan di tempat.

Jalan menuju swasembada bisa dibuat dengan terang, perkuat semangat petani kedelai dengan harga yang bagus. Permendag 7 tahun 2020 yang disahkan 10 Februari 2020 memberikan mandat harga pembelian ke petani sebesar 8500/kg kedelai lokal dan menjual ke pengrajin sebesar 9200/kg.

Kedelai impor dijual ke pengrajin sebesar 6800/kg. Harga ini sebenarnya kompetitif kalau pengawasan berjalan, problemnya lemah dan seolah tidak digunakan acuan ini. Satgas pangan harus berani, sikat importir nakal dan hukum dengan tegas.

Setelah aturan tegak maka berikutnya perluas lahan tanam kedelai. Kita butuh setidaknya 1,67 juta Ha untuk bisa memenuhi 2,5 juta ton per tahun. Fokuskan saja ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat , NTB, Aceh. Lima daerah inilah yang selama ini menjadi penyangga produksi benih nasional.

Mengutip data Kementerian Pertanian yang mengacu pada Badan Pusat Statistik (BPS), luas lahan kedelai 2018 mencapai 680.373 hektar dengan produksi 982.589 ton. Masih kurang 1 Juta Ha lagi, bukan lahan kembali di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Pada 2014, Jawa Timur menyumbang 43% produksi nasional. Pada 2018, luasan lahan Jawa Timur 133.593 Ha dengan produksi 150.916 ton/tahun. Jawa Tengah 104.899 Ha dengan kapasitas produksi 166.195 ton/tahun. Jawa Barat 98.938 Ha dengan produksi

140.000 ton/tahun. Dari mana lahan 1 juta Ha harus dibuka? *Food estate* harusnya bisa menjadi salah satu solusi, tapi rencana 600.000 Ha masih perlu proses panjang untuk mencetak jadi lahan siap tanam. Resiko kegagalan tinggi.

Pemenuhan 1 juta Ha lahan hanya akan bisa dipenuhi dengan memanfaatkan lahan kosong dan kritis yang cocok di lima daerah penyangga kedelai. Kalau tidak mampu sediakan lahan 1 Juta Ha maka lebih baik kita hentikan polemik kedelai, yang ada hanya keributan berujung ketidakpastian.

Misteri hilangnya kedelai di setiap akhir dan awal tahun akan terus terjadi jika pemerintah tidak konsisten dalam pengawalan kebijakan dan kesadaran paripurna untuk mengedepankan kepentingan nasional.

Pangan Lokal untuk Keluarga

Tanggal 16 Oktober adalah hari pangan sedunia. Pangan merupakan kebutuhan pokok keluarga sebagai unit terkecil dalam tatanan negara ini memegang peranan penting dalam maju dan mundurnya sebuah bangsa. Jika keluarga sehat negara akan kuat, keluarga tidak sehat negara akan bangkrut. Fakta ini menjadi masalah serius bagi keluarga jika tidak mendapatkan solusi yang baik. Menurut BPS 2011 penduduk miskin 31,5 juta orang. Berada di garis kemiskinan dengan gaji Rp212.210/bln. Keluarga penerima raskin 2011 sebanyak 71 juta orang. Penduduk miskin versi Bank Dunia (US\$ 2/org/hr) sebanyak 117 juta orang (47% total penduduk). 20-40% anak di 72% Kabupaten Indonesia menderita kurang gizi, dan 36% anak menderita gizi kronis.

Sedikitnya 50.000 orang bunuh diri setiap tahunnya, di mana kesulitan ekonomi dan kemiskinan menjadi sebab utama. Hampir setiap jam sekitar 24 balita dan 2 ibu meninggal, karena tidak mampu mengakses pelayanan dasar kesehatan (Sri Palupi, Ketua *Institute for Ecosoc Rights*, Kompas 9/12/2010, halaman 3). Jumlah SDM berkualitas (*knowledge, skills, and work ethics*) masih sangat sedikit. Jumlah *entrepreneurs* sangat sedikit 0,18% total penduduk. Harusnya minimal 0,2% total penduduk (Mac Celland, 2007).

Mengacu definisi dari Bank Dunia (1986) dan Maxwell dan Frankenberger (1992) yakni “*akses semua orang setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat (secure access at all times to sufficient food for a healthy life)*”. Melihat kondisi di atas dan standar dunia mengenai pangan akan timbul pertanyaan bagi kita, apakah keluarga Indonesia sudah mampu memenuhi pangan secara tepat? Strategi apa untuk mendapatkan pemenuhan pangan yang bergizi?

Indeks Pangan Keluarga

Indeks ketahanan pangan dihitung dengan cara mengkombinasikan keempat indikator ketahanan pangan (ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan, keberlanjutan dan kualitas/keamanan pangan). Kombinasi antara kecukupan ketersediaan pangan dan frekuensi makan memberikan indikator stabilitas ketersediaan pangan. Selanjutnya, kombinasi antara stabilitas ketersediaan pangan dengan akses terhadap pangan memberikan indikator kontinuitas ketersediaan pangan. Indeks ketahanan pangan diukur berdasarkan gabungan antara indikator kontinuitas ketersediaan pangan dengan kualitas/keamanan pangan. Indeks ketahanan pangan ditingkat rumah tangga dikategorikan sebagai berikut : pertama, rumah tangga tahan pangan adalah rumah tangga yang memiliki persediaan pangan/makanan pokok secara kontinu (diukur dari persediaan makan selama

jangka masa satu panen dengan panen berikutnya dengan frekuensi makan 3 kali atau lebih per hari serta akses langsung) dan memiliki pengeluaran untuk protein hewani dan nabati atau protein hewani saja.

Kedua, rumah tangga kurang tahan pangan adalah rumah tangga yang memiliki kontinuitas pangan/makanan pokok *kontinyu*, tetapi hanya mempunyai pengeluaran untuk protein nabati saja. Kontinuitas ketersediaan pangan/makanan kurang *kontinyu* dan mempunyai pengeluaran untuk protein hewani dan nabati.

Ketiga, rumah tangga tidak tahan pangan adalah rumah tangga yang dicirikan oleh kontinuitas ketersediaan pangan *kontinyu*, tetapi tidak memiliki pengeluaran untuk protein hewani maupun nabati

Jika melihat definisi di atas nampaknya 40% keluarga Indonesia bisa dikategorikan rumah tangga kurang tahan pangan. Buktinya 20-40% anak di 72% kabupaten di Indonesia menderita kurang gizi, dan 36% anak menderita gizi kronis dan penerima raskin sampai 71 juta jiwa. Berdasarkan definisi ketahanan pangan dari FAO (1996) dan UU RI No. 7 tahun 1996, yang mengadopsi definisi dari FAO dan Bank Dunia bahwa pangan untuk hidup sehat belum dirasakan oleh keluarga Indonesia. Adanya pangan lokal yang menjadi alternative pangan keluarga juga sampai sekarang masih jauh dari harapan, perpres mengenai diversifikasi pangan lokal sebagai basis

ketahanan pangan keluarga belum mampu menjawab kekurangan pangan di keluarga.

Pengembangan Pangan Lokal

Pengembangan dan penganekaragaman sumber pangan lokal menuju gizi seimbang dapat dilakukan dengan beberapa strategi dan kebijakan. Kebijakan ini diarahkan untuk pertama, mendorong diversifikasi pola konsumsi pangan berbasis pangan lokal. Implementasinya pejabat mulai presiden sampai walikota menerapkan dengan menghadirkan pangan lokal dalam acara resmi kedinasan.

Kedua, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang makanan beragam, bergizi, berimbang, dan aman sejak anak usia dini. Adanya kampanye pangan sehat untuk keluarga sudah harus menjadi kultur keluarga. Budaya makan instan hendaknya dikurangi untuk memenuhi pangan yang bergizi.

Ketiga, mendorong pengembangan teknologi pengolahan, terutama pangan lokal non beras, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial. Alat pengolahan pangan sederhana hendaknya sudah bisa dimiliki oleh keluarga, sehingga bisa mengarah kepada Pemberdayaan agroindustri skala rumah tangga untuk produksi pangan pokok karbohidrat non-beras, non-terigu dan sumber protein hewani, serta sayur dan buah.

Pangan untuk keluarga merupakan hak yang

harus dipenuhi oleh negara, namun di saat kondisi bangsa belum mampu mencukupi secara ideal, keluarga harus cermat dan teliti dalam menumbuhkan kreatifitas demi tercukupinya pangan secara penuh. Hari keluarga semoga menjadi refleksi bagi keluarga Indonesia bahwa masih ada 40% keluarga Indoensia yang rentan ketahanan pangan.

“

Pangan untuk keluarga merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara, namun di saat kondisi bangsa belum mampu mencukupi secara ideal, keluarga harus cermat dan teliti dalam menumbuhkan kreatifitas demi tercukupinya pangan secara penuh.

”

Kebijakan Pangan di Pulau Karimunjawa

Tidak banyak yang menyoroti dampak kondisi musim ekstrim saat ini terutama bagi kehidupan penduduk di pulau terpencil seperti Karimunjawa. Oktober sampai Maret ini masuk kepada musim barat yang merupakan musim “kelaparan” bagi penduduk setempat. Tingginya ombak yang bisa mencapai 2-3 meter membuat kapal KM Muria Jepara-Karimun sebagai sarana utama transportasi laut terpaksa berhenti berlayar, termasuk kapal Cepat KM Kartini jurusan Semarang-Karimun juga menghentikan operasinya sampai sekarang karena cuaca yang masih ekstrim.

Saat kondisi musim barat seperti ini kadang muncul berita “menghebohkan” bahwa terjadi kelaparan dan kelangkaan pangan di pulau Dewa Daru ini. Pemprov dan Pemda kelabakan memberikan klarifikasi tentang kondisi pangan di Karimunjawa. Bagaimana sebenarnya kondisi pangan dan kebijakan apa yang bisa dibuat untuk mengatasi kondisi pangan di sana? Benarkah terjadi kelaparan di Karimunjawa sebagaimana dikabarkan media saat musim barat?

Maxwell and Frankenberger (1992) mendefinisikan kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan untuk memperoleh kebutuhan pangan setiap saat, sedangkan kerawanan pangan sementara adalah kerawanan pangan yang terjadi secara sementara yang

diakibatkan karena masalah kekeringan banjir, bencana, maupun konflik sosial.

Mengacu definisi di atas sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kepulauan Karimunjawa yang dikelilingi pulau-pulau kecil tersebut terletak 110 kilometer di timur laut Semarang aksesibilitas menuju kepulauan ini sangat bergantung pada kondisi pelayaran. Masalah pertama yang sering dihadapi adalah kurangnya pasokan bahan makanan, kondisi ini mengakibatkan warga terancam kelaparan. Kedua, penanganan pangan yang dilakukan oleh pemerintah masih bersifat instan bersifat *carity/social*. Belum adanya model pengembangan ketahanan pangan membuat tidak jelasnya penanganan masalah kerawanan pangan di Kepulauan Karimunjawa.

Khusus Desa Karimunjawa, ketergantungan pangan dari Jepara memang sangat besar. Desa dengan luas 4.302 hektar ini hanya memiliki lahan pertanian produktif sekitar 62 Ha. Pulau Kemujan dengan luasan 1.501 Ha memiliki lahan produktif pertanian seluas 210 Ha, sedangkan Parang (termasuk Nyamuk) dengan luasan 690 Ha. Sebagian besar lahannya produktif untuk pertanian, yakni 400 Ha. Lahan pertanian produktif tersebut di luar lahan konservasi yang harus dijaga dan dilindungi. Masalah ketiga tidak adanya kebijakan/*road map* tentang pengembangan pangan membuat “gelap” kemandirian pangan di Karimunjawa.

Ketahanan Pangan

Mengacu kepada Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. USAID (1992) mendefinisikan kondisi ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses secara fisik dan ekonomi untuk memperoleh kebutuhan konsumsinya untuk hidup sehat dan produktif. FAO (1997) mengartikan situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, di mana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut.

Tiga definisi diatas mewakili kondisi dan permasalahan pangan di Karimunjawa. kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pemprov untuk penanganan pangan perlu mendapatkan dukungan dan arahan dari berbagai pihak agar mendapatkan sebuah kebijakan yang integral, termasuk kajian dan penelitian independen yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi dan kalangan LSM selama ini.

Kebijakan Strategis

Hasil penelitian dan kajian yang dilakukan penulis sebagai bahan tesis magister menunjukkan bahwa

berdasarkan data Kecamatan Karimunjawa Dalam Angka tahun 2009, jumlah penduduk di Kecamatan Karimunjawa adalah 10.210 orang. Dengan mengambil asumsi rata-rata kebutuhan beras per kapita per tahun 125 kg beras (Husodo, 2006), maka dibutuhkan 1.276.250 kg beras atau 1.276,25 ton beras per tahun di Kepulauan Karimunjawa.

Sementara itu pada kondisi saat ini, dengan luas sawah total 32 hektar dan yang baru produktif dimanfaatkan adalah 9 hektar, estimasi produksi beras yang dapat dihasilkan oleh Kepulauan Karimunjawa hanya sekitar 24,3 ton per tahun atau hanya sekitar 1,9 persen dari kebutuhan beras penduduk di Kecamatan Karimunjawa. Dari data ini terlihat bahwa memang kondisi sumberdaya lokal memang tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pangan

Jumlah cadangan bahan pangan (beras) yang dimiliki penduduk untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dengan estimasi kebutuhan beras per kapita per hari adalah 0,34 kg beras, maka stok beras dalam 1 bulan yang harus ada di masyarakat Karimunjawa idealnya adalah 104 ton. Namun, dari hasil pengolahan data hasil survey, jumlah stok beras di masyarakat hanya sekitar 47,4 ton atau hanya tersedia 45% saja dari total kebutuhan untuk masyarakat dalam satu bulan.

Menggunakan analisis SWOT menunjukkan ada tiga strategi yang bisa dilakukan untuk mengatasi kondisi pangan di Kepulauan Karimunjawa, yaitu strategi

pemantapan ketersediaan pangan, strategi pemantapan diversifikasi konsumsi pangan, strategi pemantapan distribusi pangan berbasis potensi lokal.

Pertama, strategi pemantapan ketersediaan pangan meliputi peningkatan cadangan pangan masyarakat menjelang musim barat, perwilayahan komoditas pangan sesuai dengan potensi, pemantapan infrastruktur produksi pertanian, optimalisasi lahan yang ada, baik sawah, ladang, pekarangan, kebun dan kolam/tambak yang ada. Langkah operasional strategi ini bisa dilakukan melalui program pembangunan Lumbung Pangan Rakyat yang difungsikan sebagai KUD dan pasar bersama saat pasokan pangan terhambat, optimalisasi ladang dengan menaman cabai sebagai komoditi mahal sehingga tidak mendatangkan dari luar.

Kedua, strategi pemantapan diversifikasi konsumsi pangan meliputi penyediaan suplai pangan dengan mengembangkan sumberdaya lokal (unggulan wilayah), peningkatan KAP (*knowledge, attitude, practice*) melalui gerakan tentang konsumsi pangan yang beragam dan gizi seimbang serta aman, peningkatan *income*. Diversifikasi berarti menambah pangan di luar beras. Potensi jambu mete Karimun sudah dikenal sampai istana negara, namun sampai sekarang masih sebatas diolah secara tradisional. Keberadaan nelayan yang dikenal konsumtif bisa dilatih melalui usaha ekonomi produktif berbasis keluarga seperti pembuatan krupuk ikan, nugget ikan, bakso ikan

dan berbagai jenis makanan berbasis sumber daya local.

Ketiga, strategi pemantapan distribusi pangan meliputi pasokan bahan pangan dari musim ke musim, penguatan posisi tawar petani dan nelayan, pengembangan sarana dan prasarana pasca panen dan infrastruktur distribusi, kemitraan petani, nelayan, dan pedagang. Langkah operasional kebijakan ini bisa dilakukan dengan berbagai program pemerintah seperti penambahan moda angkutan laut antar pulau sebagai sarana distribusi pangan, penguatan kelembagaan petani dan nelayan antar pulau. Peneliti saat ke Pulau Parang melihat potensi luar biasa pertanian dan wisata yang bisa mendukung kesejahteraan warga, namun ketiadaan moda transportasi yang layak membuat Pulau Parang jarang dikunjungi wisatawan. Pembangunan pasar sebagai sarana penggerak ekonomi desa sangat diperlukan masyarakat Karimun. Saat ini baru saja difungsikan pasar bantuan pemerintah. Sebelumnya pasar adanya hanya pasar kaget yang hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketiga kebijakan di atas bisa menjawab kabar bahwa kondisi pangan di Karimunjawa memang masuk kategori rawan pangan sementara, dan bisa diatasi secara cepat tanpa menimbulkan kecemasan dan kelaparan seperti yang sering kita dengar. Kebijakan ini melibatkan banyak instansi dan stakeholder yang harus bersinergis membangun pangan di Karimunjawa. Ego sektoral dan

lemahnya koordinasi antar instansi menjadikan berbagai kebijakan hanya berakhir di konsep dan kertas pimpinan.

“

Ego sektoral dan lemahnya koordinasi antar instansi menjadikan berbagai kebijakan hanya berakhir di konsep dan kertas pimpinan.

”

Konflik Petani dan Pengkavlingan Lahan

Konflik petani dan perusahaan perkebunan sawit di Mesuji memakan korban. Masalah penguasaan tanah menjadi penyebab utamanya. Kedua belah pihak tidak mampu menahan diri terhadap proses negosiasi yang sudah dilakukan berbagai pihak sejak lama. Kasus ini sebenarnya sudah lama terjadi, bahkan P0emprov Lampung dan DPRD sudah pernah membuat pansus kasus konflik warga dan perkebunan sawit, namun hasilnya juga nihil. Kasus ini mencuat saat petani mengadukannya ke DPR. Meledaklah kasus ini menjadi isu baru.

Petani yang merupakan masyarakat kecil dan lemah sekarang selalu dalam posisi bersalah sebagai “tersangka” dengan tuduhan melakukan perbuatan anarkis, merusak perkebunan dan merampas lahan milik perkebunan, bahkan dituduh membunuh karyawan perusahaan. Aparat dalam hal ini polisi dan TNI sendiri dianggap melanggar HAM oleh Komnas HAM karena melakukan penembakan tanpa alasan yang kuat terhadap warga sipil. Akhirnya, kondisi ini menuai kecaman berbagai pihak. DPR ikut meminta konflik pertanahan yang melibatkan petani dan aparat ini segera diselesaikan secara permanen dengan pilihan tanah diserahkan ke petani atau ke perusahaan sawit besar yang notabnya milik asing sehingga semua menjadi jelas. Bahkan, SBY mengintruksikan agar kasus ini segera diusut tuntas.

Melihat secara dalam konflik antara petani dan “aparatus” serta perusahaan sawit besar bisa dibaca sebagai resistensi petani dan tindakan *defensive* perlawanan akibat tidak terjaminnya kehidupan petani. Dengan tidak terjaminnya kehidupan petani, maka perilaku resistensi tersebut dipakai sebagai *survival strategy* dalam menghadapi ketidakpastian. Perilaku ini bukan saja menggambarkan tindakan pengingkaran petani terhadap pemegang kebijakan yaitu negara, melainkan juga pertanda aksi yang berprinsip dahulukan selamat (*safety first*) di tengah tidak terjaminnya kehidupan mereka jika mengamini kebijakan negara yang hegemonik dan untuk kasus perebutan tanah di Mesuji petani akan sangat dirugikan jika menuruti keinginan perusahaan perkebunan sawit yang menjadikan lahannya sebagai lahan perluasan perkebunan sawit.

Dugaan sementara perluasan lahan berstatus register ini dilakukan oleh perusahaan secara ilegal. Artinya sangat rugi jika petani menyerah kepada cukong asing pemilik perusahaan sawit.

Manifestasi ketidakpuasan terhadap penyelesaian kasus tanah register di Mesuji inilah yang melatarbelakangi petani dan masyarakat Mesuji melakukan perlawanan. Adanya ketidakjelasan hukum dalam penyelesaian konflik ini akhirnya petani melakukan aksi politik demonstrasi yang dianggap sikap paling efektif dan tepat terhadap perusahaan sawit dan aparat negara.

Demonstrasi bagi petani adalah aksi terakhir dan satu-satunya yang memiliki *bargaining position* bagi perbaikan ekonomi dan penghidupan mereka setelah tanah konflik bisa digarap sepenuhnya oleh mereka. Dilihat dalam perspektif perjuangan gerakan petani, aksi di Mesuji adalah lambang akan lemahnya proses penyelesaian kasus agrarian yang dilakukan oleh negara cenderung eksploitatif dan cenderung mengabaikan kearifan lokal.

Dualisme Hukum

Lahan register 45 yang menjadi objek konflik memang sudah puluhan tahun dihuni oleh petani. Bahkan, petani dan masyarakat lokal sudah ada sebelum perusahaan sawit itu berdiri. Konflik ini memuncak setelah aparat pamswakarsa, polisi dan TNI melakukan penggusuran paksa warga untuk perluasan lahan perkebunan sawit dengan alasan sudah mendapatkan izin dari pemda. Walaupun perusahaan mengklaim tanah itu resmi miliknya, namun rakyat Mesuji mengaku sudah membeli tanah tersebut sehingga petani pun mengaku tanah itu milik mereka. Dualisme hukum inilah yang juga melatarbelakangi konflik ini yang mengakibatkan sejarah konflik agraria selalu berdarah-darah.

Dualisme hukum ini menghadapkan antara hukum negara yang “diwakili” perusahaan sawit dengan hukum petani (hukum adat/lokal). Negara menempatkan hukum

sebagai determinan struktur yang terekonstruksi dalam wujudnya yang bersifat *substantive* (berkandungan etis) ke wujud yang lebih menekankan bentuknya yang formal. Perusahaan sawit atas nama negara ngotot mengkavling tanah berdasarkan formalitas yang dimiliki dengan mengabaikan hukum adat yang bersifat lokal. Perusahaan sawit merasa prosedural birokrasi sudah dilalui sehingga membenarkan langkah hukum untuk menindak petani yang dianggap melawan negara. Sebaliknya, petani berpegang kepada hukum lokal, dimana menurut Moore (1973), hukum adat yang bersifat lokal memiliki kekuatan dalam realitas pola perilaku masyarakat (*pattern of actual behavior*). Kondisi ini akan mampu menciptakan *self regulating mechanism* yang akan bekerja secara informal namun otonom yang umumnya mempunyai mekanisme yang cukup efektif untuk tujuan penyelesaian setiap konflik yang terjadi. Konflik akibat dualisme hukum ini seharusnya tidak akan terjadi jika negara kuat dan memiliki ketegasan terhadap perusahaan sawit agar “bersabar” untuk tidak menembak petani yang sebenarnya secara alami memiliki sarana untuk bisa menyelesaikan konflik dengan hukum adat mereka.

Jalan Keluar

Konflik sudah terjadi, jatuh korban dari pihak petani, dan citra aparat kurang baik. Semangat UU Pokok Agraria 1960 sebenarnya sudah memberikan harapan

keadilan bagi petani dalam mendapatkan tanah sebagai lahan garapan mereka. Namun, sampai reformasi 1997, semangat ini tidak pernah terealisasi. Strategi *land reform* dinilai oleh rezim penguasa sebagai strategi gerakan kiri untuk melawan negara. Paradigma negara dalam pembangunan masih berorientasi kepada kapitalis dan leiberalisasi yang cenderung mengorbankan petani pemilik negara yang realitasnya agraris ini. Penelitian yang dilakukan Rehman Sobhan (1993), seorang ekonom terkemuka dari Bangladesh, melalui bukunya yang berjudul “Pembaharuan Agraria dan Transformasi Sosial : Prasyarat Bagi Pembangunan” mengulas perjalanan sejarah dan pengalaman program pembaharuan agraria di 36 negara di seluruh dunia.

Kesimpulannya yang ia tarik dari semua pengalaman tersebut jika kita benar-benar ingin mewujudkan penghapusan kemiskinan di pedesaan serta mengakselerasikan segala pembangunan ekonomi, maka tidak ada alternatif lain selain melakukan pembaharuan agrarian secara radikal. Kajian teori ini memberikan makna tersirat bahwa masalah agraria harus dikembalikan spiritnya kepada petani sebagai rakyat yang membutuhkan lahan untuk kehidupan mereka. Kenyataan selama ini, perusahaan sawit selalu merugikan petani, bahkan hingga jatuh korban nyawa. Sekarang saatnya negara atas nama hukum dan kemanusiaan menyelesaikan kasus Mesuji ini untuk menjadikan petani sebagai pemilik

“sah” lahan, pengkavlingan tanah secara illegal oleh perusahaan sawit harus dihentikan.

Pemuda Kembalilah ke Desa

Pemuda selalu membuat sejarah. 28 Oktober adalah sejarah pemuda Indonesia. Pemuda adalah darah segar yang mengalir untuk membangun peradaban manusia. Mereka adalah pilar kebangkitan sebuah entitas yang melaju dengan penuh semangat dan daya juang yang tinggi. Kehadiran Indonesia sebagai sebuah negara formal adalah perjuangan pemuda, melalui tangan mereka negeri ini mampu keluar dari arah kebobrokan orde baru yang mencengkram negara ini sampai akan runtuh pilar demokrasinya. Reformasi hasilnya telah dinikmati oleh rakyat negeri ini.

Namun, apa jadinya jika pemuda sudah mulai meninggalkan desa, meninggalkan tanah kelahiran yang membutuhkan sentuhan kerja dan sumbangan pikiran untuk memajukan masyarakatnya. Mereka menjadi sarjana juga dari desa. Inilah kondisi pemuda negeri ini. Sudah tidak betah tinggal di desa. Inilah awal kemiskinan negeri ini.

Kita ingin mengingatkan bahwa pemuda adalah tulang punggung pembangunan di desa. Jika mereka sudah enggan tinggal di desa dan menggarap sawah, ladang sebagai pilar kebangkitan ekonomi rakyat maka sesungguhnya negeri ini akan terus dalam kubangan kemiskinan. Kenapa mereka enggan di desa? Apa kota selalu menjanjikan kesejahteraan? Bukankah desa

memiliki sumber daya alam dan kearifan lokal yang luar biasa sebagai modal pembangunan karakter dan ekonomi perdesaan?

Pemuda dan pembangunan Desa

Berdasarkan proyeksi data *single years* Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009, menurut potensi pemuda Indonesia sangat besar jika dilihat dari jumlah pemuda yang sebanyak 62.985.401 jiwa atau sekitar 33% penduduk Indonesia. Peran pemuda dalam pembangunan juga diatur dalam UU No 40 tahun 2009 yang mengamanatkan pemuda untuk terlibat dalam pembangunan. Peran pemuda khususnya terhadap pembangunan pedesaan sangat penting,

Tahun Ajaran 2010/2011, peserta Ujian Nasional (UN) SMA/MA yang dinyatakan lulus mencapai 99,22 persen atau sebanyak 1.450.498 dari sebanyak 1.461.941 peserta UN sedangkan peserta yang tidak lulus 11.443 peserta atau 0,78 persen. Salah satu permasalahan ke depan adalah bagaimana masa depan para lulusan SMA/MA ditengah kondisi tingginya jumlah pengangguran di kalangan pemuda.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008, tingkat pengangguran di kalangan pemuda Indonesia sangat memprihatinkan, di mana angka pengangguran kelompok usia produktif ini mencapai 60,5 persen dari jumlah pemuda yang ada.

Batasan umur yang dipatok BPS untuk pemuda Indonesia adalah berusia 16-20 tahun. Sedangkan menurut ukuran Kemempora, batasan usia pemuda adalah 16-30 tahun. Bahkan Pada 2009, terjadi peningkatan, jumlah pemuda Indonesia yang kini masih menganggur mencapai 17 persen dari 70 juta jiwa atau sekitar 12 juta pemuda. Sebagian besar dari mereka juga hidup dalam kondisi miskin dan berpendidikan rendah.

Peran pemuda dalam era pembangunan reformasi saat ini bagi kepentingan pengentasan kemiskina di desa setidaknya ada lima. Pertama, sebagai agen perubahan. Pemuda harus mampu menjadi kompor yang terus menyala dalam menggerakkan masyarakat dan menerapkan nilai lokal dalam melakukan pembangunan desa. Kedua, pelaku utama kegiatan kewirausahaan berbasis sumber daya lokal. Inilah langkah penting yang akan mengobarkan semangat pemuda lain agar tidak hijrah ke kota sebagai pengangguran. Melalui karangtaruna pemuda harus bisa menyakinkan bahwa desa bisa mensejahterakan. Meniru ucapan Tukul, *wajah desa rezeki kota*.

Pemuda desa harus mengasah ilmu secara luas. Memang kita akui bahwa pendidikan itu salah satu kunci keberhasilan, namun kita juga melihat bahwa sukses di desa kadang tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi-tinggi. Lihatlah pengusaha nasional Bob Sadino yang sudah empat puluh depalan tahun mengelola bisnis hanya

bermodal “nekat” dan berani mengambil resiko. Bukan modal pendidikan saja, mengasah ilmu artinya belajar dengan relaitas kehidupan desa yang merupakan sarana menempa kemampuan bagi kemajuan dirinya dan desanya.

Bali desa membangun desa

Tahun 2011, penduduk penerima raskin sebanyak 71 juta jiwa. Sensus penduduk 2010 sebanyak hampir 32 Juta jiwa masuk dalam rumah tangga miskin. Bahkan, 40% keluarga miskin itu terancam kekuarangan pangan. 63% penduduk miskin di atas ada di pedesaan. Inilah tantangan pemuda untuk bisa mengubah semangat pemuda desa mengentaskan kemiskinan ini. Belajar dari Muh Yunus, peraih nobel perdamaian dunia, kita bisa menemukan beberapa langkah bagi pemuda dalam membangkitkan perekonomian pedesaan.

Pertama, pemuda harus mampu membuat desain perubahan pengentasan kemiskinan berbasis kemampuan lokal. Ajak bersama petani, perangkat, dan tokoh masyarakat agar bisa ikut dalam usaha menjadikan desa sebagai tempat menyenangkan bagi pemuda. Pendekatan kemampuan lokal inilah yang membuat Muh Yunus memberikan modal bagi pengemis, petani, dan masyarakat miskin untuk berusaha. Adanya *trust* yang tinggi akhirnya perubahan sikap dan karakter petani desa itu berubah.

Kedua, penguatan kelembagaan usaha berbasis desa. Kelembagaan ini yang nantinya bisa mengakses berbagai program dan biaya dari pemerintah. Adanya karang taruna, koperasi pemuda desa, dan unit usaha desa bisa menjadi sekolah bisnis di desa. Bimbingan bisa dimintakan kepada akademisi dan praktisi yang telah berhasil di bidangnya. Keberhasilan Ahmad, seorang pemuda desa asal Cirebon yang telah memiliki usaha ekspor–impor buah lokal sampai senilai 1 miliar ke tujuh negara membuktikan bahwa dari desa bisa mendunia dengan pemuda.

Ketiga, pemuda membangun ketokohan di tengah masyarakat. Usaha ini menjadikan pemuda selalu aktif terlibat dalam berbagai kegiatan usaha dan sosial di pedesaan sehingga tidak berpikir akan ke kota yang juga belum jelas akan berbuat apa di kota. Ketokohan pemuda di desa akan membawa pengaruh bagi pemuda lain untuk mengikuti langkah sang tokoh pemuda tersebut, dengan demikian persatuan pemuda dalam berbagai aspek akan tercapai. Inilah kuncinya bersatunya harapan, kesejahteraan, dan pembangunan desa sebagai pilar ekonomi nasional akan tercapai. Pemuda memiliki peran besar untuk posisi terkahir ini. Ya, kondisi pemuda demikian akan menjadikan desa ibarat kota yang memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Pepatah desa mengepung kota akan terwujud dengan benar–benar menempatkan desa sebagai pilar pembangunan nasional

bersama pemudanya. Pemuda pulanglah ke desa untuk membangun desa demi mewujudkan kesejahteraan bersama.

Hilangnya Pemuda Petani dan Nelayan

Pemuda selalu membuat sejarah. 28 Oktober adalah sejarah pemuda Indonesia. Pemuda adalah darah segar yang mengalir untuk membangun peradaban manusia. Mereka adalah pilar kebangkitan sebuah entitas yang melaju dengan penuh semangat dan daya juang yang tinggi.

Sekarang apa jadinya jika pemuda khususnya pemuda petani dan nelayan sudah mulai meninggalkan desa dan laut. Pemuda sekarang lebih senang jalan-jalan ke mal dan pusat permainan atau bahkan lebih ironis, senang ke dunia malam. Inilah profil pemuda modern sekarang. Pemuda meninggalkan desa dan laut yang sangat membutuhkan sentuhan kerja dan sumbangan pikiran untuk memajukan masyarakatnya.

Banyak pemuda yang menjadi sarjana juga dari desa dan laut, kondisi pemuda negeri ini, sudah tidak betah tinggal di desa dan pantai. Lebih senang dengan hura - hura dan kesenangan lainnya. Inilah awal kemiskinan negeri ini. Pemuda mulai lupa akan tugas utamanya.

Kita ingin mengingatkan bahwa pemuda adalah tulang punggung pembangunan negara yang saat ini dicanangkan bermula dari desa dan laut, jika mereka sudah enggan tinggal di desa dan menggarap sawah, ladang dan melaut sebagai pilar kebangkitan ekonomi

rakyat maka sesungguhnya negeri ini akan terus dalam kubangan kemiskinan.

Kenapa mereka enggan dan meninggalkan laut dan desa? Apa kota dan darat menjanjikan kesejahteraan? Bukankah desa dan laut memiliki sumber daya alam dan kearifan lokal yang luar biasa sebagai modal pembangunan karakter dan ekonomi perdesaan serta maritim?

Pemuda dan pembangunan

Berdasarkan proyeksi data *single years* Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009, menurut potensi pemuda Indonesia sangat besar jika dilihat dari jumlah pemuda yang sebanyak 62.985.401 jiwa atau sekitar 33% penduduk Indonesia. Peran pemuda dalam pembangunan juga diatur dalam UU No. 40 tahun 2009 yang mengamanatkan pemuda untuk terlibat dalam pembangunan. Peran pemuda khususnya terhadap pembangunan pedesaan dan kemaritiman sangat penting.

Batasan umur yang dipatok BPS untuk pemuda Indonesia adalah berusia 16-20 tahun. Sedangkan menurut ukuran Kemenpora, batasan usia pemuda adalah 16-30 tahun. Bahkan Pada 2009, terjadi peningkatan, jumlah pemuda Indonesia yang kini masih menganggur mencapai 17 persen dari 70 juta jiwa atau sekitar 12 juta pemuda. Sebagian besar dari mereka juga hidup dalam

kondisi miskin dan berpendidikan rendah serta tinggal di desa dan pantai.

Pelaku utama kegiatan kewirausahaan berbasis sumber daya lokal. Inilah langkah penting yang akan mengobarkan semangat pemuda lain agar tidak hijrah ke kota sebagai pengangguran. Melalui karang taruna, pemuda harus bisa menyakinkan bahwa laut adalah sumber kesejahteraan. Desa dengan UU Desa memiliki potensi besar karena dari sisi anggaran sangat menjanjikan dari APBN dan APBD. Desa adalah sumber kesejahteraan yang nyata dibanding perkotaan. Desa dan laut bisa mensejahterakan.

Kembali Ke Laut dan Desa

Tahun 2011, penduduk penerima raskin sebanyak 71 juta jiwa. Berdasarkan sensus penduduk 2010, sebanyak hampir 32 Juta jiwa masuk dalam rumah tangga miskin. Bahkan, 40% keluarga miskin itu terancam kekuarangan pangan. 63% penduduk miskin di atas ada di pedesaan, baik desa atau pantai.

Inilah tantangan pemuda khususnya petani dan nelayan untuk bisa mengubah semangat pemuda mengentaskan kemiskinan ini. Belajar dari Muh Yunus, peraih nobel perdamaian dunia, kita bisa menemukan beberapa langkah bagi pemuda dalam membangkitkan perekonomian pedesaan.

Pertama, pemuda harus mampu membuat desain perubahan pengentasan kemiskinan berbasis kemampuan lokal. Ajak bersama petani, nelayan, dan perangkat serta tokoh masyarakat agar bisa ikut dalam usaha menjadikan desa dan laut sebagai tempat menyenangkan bagi pemuda. Pendekatan kemampuan lokal inilah yang membuat Muh Yunus memberikan modal bagi pengemis, petani, nelayan dan masyarakat miskin untuk berusaha. Adanya *trust* yang tinggi akhirnya perubahan sikap dan karakter petani dan nelayan berubah.

Kedua, penguatan kelembagaan usaha berbasis desa dan laut. Kelembagaan ini yang nantinya bisa mengakses berbagai program dan biaya dari pemerintah. Adanya karang taruna, koperasi pemuda desa dan laut, serta unit usaha desa bisa menjadi sekolah bisnis di desa dan pantai. Bimbingan bisa dimintakan kepada akademisi dan praktisi yang telah berhasil dibidangnya. Kisah Susi Pudjiastuti yang kini menjadi Menteri KKP berawal dari pengepul ikan.

Ketiga, pemuda membangun ketokohan di tengah masyarakat. Usaha ini menjadikan pemuda selalu aktif terlibat dalam berbagai kegiatan usaha dan social di pedesaan sehingga tidak berfikir akan ke kota yang juga belum jelas akan berbuat apa di kota. Ketokohan pemuda di desa akan membawa pengaruh bagi pemuda lain untuk mengikuti langkah sang tokoh pemuda tersebut, dengan demikian persatuan pemuda dalam berbagai aspek akan

tercapai. Inilah kuncinya bersatunya harapan, kesejahteraan, dan pembangunan desa sebagai pilar ekonomi nasional akan tercapai.

Pemuda memiliki peran besar untuk posisi terakhir ini. Ya, kondisi pemuda demikian akan menjadikan desa dan laut ibarat kota yang memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Pepatah desa mengepung kota akan terwujud dengan benar-benar menempatkan desa sebagai pilar pembangunan nasional bersama pemudanya. Pemuda, pulanglah ke desa dan laut untuk membangun desa dan laut kita dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

“

Pemuda, pulanglah ke desa dan laut
untuk membangun desa dan laut kita
dalam mewujudkan kesejahteraan
bersama.

”

Ijtihad Politik Pangan Jokowi

Dalam kunjungan ke Wonogiri, Presiden Jokowi menegaskan kembali komitmen dan cita-citanya untuk mewujudkan berdaulat pangan selama tiga tahun. Bahasa sederhana Jokowi saat menyampaikan ke seluruh menteri, kepala daerah, dan kelompok masyarakat Indonesia, *negara kaya raya masa harus impor terus*.

Sebenarnya bukan hal baru dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional untuk berdaulat pangan. Era SBY sudah pernah berhasil swasembada pangan pada tahun 2008 dengan pemberian penghargaan dari FAO. Bahkan pada tahun 2008, Indonesia merupakan penghasil 35% pangan dunia.

Lalu apa rencana dan maksud Jokowi untuk mewujudkan kedaulatan pangan? Membaca pernyataan Jokowi yang akan menghentikan impor pangan sejak kampanye harus kita cermati dan dalami sejauh mana kemampuan Indonesia dalam percaturan politik pangan global?

Globalisasi Pangan

Tantangan globalisasi pangan dunia sangat serius. Kondisi petani saat ini masih jauh dari kata siap untuk berdaulat pangan. Saat ini pertumbuhan jumlah penduduk dari 7 miliar sampai 9 miliar di tahun 2045 menjadi ancaman serius bagi ketersediaan pangan dunia. PBB

merilis bahwa saat ini ada 1 miliar penduduk dunia dalam kondisi kelaparan. Gejolak kenaikan harga BBM saat ini membuat harga pangan nasional memiliki imbas kepada perdagangan dan perekonomian rakyat kecil akan cenderung melambat.

Studi yang dilakukan oleh Cato Institute pada 2005 menunjukkan bahwa petani di negara-negara maju (yang tergabung dalam OECD), menerima subsidi sebesar US\$ 279 miliar atau sekitar 30 persen pendapatan dari pertanian seluruhnya. Petani Amerika Serikat menerima US\$ 46,5 miliar dari pemerintahnya atau sekitar 18 persen dari pendapatan pertanian total Amerika. Masih di Amerika Serikat, setiap keluarga petani mendapat US\$ 79.961, atau 26 persen lebih tinggi dari pendapatan rata-rata nasional.

Yang tak kalah mengejutkan, dua pertiga dari subsidi itu dibagi-bagi kepada 10 persen petani terkaya (Daniella Markheim dan Brian M. Riedl). Ini membuktikan bahwa globalisasi negara maju yang dituntut dalam forum WTO kepada negara-negara berkembang adalah omong kosong belaka. Mereka meminta subsidi kepada petani dihapus agar meningkatkan daya saing, namun di dalam negeri sendiri mereka memberikan subsidi yang luar biasa untuk memproteksi petani dan pengusaha bidang pertanian.

Mari lihat “pretasi” impor kita saat ini. Sepanjang tahun 2012, data BPS menyebutkan nilai impor beras

mencapai 1,8 juta ton dengan nilai US\$ 945,6 juta, jagung mencapai 1,7 juta ton dengan nilai US\$ 501,9 juta. Kedelai mencapai 1,9 juta ton dengan nilai US\$ 1,2 miliar. Biji gandum mencapai 6,3 juta ton dengan nilai US\$ 2,3 miliar.

Tepung terigu sebanyak 479,7 ribu ton dengan nilai US\$ 188,8 juta. Gula pasir mencapai 91,1 ribu ton dengan nilai US\$ 62 juta. Garam sebanyak 2,2 juta ton dengan nilai yang mencapai US\$ 108 juta. Singkong tercatat 13,3 ribu ton atau senilai US\$ 3,4 juta. Kentang sebesar 54,1 ribu ton dengan nilai US\$ 36,4 juta. Total nilai impor pangan utama kita mencapai kisaran di atas 50 triliun.

Kementerian Perdagangan mencatat, untuk mengimpor bahan pangan tersebut Indonesia harus membayar US\$ 9,54 miliar sepanjang 2013. Angka tersebut naik 86,69 persen dibandingkan nilai impor bahan pangan pada 2009 yang tercatat sebesar US\$ 5,11 miliar. Sementara sampai pertengahan 2014 nilai impor pangan Indonesia sudah menyentuh angka US\$ 4,99 miliar.

Pengamat Ekonomi Pertanian UGM, Prof. Dr. Moch. Maksun Machfoed, menyebutkan bahwa 9 komoditi pangan nasional hampir semua impor. Gandum dan terigu 100%, bawang putih 90%, susu 70%, daging sapi 36%, bibit ayam ras 100%, kedelai 65%, gula 40%, jagung 10% dan garam 70%. Setidaknya ada 29 produk pangan impor membanjiri Indonesia setiap tahun.

Kondisi riil di atas membuktikan bahwa paham kapitalisme yang diusung Karl Max sedang mengerogoti politik pangan nasional. Kuasailah sarana produksi, maka engkau kuasai manusianya. Itulah ruh utama kapitalisme. Saat ini petani dalam kondisi tidak mampu memiliki lahan dan terkepung oleh impor pangan yang menggurita disemua sektor pangan mulai dari hulu sampai hilir. Sarana produksi dikuasai oleh konglomerasi sehingga petani semakin jauh dari teknologi. Saat ini globalisasi pangan sudah seperti Ebola yang mengancam dunia saat ini.

Ijtihad

Sampai saat ini kita belum mengetahui apa rencana kerja Jokowi dengan postur APBN yang sudah “dikunci” oleh DPR. Jika rencana 3 tahun dihitung sejak 2015, maka praktis hanya punya waktu 2 tahun APBN untuk berdaulat pangan. Tantangan ketergantungan impor pangan masih sangat kuat, apa solusinya? Pemain rente besar dan mafia pangan masih belum disentuh. Kendala kedaulatan pangan justru di luar kendali sektor pertanian dan perdagangan. Saat ini irigasi nasional rusak 50%, anggaran pertanian hanya 4% dari APBN yang jelas tidak akan mampu berbuat apa – apa.

Jokowi harus mampu menerapkan revolusi mental dalam sektor pertanian jika ingin berdaulat pangan. Setelah mengembalikan orientasi pembangunan nasional

melalui poros maritim saatnya sekarang aksi nyata. Langkah kongkritnya adalah mengalokasikan anggaran untuk mewujudkan daulat pangan yang didukung semua sektor baik pertanian, perikanan, dan kelautan minimal 10–15%. Ini rasional dan nyata untuk menunjukkan bahwa Jokowi pro maritim dan pertanian untuk mewujudkan daulat pangan.

Saat ini APBD provinsi dan kabupaten atau kota juga kritis jika berbicara soal pertanian dalam arti luas. Tidak ada provinsi dan kabupaten atau kota yang serius mendanai pembangunan pertanian dan maritim. Rata-rata APBD hanya kisaran 1–3%. Ini jelas tidak sesuai arahan Jokowi untuk bersatu mengusung tema berdaulat pangan. Daulat pangan berawal dari kabupaten dan provinsi sebagai pemilik wilayah, akan sangat sulit daulat jika kebijakan kepala daerah belum pro daulat pangan.

Sudah saatnya Jokowi melakukan ijtihad politik pangan. Politik pangan yang mandiri dan berdaulat di atas kaki bangsa sendiri. Kalau salah mengambil langkah, Anda masih punya nilai kebaikan yang akan didapatkan oleh bangsa ini. Tiga tahun bukan waktu yang lama untuk sebuah langkah besar melawan arus globalisasi pangan dunia.

“

Sudah saatnya Jokowi melakukan
ijtihad politik pangan. Politik pangan
yang mandiri dan berdaulat di atas
kaki bangsa sendiri.

”

Politik Dagang Sapi Australia

Situasi peternakan nasional sedang guncang. Pemerintah Australia menemukan bahwa Indonesia memperlakukan sapi secara tidak “hewani” atau *welfare animal*. Ini merupakan hasil investigasi *Animals Australia* yang dilakukan terhadap beberapa rumah potong hewan yang disembelih secara tidak layak dalam tayangan program televisi *Four Corners*. Inilah penyebab kenapa menteri pertanian Australia, Joe Ludwig, melarang impor sapi ke Indonesia. Pemerintah sendiri juga bersikap “keras” dengan mengatakan tidak apa-apa jika Australia akan menyetop impor sapi. Mampukah Indonesia memenuhi kebutuhan daging sendiri?

Sapi Indonesia vs Australia

Fakta perdagangan sapi Indonesia–Australia per tahun bisa mencapai 18 triliun. Australia menguasai pasar pemasok sapi hampir 40% kebutuhan daging nasional, kebutuhan nasional daging mencapai 506 ribu ton dan 200 ribu ton daging dipenuhi oleh Australia. Kebutuhan daging setara dengan 600 ribu ekor sapi hidup (bakalan) dan 72 ribu ton daging sapi. Angka di atas membuktikan bahwa Australia mengunci kebutuhan daging Indonesia.

Departemen Pertanian, Dirjen Peternakan, dan Kesehatan Hewan, menyampaikan sejak 2006 jumlah

sapi mengalami kenaikan, di mana untuk sapi potong naik menjadi 10,9 juta ekor dari 2005 yang hanya 10,6 juta ekor. Selanjutnya pada 2007 kembali meningkat menjadi 11,5 juta ekor dan 2008 naik menjadi 12,3 juta ekor. Sedangkan pada 2009 telah berjumlah 12,6 juta ekor. Sedangkan konsumsi mencapai 3 juta ekor per tahun, dihitung dengan angka konsumsi daging sapi 2,4 kg/kapita/tahun dengan jumlah penduduk 214 juta (Tempo Interaktif, 2011). Jumlah di atas sebenarnya masih bisa bertambah jika benar-benar dilakukan pendataan secara serius terhadap potensi ternak lokal yang dimiliki oleh petani dan peternak kecil di pedesaan. Namun, kondisi peternakan sapi saat ini cukup mengkhawatirkan jika dihadapkan dengan kebutuhan daging nasional dan program swasembada daging 2014. Penyebabnya, banyak bibit sapi produktif dipotong oleh rumah potong hewan karena tergiur harga yang bagus.

Politik Berdikari

Melihat kondisi pertarungan politik dagang sapi Australia saat ini perlu sebuah keberanian. Kita bisa belajar dari sejarah saat diterapkan politik berdikari tahun 1960-an. Politik berdikari di sektor perikanan yang didorong oleh peristiwa konfrontasi dengan Malaysia, yang berarti kebutuhan harus dipenuhi berdasarkan pada kemampuan sendiri, melarang impor ikan. Soekarno berani mengatakan kita tidak perlu makan ikan impor dari

Malaysia, kita makan ikan sendiri. Itulah keberanian pemimpin untuk mempertahankan identitas dan harga diri bangsa. Tekanan Australia kepada pemerintah sebenarnya juga tekanan kepada SBY. Kita memerlukan sikap jelas SBY agar Australia tidak menekan terus Indonesia pada sector peternakan.

Politik berdikari yang kita harapkan setidaknya ada tiga tindakan penting untuk melindungi peternakan nasional. Pertama, secara kultur merubah pola pangan nasional. Kita tidak akan “mati” tanpa daging, lebih baik makan ikan yang secara nilai gizi lebih baik. Walaupun impor daging dihentikan oleh Australia, kita masih punya stok ikan yang melimpah ruah. Perubahan pola pangan ini membutuhkan kebijakan pemerintah. SBY bisa mengeluarkan Keppres untuk mengubah pola pangan ini. Keberhasilan Jepang membendung gerakan “Mac Donalizacion” yang mengerus budaya makan ikan juga dikeluarkan kebijakan secara tegas oleh Jepang.

Kedua, revitalisasi peternakan. Perubahan pangan nasional mengatur kebijakan di level *grassroot*. Revitalisasi peternakan dilakukan dengan pemberian insentif untuk peternak lokal. Insentif inilah yang diberikan oleh Australia dan negara-negara maju untuk mendukung keberhasilan berternak masyarakat. Insentif ini berupa subsidi pakan, subsidi bibit unggul, pemberian kredit usaha peternakan. Memang sudah ada berbagai

program subsidi, namun sampai sekarang hasilnya belum jelas untuk bisa mandiri secara nasional.

Ketiga, kebersamaan kolektif. Artinya bahwa politik dagang sapi Australia ini kita lawan dengan kesungguhan dalam menyatukan semua elemen dalam penanganan masalah peternakan nasional. Agenda kongkretnya yaitu daerah-daerah membuat cluster peternakan masif berbasis sapi lokal dan integrasi dengan pertanian. Gerakan ini bisa dilakukan di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan yang merupakan sentra kebun sawit. Sumatera Barat dengan *program one man one cow* jika berhasil akan menghasilkan 3 juta sapi untuk mensuplay kebutuhan nasional.

Akhirnya, harapan akan kemandirian sapi nasional bergantung kepada kita semua. Dihentikannya kran impor sapi seharusnya akan menggairahkan peternakan nasional. Namun, upaya di atas akan sulit terealisasi jika presiden dan seluruh rakyat Indonesia masih enggan untuk memulai dari diri sendiri membiasakan “hidup” tanpa daging sapi. Masih banyak pilihan pangan lain yang memiliki nilai gizi lebih baik. Kita tunggu keberanian SBY untuk menuntaskan politik dagang sapi Australia.

Impian Petani Indonesia

Di berbagai kesempatan, profesi petani dan nelayan selalu menjadi primadona Presiden Jokowi untuk segera diantarkan dari kemiskinan. Saat kunjungan ke Wonogiri dan Semarang, presiden sedih melihat petani dan nelayan yang kondisinya menyedihkan. Memang itulah faktanya, petani dan nelayan selalu menjadi rakyat kecil yang terpinggirkan. Rilis BPS lima tahun terakhir memberikan gambaran teori bahwa nilai tukar petani tidak lebih dari angka 100–105. Artinya nilai produksi petani lebih sedikit dibanding nilai bayar yang diterima petani atas produksi yang sudah dihasilkan.

Mensejahterakan petani bukan perkara mudah. Banyak masalah menghadang untuk menuju petani sejahtera. Sejak era Soekarno sampai SBY, kebijakan yang pro kepada petani masih jauh dari harapan. *Landskap* pembangunan nasional yang 30 tahun terakhir mengarah kepada agraris nampaknya belum cukup menjadi bukti akan lahirnya petani sejahtera. Banyaknya masalah kebijakan dan teknis yang belum tuntas membuat lingkaran kemiskinan dipetani terus berputar tanpa jelas kapan berhentinya.

Jokowi memiliki pekerjaan berat. Fakta bahwa 63,34 persen kemiskinan Indonesia ada di wilayah pedesaan dan pesisir yang didominasi oleh kalangan petani. Rusaknya 50% infrastruktur pertanian mulai dari

jitut, jides, sampai embung dan bendungan menambah semakin rumitnya membuat jalan bangkitnya ekonomi petani. Petani sebagai aktor utama pembangunan pertanian saat ini semakin berkurang. Petani muda sudah hampir “punah”. IPB merilis data hanya 1% petani yang berpendidikan sarjana, 50% lebih tidak tamat SD dan SMP. Lahan sempit tidak lebih dari 0.3 Ha mustahil membuat petani sejahtera.

Di level nasional ada masalah serius mengenai politik anggaran pertanian. Anggaran pertanian tidak lebih dari 4% atau 15,82 trillun dari APBN. Ini sangat ironis dan bertentangan dengan visi negara agraris. APBN 2015 hanya ada sekitar 4% untuk pembangunan pertanian masih kalah dengan biaya perjalanan dinas yang mencapai 32 trillun. Mana mungkin petani bisa sejahtera jika di level kebijakan nasional jauh dari kata peduli.

Kita bandingkan dengan studi yang dilakukan oleh Cato Institute pada 2005 menunjukkan bahwa petani di negara-negara maju (yang tergabung dalam OECD), menerima subsidi sebesar US\$ 279 miliar atau sekitar 30 persen pendapatan dari pertanian seluruhnya.

Petani Amerika Serikat menerima US\$ 46,5 miliar dari pemerintahnya atau sekitar 18 persen dari pendapatan pertanian total Amerika. Masih di Amerika Serikat, setiap keluarga petani mendapat US\$ 79.961, atau 26 persen lebih tinggi dari pendapatan rata-rata nasional. Melihat kondisi diatas rasanya akan berat mewujudkan

petani sejahtera. Kita bandingkan APBN 4% dengan Amerika yang sudah 20%-40%. Melihat fakta ini pemerintah dan Jokowi harus segera mengambil langkah tegas jika tidak ingin gigit jari menuai kegagalan kembali untuk mensejahterakan petani.

Pengamat Ekonomi Pertanian UGM , Prof.Dr. Moch. Maksun Machfoed, menyebutkan bahwa 9 komoditi pangan nasional hampir semua impor. Gandum dan terigu 100%, bawang putih 90%, susu 70%, daging sapi 36%, bibit ayam ras 100%, kedelai 65%, gula 40%, jagung 10% dan garam 70%. Setidaknya ada 29 produk pangan impor membanjiri Indonesia setiap tahun.

Daftar masalah petani di atas sudah ada sejak zaman SBY, belum semua terselesaikan. Saatnya sekarang Jokowi untuk menuntaskan dan mensinergikan dengan janji kampanye untuk mensejahterakan petani. Mimpi petani Indonesia untuk menjadi petani “berdasi” bisa terwujud. Petani berdasi adalah petani yang menjadi aktor utama pembangunan pertanian nasional. Petani yang mampu dengan bangga pergi ke sawah sambil naik mobil dan mengontrol lahan pertaniannya dengan modernisasi mesin pertanian. Mimpi petani sederhana, tidak rumit seperti politik yang sering membuat bingung petani.

Mimpi Petani

Menjadi aktor utama pembangunan nasional terimplentasikan dalam konteks kebijakan. Lahirnya UU

No. 13 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani seolah menjadi angin segar bagi jalan sejahtera untuk petani. Kebijakan ini banyak memuat pasal terkait dengan upaya pemerintah pusat dan daerah untuk mengangkat harkat dan martabat petani. Saatnya Jokowi menggunakan UU ini untuk benar-benar membuat petani terlindungi dari serbuan produk impor dan mengutamakan produk lokal. Pertanian harusnya bukan hanya menjadi urusan pilihan, namun kembalikan kepada urusan wajib bagi propinsi berbasis pertanian.

Kedua, keberpihakan anggaran pertanian. Adanya poros maritim jangan melupakan poros agraris dunia, semua negara maju pasti pertanian dan petaninya juga maju. Jika AS mampu mengalokasikan 20–40% APBN untuk pertanian mungkin Indonesia belum mampu. Anggaran 10% sudah cukup bagus untuk kemajuan politik anggaran saat ini. Kebijakan ini bisa dibuat seperti amanat UUD 1945 yang memberikan mandat 20% untuk dana pendidikan. Propinsi dan Kabupaten kota lumbung pertanian bisa wajib menerapkan 10% APBD untuk pertanian. Visi besar Jokowi berdaulat pangan akan dinilai dari keseriusan dalam mengalokasikan anggaran pertanian di APBN Perubahan 2015.

Ketiga, mimpi petani desa adalah lahirnya generasi baru pemuda petani berjiwa wirausahawan. Negara maju memiliki minimal 3% pengusaha. Saat ini Indoensia baru punya 1,4% pengusaha, itupun belum banyak yang

bergerak di sektor pertanian skala makro yang berorientasi kepada kesejahteraan petani. Saat ini kita selalu dicibir bahwa petani sudah tua dan tidak produktif, minat pemuda kepada petani sangat rendah. Data di atas memberikan gambaran bahwa pertanian belum menarik pemuda untuk bisa berkarya dan sukses. Jokowi hendaknya membuat 1 juta petani pemuda yang berjiwa pengusaha.

Februari 2014, jumlah petani menurun 280 ribu jiwa yang artinya petani semakin berkurang. Lahirnya pemuda petani ini sangat penting untuk memberikan harapan bahwa menjadi petani itu membahagiakan, menyenangkan, dan masa depannya cerah. 1 juta pemuda petani diberikan pembekalan dan pendampingan oleh bapak asuh pengusaha-pengusaha sukses.

Satu lagi mimpi petani kita. Lahan garapan yang layak dan cukup untuk bisa sejahtera. Petani maju minimal memiliki 3 sampai 10 Ha lahan agar bernilai bisnis dan memiliki prospek ke depan. Lahirnya Kementerian Agraria yang berelaborasi dengan BPN harusnya mampu memenuhi harapan petani agar lahan kosong dan tidak produktif bisa diinventarisir untuk keperluan petani. Ada 10 juta lahan pekarangan yang saat ini tersedia. Program 1 juta lahan untuk petani di era SBY bagus untuk dilanjutkan. Dengan lahan minimal 3 Ha maka petani akan mampu menjadikan putra-putri mereka

memiliki harapan sejahtera jika meneruskan bertani walaupun sudah sarjana.

Kebijakan, anggaran, lahan, dan SDM yang pro petani menjadi mimpi panjang petani Indonesia yang sudah terlalu lama hidup dalam kubangan kemiskinan. Mimpi hari ini adalah kenyataan hari esok, itulah semangat masa depan petani Indonesia.

Petani vs TNI

Konflik petani dan TNI di Kebumen akhirnya memakan korban. Konflik mengenai penguasaan tanah menjadi penyebab utamanya. Kedua belah pihak tidak mampu menahan diri terhadap proses negosiasi yang sedang dilakukan berbagai pihak terkait. Petani yang merupakan masyarakat kecil dan lemah sekarang dalam posisi bersalah sebagai “tersangka” dengan tuduhan melakukan perbuatan anarkis merusak fasilitas negara (baca: TNI). TNI sendiri dianggap melanggar HAM oleh Komnas HAM karena melakukan penembakan tanpa alasan yang kuat terhadap warga sipil. Akhirnya, kondisi ini menuai kecaman berbagai pihak. DPR ikut meminta konflik pertanahan yang melibatkan petani dan TNI ini segera diselesaikan secara permanen dengan pilihan tanah diserahkan ke petani atau ke TNI sehingga semua menjadi jelas.

Melihat secara dalam konflik antara petani dan TNI di Kebumen bisa dibaca sebagai resistensi petani dan tindakan *defensive* akibat tidak terjaminnya kehidupan petani. Dengan tidak terjaminnya kehidupan petani, maka perilaku resistensi tersebut dipakai sebagai *survival strategy* dalam menghadapi ketidakpastian. Perilaku ini bukan saja menggambarkan tindakan pengingkaran petani terhadap pemegang kebijakan yaitu negara, melainkan juga pertanda aksi yang berprinsip dahulukan selamat

(*safety first*) di tengah tidak terjaminnya kehidupan mereka jika mengamini kebijakan negara (TNI) yang *hegemonic* dan untuk kasus perebutan tanah di Kebumen petani akan sangat dirugikan jika menuruti keinginan TNI menjadikan lahannya sebagai lahan latihan militer. Karena sering kali latihan merusak tanaman yang sudah siap panen.

Manifestasi ketidakpuasan terhadap penyelesaian kasus tanah urut sewu itulah yang melatarbelakangi ribuan petani Desa Setrojenar, Kebumen. Adanya ketidakjelasan hukum dalam penyelesaian konflik ini akhirnya membuat petani melakukan aksi demonstrasi yang dianggap sikap paling efektif dan tepat terhadap negara dan TNI. Demonstrasi bagi petani adalah aksi terakhir dan satu-satunya yang memiliki *bargaining position* bagi perbaikan ekonomi dan penghidupan mereka setelah tanah konflik bisa digarap sepenuhnya oleh mereka. Dilihat dalam perspektif perjuangan gerakan petani, aksi di Kebumen adalah lambang akan lemahnya proses penyelesaian kasus agrari yang dilakukan oleh negara cenderung eksploitatif dan cenderung mengabaikan kearifan lokal.

Dualisme Hukum

Tanah Urut Sewu yang menjadi objek konflik memang sudah puluhan tahun ditanami semangka dan bodin oleh petani. Konflik ini memuncak setelah LSM dan

pihak luar masuk memprovokasi petani agar melawan TNI. Walaupun TNI mengklaim tanah itu resmi miliknya, namun desa juga mengeluarkan dokumen letter C kepada petani terhadap tanah yang sama sehingga petani pun mengakui tanah itu milik mereka. Dualisme hukum inilah yang juga melatarbelakangi konflik ini yang mengakibatkan sejarah konflik agraria selalu berdarah-darah.

Dualisme hukum ini menghadapkan antara hukum negara (TNI) dengan hukum petani (hukum adat/lokal). TNI menempatkan hukum sebagai determinan struktur yang terekonstruksi dalam wujudnya yang bersifat *substantive* (berkandungan etis) ke wujud yang lebih menekankan bentuknya yang formal. TNI ngotot menggunakan Tanah Urut Sewu berdasarkan formalitas yang dimiliki dengan mengabaikan hukum adat yang bersifat lokal. TNI merasa prosedural birokrasi sudah dilalui sehingga membenarkan langkah hukum untuk menindak petani yang dianggap melawan negara. Sebaliknya, petani berpegang kepada hukum lokal, di mana menurut Moore (1973) bahwa hukum adat yang bersifat lokal memiliki kekuatan dalam realitas pola perilaku masyarakat (*pattern of actual behavior*). Kondisi ini akan mampu menciptakan *self regulating mechanism* yang akan bekerja secara informal, namun otonom yang umumnya mempunyai mekanisme yang cukup efektif untuk tujuan penyelesaian setiap konflik yang terjadi.

Konflik akibat dualisme hukum ini seharusnya tidak akan terjadi jika TNI “bersabar” untuk tidak menembak petani yang sebenarnya secara alami memiliki sarana untuk bisa menyelesaikan konflik dengan hukum adat mereka.

Jalan Keluar

Konflik sudah terjadi, sudah jatuh korban dari pihak petani, dan citra TNI menjadi kurang baik. Semangat UU Pokok Agraria 1960 sebenarnya sudah memberikan harapan keadilan bagi petani dalam mendapatkan tanah sebagai lahan garapan mereka. Namun, sampai reformasi 1997 semangat ini tidak pernah terealisasi, strategi *land reform* dinilai oleh rezim penguasa sebagai strategi gerakan kiri untuk melawan negara. Paradigma negara dalam pembangunan masih berorientasi kepada kapitalis dan neoliberalisasi yang cenderung mengorbankan petani pemilik negara yang realitasnya agraris ini. Penelitian yang dilakukan Rehman Sobhan (1993), seorang ekonom terkemuka dari Bangladesh, melalui bukunya yang berjudul “Pembaharuan Agraria dan Transformasi Sosial : Prasyarat Bagi Pembangunan” mengulas perjalanan sejarah dan pengalaman program pembaharuan agraria di 36 negara di seluruh dunia.

Kesimpulannya yang ia tarik dari semua pengalaman tersebut jika kita benar-benar ingin mewujudkan penghapusan kemiskinan di pedesaan serta mengakselerasikan segala pembangunan ekonomi, maka

tidak ada alternatif lain selain melakukan pembaharuan agrarian secara radikal. Kajian teori ini memberikan makna tersirat bahwa masalah agraria harus dikembalikan spiritnya kepada petani sebagai rakyat yang membutuhkan lahan untuk kehidupan mereka. Tinggal TNI mau atau tidak? Semua itu kembali kepada TNI yang lahir dari rakyat.

“

Jika kita benar-benar ingin mewujudkan penghapusan kemiskinan di pedesaan serta mengakselerasikan segala pembangunan ekonomi, maka tidak ada alternatif lain selain melakukan pembaharuan agrarian secara radikal.

”

Menjaga Semangat Petani Milenial

Menjadi petani bukan hal mudah. *Image* yang dinarasikan petani itu profesi susah dan dekat dengan kemiskinan, kesusahan serta jauh dari harapan. Faktanya begitu, dari 7,3 jiwa juta petani Indonesia (sensus 2013) yang sukses bukan lagi petani, skalanya sudah usaha mungkin hanya 1% saja.

Dorongan lahirnya petani milenial baru sebatas jargon, *urban farming* masih dianggap gaya hidup bukan kebutuhan, sedangkan kebutuhan akan pangan untuk 264 juta penduduk terus meningkat. Akankah 2035-2040 Indonesia akan kehilangan petani? Bisa jadi iya. Indonesia akan menjadi negara miskin pangan dan hidup tergantung dari pangan negara lain.

Petani Saat Ini

Kebutuhan pangan nasional 80% diproduksi oleh petani kecil. FAO menyebutkan 90% stok pangan global juga diproduksi oleh petani, namun kondisi petani tetap miskin.

Usia petani menurut LIPI saat di atas 47 tahun, pemuda yang mau bertani hanya 3%. Catatan Kementan 2010-2013 ada penurunan 5,1 rumah tangga petani yang setara dengan 21 juta jiwa. Artinya, petani semakin tidak menarik buat pemuda dan rakyat umumnya.

Kesejahteraan petani baru sebatas mimpi. 10 tahun terakhir tidak bergerak di 100-103 yang artinya belum sejahtera. Pendapatan dan ongkos produksi kadang lebih besar ongkos produksi, rugi pasti.

Lahan juga semakin berkurang sepuluh tahun terakhir hampir 400.000 Ha, tinggal menyisakan kepemilikan lahan 0.2 Ha. Ini jelas jauh dari ideal untuk hadirkan petani sejahtera. Kondisi nasional saat ini sektor pertanian dan petani sendiri semakin tidak menarik, negara agraris sudah tinggal cerita.

Petani milenial

Jika ingin petani maju dan sejahtera, maka Indonesia harus serius menjaga spirit para pemuda agar mau kembali ke desa, kembali menjadi petani yang membangkitkan ekonomi nasional dari desa. Negara maju selalu didukung oleh sektor pertanian yang maju. Itulah faktanya.

Susah mungkin mengajak petani ke sawah, sebenarnya tidak juga. Asalkan ada harapan dan masa depan pasti mereka mau, jadikan petani milenial yang sejahtera. Itulah kuncinya di tengah bonus demografi, jadikan para pemuda bangga menjadi petani. Bagaimana caranya?

Pertama, negara harus hadir di sawah dan desa. Dana desa fokuskan mengembangkan ekonomi desa berbasis pertanian dengan mengajak pemuda sebagai

penggerak utamanya. Bumdes atau Balkondes sebagai pusat pergerakan ekonomi desa harus mampu menarik minat mereka.

Jadikan pemuda petani milenial berdasi. Berikan kepercayaan dengan bimbingan untuk mereka berhasil mengolah lahan dan meningkatkan nilai produk pertanian, dari hulu-hilir harus dikuasai oleh petani milenial dengan dukungan dari Pemda setempat.

Kedua, percepat alur distribusi perdagangan dari desa ke kota. Kuatkan infrastruktur pertanian, berikan jalur "khusus" kepada petani milenial untuk bisa menembus pasar modern dengan cepat. Semakin cepat produk berputar maka uang juga akan didapat, kepercayaan petani milenial akan terus bertambah.

Ketiga, jaga spirit petani milenial dengan kelompok yang kokoh. Buat 1 juta petani milenial. Berikan modal serta ilmu, latih sampai mereka sukses menjadi pengusaha skala nasional. Biarkan mereka tetap di desa menggerakkan Bumdes yang di atas sudah dijadikan pusat ekonomi nasional. Dengan berkelompok spirit akan terjaga, susah senang bisa saling membantu.

Langkah sederhana di atas bisa dilakukan langsung oleh Presiden. Terlalu lama menunggu birokrasi yang berbelit. Presiden atau anaknya bisa menjadi contoh petani sukses.

Jika Presiden saja menjadi petani, maka kebanggaan menjadi petani akan menggema ke seluruh

nusantara. Selamat datang petani milenial sebagai aktor utama pembangunan nasional.

La Nina dan Nasib Petani

Pandemi masih menjadi ancaman serius bagi semua sektor. Bisa jadi gelombang ketiga akan terjadi jika abai terhadap protokol kesehatan. Belum usai Covid-19, kita sudah dihadapkan kepada bencana hidrometeorologi yang di rilis oleh BMKG tentang lahirnya La Nina pada akhir tahun 2021.

La Nina merupakan fenomena alam yang menyebabkan udara terasa lebih dingin atau mengalami curah hujan yang lebih tinggi. La Nina juga merupakan anomali sistem global yang cukup sering terjadi dengan periode ulang berkisar antara dua sampai tujuh tahun.

La Nina di Jawa Tengah diprediksi akan berdampak pada peningkatan intensitas curah hujan kisaran 20-70% di atas normal. Akibatnya, bencana banjir dan longsor akan dominan di sepanjang tahun 2021 akhir sampai 2022.

Kerusakan Hebat

Wajah ganas La Nina sudah membuktikan dirinya. Kasus longsor di Batu Malang memberikan peringatan serius bahwa La Nina menjadi ancaman serius bagi semua lini, bukan hanya sektor infrastruktur. Pertanian menjadi sektor yang terdampak, kerusakan lahan pertanian, target hasil panen terganggu, kerugian ekonomi, bahkan hilangnya nyawa petani. Kerugian karena La Nina bisa

mengakibatkan kerusakan berat bagi sektor pertanian, sehingga perlu antisipasi ketahanan pangan secara nasional.

Kerusakan hebat yang diakibatkan oleh si "gadis kecil" ini harus diantisipasi oleh pemerintah sejak sekarang. Alarm bahaya sudah harus dinyalakan sejak sekarang, tidak menunggu terjadinya korban bahkan kerugian yang melanda petani di perdesaan. Uji coba dan simulasi serta pemetaan dampak La Nina di sektor pertanian mutlak dilakukan agar bisa diantisipasi sejak dini. Misalnya, berapakah lahan pertanian yang terkena dampak? Berapa tonase panen yang akan hilang? Bahkan, perlukah melakukan "impor" pangan jika kondisi kerusakan memang hebat? Sebuah agenda penting mengantisipasi kerusakan hebat akibat ulah "si gadis kecil" yang sedang merajuk karena kondisi alam yang semakin akut.

Ketangguhan Nasib Petani

Bencana Hidrometeorologis berupa La Nina ini akan membuat susah petani dan bisa mengancam cadangan pangan nasional di level terendah, yaitu keluarga, khususnya petani. Akibat pandemi membuat kebutuhan tinggi dan pemasukan berkurang. Jangan lagi karena La Nina kondisi petani akan semakin susah karena gagal panen.

Perlunya antisipasi penanggulangan dari petani dan pemerintah. Kesadaran petani akan pengetahuan terkait La Nina wajib dikuatkan agar bisa mengantisipasi sejak dini. Sosialisasi berbagai rencana penanggulangan harus diberikan kepada kelompok tani. Petani harus menjadi obyek utama terhadap penanggulan dini bencana La Nina ini.

Berikutnya adanya *early warning system* berbasis teknologi yang digunakan untuk pemantauan situasi dan kondisi pergerakan La Nina harus hadir di pusat-pusat pertanian perdesaan. Ancaman utama bagi nasib petani adalah adanya banjir yang bisa merusak panen total. Adanya pantauan *real time* bisa memberikan informasi kondisi cuaca dan potensi curah hujan yang bisa akibatkan banjir.

Terakhir adalah jaminan asuransi untuk hasil panen petani. Asuransi memberikan kenyamanan dan ketenangan petani. Pemerintah perlu menjamin ketersediaan pangan dengan membeli hasil panen petani dan bahkan menjamin akan mengganti hasil panen jika terkena La Nina. Ketangguhan sikap petani yang sudah biasa dengan kondisi apapun harus dikuatkan oleh pemerintah melalui langkah nyata dan produktif.

“

Ketangguhan sikap petani yang sudah biasa dengan kondisi apapun harus dikuatkan oleh pemerintah melalui langkah nyata dan produktif.

”

Membangkitkan Kesejahteraan Petani

Dua tahun pandemi Covid-19 membuat situasi ekonomi nasional masuk jurang resesi karena kontraksi atau minus 5,32% menjadikan pemerintah kebingungan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Hampir semua sektor mengalami kinerja negatif yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Penopang utama pertumbuhan ekonomi kita saat ini adalah konsumsi dalam negeri, artinya rakyat kecil yang 53% hidup di pesisir dan perdesaan menjadi tulang punggung pergerakan ekonomi nasional.

Saat ini sektor makanan dan minuman minus 22,31%. Rakyat daya belinya turun, ekonomi juga turun. Hampir semua sektor tumbuh negatif sangat riskan akan penambahan jumlah penduduk miskin. Sektor keuangan minus 10,32%, transportasi dan pergudangan 29,22%, kesehatan 4,5%, industri 6,49%, perdagangan 6,71%. Bahkan jasa konstruksi yang menopang proyek infrastruktur nasional juga minus 7,37% yang artinya banyak pekerja bangunan yang dirumahkan dan menambah pengangguran. Gambaran di atas membuktikan bahwa ekonomi nasional kita sebenarnya rapuh, bertumpu kepada rakyat kecil seperti petani, nelayan, UMKM, pedagang asongan yang masuk kategori sektor informal.

Saat ini menjelang akhir tahun 2021 kita agak bernapas lega seiring mulai melemahnya kasus Covid-19. Ekonomi dinyatakan tumbuh 7%, wisata dan aktifitas kerja masyarakat mulai tumbuh. Namun, rasanya tumbuh 7% di sektor riil baru mulai bisa bernapas. Melihat kondisi ekonomi nasional, nampaknya tidak ada pilihan lain untuk bisa bangkit. Sektor pertanian menjadi pilar penting yang menyelamatkan ekonomi nasional walaupun catatan seriusnya petani masih belum sejahtera.

Momentum Corona bisa menjadi jalan kokohnya pertanian nasional. Walaupun punya kontribusi positif di tengah pandemi, tapi justru kesejahteraan petani stagnan. Bahkan, petani sepanjang tahun 2020 banyak yang merugi karena produk mereka harganya jatuh. Bawang merah, cabai, sayur-sayuran dan padi dihargai murah, selain karena faktor demand yang menurun juga akibat distribusi yang terhambat karena berbagai pembatasan.

Ujungnya Nilai Tukar Petani (NTP) Juli 2020 pada level 100,09 yang mengalami kenaikan 0,49 persen dibandingkan bulan lalu. Artinya petani masih rugi jika diukur dari produksi dan nilai jualnya. Kekokohan sektor pertanian belum mampu mengangkat kesejahteraan para pelaku utamanya, yaitu petani.

Kekuatan Ril ekonomi

Sektor pertanian dalam arti luas semakin tumbuh diantara 17 sektor ekonomi yang sempat negatif

sepanjang 2020. Kinerja positif 16.24% membuktikan bahwa sektor inilah sebagai penyelamat ekonomi nasional saat ini. Petani dan semua turunan pertanian dalam arti luas bisa memberikan kontribusi positif. Petani sebagai aktor utama yang memproduksi bahan pangan pertama sangat berperan saat ini ditengah pandemi untuk mengurangi potensi kerugian sampai level pedesaan, inilah jasa petani kita.

Pemerintah harus mereset ulang formula menggerakkan ekonomi ditengah pandemi. PDB pertanian tumbuh 16,24 persen pada triwulan-II 2020 (*q to q*) dan bahkan secara *year on year* sektor pertanian tetap berkontribusi positif yakni tumbuh 2,19%. Subsektor tanaman pangan berupa panen yang memberikan kontribusi sebesar 9.3%.

Dari sisi penyerapan angkatan kerja sektor pertanian menjadi andalan. Selama pandemi, pengangguran nasional mengalami kenaikan sebanyak 2,67 juta orang. Banyak di antaranya pulang ke kampung untuk menjadi petani karena tidak menemukan pekerjaan di perkotaan.

Data BPS agustus 2020 mencatat tenaga kerja sektor pertanian yang mengalami kenaikan dari 27,53% pada 2019 menjadi 29,76% pada 2020.

Artinya, kita harus akui bahwa petani dan kerja serta kemiskinan itu selalu beriringan. Berbagai riset pakar dalam dan luar negeri menyebut petani selalu

dalam kondisi terbelakang, miskin, dan ketinggalan teknologi. Petter Timer, Guru Besar Harvard University menyebut revitalisasi pertanian yang dilakukan Indonesia baru kelas retorika.

Pilihan terakhir saat orang putus asa akhirnya memilih jadi petani. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana jika sektor pertanian juga mengalami kontraksi, ekonomi kita bisa kontraksi lebih dalam, serta rawan munculnya krisis sosial karena urusan pangan.

Melihat fakta saat ini, Presiden Jokowi harus mengutamakan sektor pertanian dan kesejahteraan petani sebagai upaya mempertahankan pergerakan ekonomi pedesaan, berikan perhatian khusus sektor pertanian. Karena petani dan sektor pertanian adalah kekuatan riil ekonomi saat ini. Terbukti di tengah pandemi mampu berkontribusi dalam penyelamatan ekonomi.

Setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan pertanian sebagai aktor kebangkitan ekonomi nasional.

Pertama, politik anggaran pertanian berbasis peningkatan nilai produk pertanian. Gunakan anggaran yang "sedikit" untuk membantu produk petani. Anggarkan untuk membeli gabah, sayur, dan buah-buahan saat harga jatuh. Panen adalah titik paling kritis dalam siklus usaha, ketidakpastian harga membuat petani sering merugi. Pemerintah harus ambil peran ini. Politik anggaran pertanian harus terarah dari pusat sampai daerah. Dana

pertanian harus cukup, minimal 5% dari APBN/APBD. Saat ini baru 1-2% secara nasional dan cenderung turun dari tahun ke tahun.

Karena dalam UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa pertanian bukan urusan wajib, namun hanya sekedar pilihan yang membuat seperti anak tiri dalam berbagai kebijakan pembangunan. Jika ingin maju maka ubah UU 23 dengan menjadikan pertanian urusan wajib di Jawa dan Sumatera sebagai basis pangan nasional.

Kedua, serius melakukan regenerasi petani. Saat ini usia petani menurut LIPI diatas 47 tahun, pemuda yang mau bertani hanya 3%, catatan Kementan 2010 - 2013 ada penurunan 5.1 juta rumah tangga petani yang setara dengan 21 juta jiwa. Artinya petani semakin tidak menarik buat pemuda dan rakyat umumnya.

Regenerasi petani wajib saat ini dilakukan dengan anggaran dan kebijakan politik yang betul - betul berpihak kepada petani. Petani adalah soko guru kebangkitan ekonomi nasional, 98% pangan dunia dihasilkan oleh petani kecil. Ancaman kepunahan petani sudah didepan mata, bisa jadi 2060 petani akan lenyap dan pangan akan bergantung kepada impor. Impior menjeri bencana pangan jika tidak dikendalikan. Pencetakan petani milenial harus serius, berikan mereka lahan, modal, dan bimbingan agar sukses menjadi pengusaha sektor pertanian. Ambil dan

ajak lulusan sarjana membangun Indonesia dengan bangga menjadi petani.

Ketiga, jaringan global petani. Era digital menuntut semua berjejaring, pun petani agar sejahtera juga harus kuat kelembagaan dan jejaringnya. Jejaring ini merupakan market yang luar biasa. Dukungan teknologi akan mempercepat bisnis berputar dari desa ke kota dan bahkan mendunia.

Politik anggaran yang pro petani, regenerasi petani secara cepat dengan penguatan jejaring petani akan menghasilkan kerja yang kokoh untuk wujudkan kesejahteraan petani. Kebangkitan pertanian dan sejahteranya petani menjadi kunci kemajuan Indonesia.

Politik Pangan Jokowi Impor?

Semarang - Hari pangan sedunia yang diperingati pada 5 Oktober memang sudah hampir sebulan lewat. Pangan sebagai problem utama rakyat memiliki porsi hampir 70% dalam kehidupan rakyat. Jika pangan terpenuhi maka keluarga akan kuat dan negara berdaulat. Kepemimpinan Jokowi sudah berjalan selama 7 tahun. Namun, faktanya urusan pangan menjadi sumber kegaduhan nasional yang berujung kepada silat lidah para pemangku kepentingan.

Program cetak lahan 1 juta Ha yang ternyata hanya berjalan 50%, tolak impor beras yang ujungnya selama Jokowi beras impor hampir 10 juta ton masuk ke Indonesia, *food estate* yang oleh para pakar diragukan ternyata juga stagnan, belum lagi kemampuan menjaga ketersediaan pangan melalui Bulog yang justru membuat Bulog merugi ratusan miliar. Lalu apa sebenarnya agenda politik pangan Jokowi?

Jargon vs Kebijakan Impor

Memang tidak mudah merealisasikan janji Stop Impor Pangan. Janji ini keren dan menyihir publik seolah berani dan berdaulat. Dua periode berjalan ternyata Jokowi tidak mampu merealisasikan janji ini. Perdagangan pangan global saat ini menuju titik ketimpangan serius, arus barang produk pangan mengalir keras dari negara

maju ke negara berkembang dan miskin dengan tujuan utama "memastikan" kedaulatan pangannya.

Ketergantungan menjadi target mereka, negara maju melihat negara berkembang sebagai market empuk sekaligus mengunci dengan harga pangan yang semakin mahal.

Dikutip dari bisnis.com, indeks Harga Pangan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO Food Price Index/FFPI) pada April bertengger di 120,9 poin atau naik 1,7 persen dibandingkan dengan indeks pada Maret 2021. Indeks ini juga 30,8 persen lebih tinggi dibandingkan dengan April 2020.

Kenaikan pada April juga menjadi indikasi tren harga pangan yang terus merangkak dalam 11 bulan terakhir, sekaligus memecahkan rekor indeks tertinggi sejak Mei 2014.

FAO melaporkan kenaikan pada April disumbang oleh naiknya sejumlah komoditas. Kontribusi kenaikan terbesar berasal dari gula, minyak nabati, daging, produk susu, dan sereal. Dari kelompok komoditas tersebut, sebagian diimpor Indonesia dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Sebagai contoh, Indonesia telah mengimpor 1,19 juta ton gula mentah selama Januari–Februari 2021 dengan nilai US\$471,35 juta untuk memenuhi kebutuhan industri dan konsumsi. Jika dirata-rata, maka harga gula mentah impor berada di kisaran US\$0,39 per kilogram

(kg). Adapun pada periode yang sama tahun lalu, impor gula mentah mencapai US\$239,68 juta dengan volume 699.878 ton dengan harga rata-rata saat itu US\$0,34 per kg.

Kenaikan harga juga tecermin dari importasi biji kedelai yang secara volume naik 10,04 persen dari 403.875 ton pada Januari–Februari 2020 menjadi 444.434 ton pada 2021. Namun dari sisi nilai impor, kenaikan mencapai 36,47 persen dari US\$164,53 juta menjadi US\$224,54 juta pada periode tersebut.

Laporan FAO di atas memberikan gambaran betapa tidak berdayanya Indonesia di tengah serbuan produk pangan impor yang sudah sampai pasar rakyat dan bahkan pasar gelap. Slogan stop impor pangan baru menjadi jargon politik belum menjadi kebijakan politik serius yang ditepati oleh Jokowi. Akhirnya, impor menjadi senjata ampuh untuk memenuhi pangan nasional.

Kondisi ke depan, impor akan semakin meningkat karena lahirnya UU 11 tahun 2020 tentang cipta kerja tidak menjadikan produksi dalam negeri sebagai cara utama memenuhi pangan, tetapi impor akan didahulukan dengan alasan "kondisi tertentu". Bahkan, di tengah pandemi yang petani mampu produksi beras dan bahkan surplus di bulan Mei, rakyat dikejutkan dengan kebijakan impor yang karena tekanan publik akhirnya Jokowi membatalkan. Aneh bin ajaib, bulan Juli ada beras impor masuk 40.000 ton. Ketidakmampuan menahan impor ini

memberikan sinyal bahwa ada kekuatan di balik kebijakan impor yang membuat pangan kita semakin tergantung dengan impor. Apa tidak boleh impor? Boleh saja, hanya pemimpin itu ditagih janjinya karena itu hutang ke rakyat. Harus dibayar dengan kebijakan, bukan dibayar dengan lanjutan impor.

Mampukah kita Berdaulat?

Jawabannya mampu. Produksi nasional beras khususnya selalu surplus kisaran 1-2 juta ton per tahun. Beras cadangan nasional yang disimpan Bulog dengan volume 2 juta ton untuk kebutuhan cadangan jika terjadi paceklik dan gagal panen nasional. Faktanya beras Bulog banyak tidak tersalurkan, bahkan rusak di gudang dan menimbulkan kerugian ratusan miliar. Fakta lain juga tidak ada kebutuhan ekstrim pangan selama 20 tahun terakhir yang mengakibatkan kelaparan rakyat. Lalu jika kondisinya begitu kenapa kita harus impor? Kepentingan rente dan oligarki yang berujung kerusakan politik pangan nasional. Saatnya kita berani menyatakan Indonesia berdaulat pangan.

Tingkatkan serapan produk lokal, benahi tata niaga produk strategis nasional seperti beras, jagung, gula, garam, ikan dengan kebijakan yang menstimulan UMKM serta industri berbasis modal dalam negeri. Kenapa Vietnam mampu terus menjadi sumber impor beras Indonesia? Karena selain produksi berlebih,

pemerintahnya melindungi petani dengan maksimal, alih teknologi semakin maju, petani semakin sejahtera. Nelayan-nelayan cina yang menangkap ikan illegal di Laut Natuna Utara saja dimodali negara dengan kapal dan sistem usaha yang saling menguntungkan. Nelayan Indonesia menangkap ikan malah takut ke keamanan laut karena takut kena pungli. Ironi dan beda kelas dalam berdaulat. Soal berdaulat ini kadang bukan soal produksi semata, namun juga soal politik dan kemauan pemimpin soal kebijakan yang pro kepada nasionalisme bidang pangan. Selama ini kita belum menemukan keberanian dalam kebijakan, baru berani dalam slogan dan pencitraan.

Akhirnya terbang jauh makna kedaulatan, yang mendarat justru impor dan menjadikan Indonesia sawah impor dengan segala kebiasaannya. Jangan mau terjebak definisi berdaulat model FAO yang semata berorientasi kepada *row* material yang justru menjadikan FAO gagal mengatasi kelaparan internasional dengan gagalnya menjaga keseimbangan pangan global. Seolah FAO menikmati orang yang mati di Afrika setiap 4 menit sekali, namun justru diam melihat 300.000 orang kegemukan tiap tahun di Amerika. Jadi, saatnya Indonesia berdaulat. Berani kurangi impor secara signifikan, tegakkan hukum bagi para pemburu rente pangan, pemimpin menjadi contoh bagi pengembangan produk lokal, perkuat kapasitas industri dalam negeri, bergerak bersama dalam

wujudkan daulat pangan nasional. Yakin Indonesia bisa berdaulat. Tahun 1984, kita telah membuktikan.

Petani Kunci Kedaulatan

Pemerintahan Jokowi sudah berjalan selama 7 tahun. Waktu yang cukup untuk membuktikan mampu menjadikan petani sejahtera. Faktanya masih jadi mimpi petani, banyak janji yang belum ditepati. Salah satunya berdirinya Bank Petani dan Nelayan Indonesia sebagai wujud hadirkan kedaulatan pangan yang didahului kesejahteraan petani. Petani sejahtera apa wujudnya? Ukuran NTP sebenarnya sudah tidak relevan. Indeks bayar dan indeks yang diterima petani selalu saja tidak mampu memberikan gambaran serius kondisi ideal petani. Waktunya memasukkan indeks pendidikan anak sebagai tolok ukur kesejahteraan petani.

Petani sejahtera itu punya anak yang kebutuhan pendidikannya terpenuhi dari dasar sampai pendidikan tinggi. Inilah kunci kesejahteraan petani yang harus didorong oleh pemerintah. Petani apa pun kondisinya saat ini mampu bertahan dan "sukses" sebagai juara di tengah pandemi dengan kontribusi positif kepada perekonomian nasional. Jadi, kalau mau negara Indonesia maju maka majukan petani, jadikan sebagai subyek dalam pembangunan nasional. Cetak petani muda, jadikan

mereka wirausahawan nasional yang ini sesuai jati diri sebagai negara agraris. Inilah kuncinya.

“

Kalau mau negara Indonesia maju
maka majukan petani, jadikan sebagai
subyek dalam pembangunan nasional.

Cetak petani muda, jadikan mereka
wirausahawan nasional yang ini sesuai
jati diri sebagai negara agraris. Inilah
kuncinya.

”

Menjawab Ancaman Krisis Pangan

Di tengah hiruk pikuk perombakan kabinet, mungkin kita lupa bahwa tanggal 16 Oktober adalah hari pangan sedunia. Hari di mana masalah pangan menjadi perhatian dunia yang sedang dilanda krisis pangan. Harga pangan dunia menunjukkan tren yang terus naik. Pengaruh iklim yang berujung kepada *global warming* membuat dunia panik dengan ancaman kekurangan pangan dalam waktu 20 tahun ke depan. Negara-negara maju dan berkembang mencari alternatif penyelesaian krisis pangan ini. Negara maju menjadikan subsidi dan proteksi kebijakan impor membuat petani tetap bersemangat menghasilkan pangan untuk negaranya. Negara berkembang termasuk Indonesia sebenarnya petani sudah cukup professional, namun kepemilikan lahan yang minim, tata niaga pasar yang kurang bersahabat, kebijakan impor, minimnya kebijakan yang melindungi petani membuat mereka tidak mampu memproduksi secara menguntungkan. Kasus impor sayur-sayuran dan kentang yang mencuat pekan ini menggambarkan betapa rawannya pangan di negeri ini.

Pada akhirnya banyak di antara mereka yang memilih menjual lahannya dan beralih profesi menjadi tukang ojek. Di sisi lain, yang terjadi adalah penggusuran dan penghapusan sistem-sistem pertanian berbasis masyarakat berskala kecil, terdiversifikasi dan mandiri

digantikan dengan korporasi pertanian monokultur berbasis ekspor. Rencana korporasi BUMN mengelola lahan pertanian ratusan hektar akan semakin mempersulit posisi petani.

Keadaan ini jelas-jelas membahayakan bagi ketahanan pangan. Sebab, diindikasikan akan merusak lingkungan, mengurangi kesuburan tanah, pencemaran, polusi, menghancurkan keanekaragaman hayati, dan pengetahuan masyarakat pedesaan. Lalu bagaimana negara berkembang seperti Indonesia dan negara selatan mengatasi krisis pangan ini? Mampukah kita mengatasi pangan secara mandiri?

Ketahanan Pangan keluarga

Undang-Undang Pangan No. 7 Tahun 1996 mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. FAO (1997) mendefinisikan situasi di mana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, di mana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut.

Secara umum, ketahanan pangan menjadikan setiap orang dan rumah tangga memiliki akses terhadap empat hal pokok sebagai indikator ketahanan pangan

bangsa. Pertama, terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.

Kedua, terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama. Ketiga, terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan pangan yang harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air. Keempat, terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau.

Teori di atas telah menghadapkan kepada kita bahwa ketahanan pangan kuncinya ada di keluarga. Apa artinya kita memiliki stok pangan nasional jika penerima raskin terus meningkat. Keluarga petani sebagai produsen utama pangan banyak yang masuk kategori rawan pangan akut. Pangan yang dihasilkan petani belum mampu dimakan sendiri secara “mandiri”. Namun, walaupun petani masuk keluarga rawan pangan masih mampu berprestasi. Petani dan dunia pertanian telah terbukti

mampu menjadi tulang punggung bangsa saat menghadapi krisis.

Bertahannya sektor pertanian artinya bertahannya produksi yang terus menerus dilakukan oleh petani di pedesaan sebagai aktor utama pembangunan bangsa ini. Kemampuan produksi petani pedesaan telah mengantarkan Indonesia menerima penghargaan FAO pada tahun 2008 sebagai negara yang berswasembada beras. Prestasi luar biasa dalam kurun 34 tahu terakhir setelah 1984 Indonesia swasembada beras. Indeks ketahanan pangan keluarga menjadi kunci keinginan FAO bahwa negara kita adalah negara aman pangan.

Kembali ke Desa

Ketahanan pangan harus kembali ke desa. Desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi mikro sebenarnya adalah indikator utama kesejahteraan nasional. Pembangunan perdesaan dengan penguatan infrastruktur pertanian, perbaikan sarana prasarana perdagangan berupa penguatan pasar tradisional akan menjawab permasalahan kemiskinan nasional. Penduduk miskin nasional 63% atau sekitar hampir 35 juta jiwa ada di pedesaan. Desa sebagai pusat pengentasan kemiskinan dapat menjawab krisis pangan melalui kebijakan pusat yang berbasis potensi lokal.

Kebijakan-kebijakan tersebut, yaitu: Pertama, pembatasan impor produk pertanian secara bertahap. Artinya bangsa kita harus mencintai produk pertanian sendiri walaupun “rasanya” belum semanis produk luar negeri. Kita harus menunjukkan identitas bahwa bangsa kita memiliki kemampuan untuk memenuhi pangan dengan produk sendiri. Kedua, membangun infrastruktur pertanian ditingkat desa secara massif berkaitan dengan jalan usaha tani dan jalan niaga tani sebagai syarat pertumbuhan perdagangan. Baiknya sarana transportasi akan membuat biaya semakin murah. Ketiga, perlindungan harga produk pertanian dengan memberikan subsidi harga. Dengan subsidi petani akan tetap menikmati harga mahal walaupun dipasar harga mulai turun. Konsep subsidi bisa diujicobakan dengan pemberian insentif bagi usaha pertanian desa yang berorientasi industri kecil dan menengah. Keempat, diversifikasi pangan melalui lumbung pangan nasional. Budaya makan non beras harus terus ditumbuhkan, kampanye *one day no rice* gemanya harus terus dilakukan oleh pusat sampai dengan daerah. Lumbung pangan nasional akan melahirkan rumah pangan lestari yang merupakan gabungan solusi pertama sampai keempat. Kembalilah kepada potensi alam sekitar yang akan memberikan terbaik bagi manusia selama dia mau menjaganya.

“

Bangsa kita harus mencintai produk pertanian sendiri walaupun “rasanya” belum semanis produk luar negeri. Kita harus menunjukkan identitas bahwa bangsa kita memiliki kemampuan untuk memenuhi pangan dengan produk sendiri.

”

Antraks dan Budaya Makan Ikan

Antraks yang terjadi di Sragen, Boyolali, dan sekitarnya telah meresahkan masyarakat dan pemerintah, bahkan terindikasi sudah menular kepada manusia sehingga serangan antraks ini dikategorikan sebagai kejadian luar biasa. Namun, di balik kejadian ini ada hikmah positif yang bisa diambil oleh pemerintah, khususnya Jawa Tengah untuk mendorong kenaikan permintaan ikan. Jawa Tengah memiliki potensi ikan tahun 2009 sebesar 341 ribu ton dengan konsumsi ikan yang masih rendah sekitar sebanyak 16,21 kg per kapita per tahun kalah dengan Maluku yang sudah dengan Norwegia, yaitu 51 kg per kapita per tahun. Padahal, FAO menetapkan konsumsi ikan minimal 30 kg per kapita per tahun. Ini berarti masyarakat Jawa Tengah masih jauh tertinggal dalam hal konsumsi ikan. Adanya antraks ini membuat pemerintah memiliki kesempatan yang besar untuk mendorong konsumsi ikan dan mengurangi konsumsi daging untuk memberikan kesempatan pertumbuhan ternak juga terpenuhi dalam rangka swasembada daging 2014. Mengapa konsumsi ikan perlu ditingkatkan?

Setidaknya ada tiga manfaat mengkonsumsi ikan. Pertama, faktor kesehatan. Bahwa terbukti konsumsi ikan dapat mengurangi resiko kejadian penyakit jantung serta penyakit degeneratif lain seperti masyarakat Eskimo dan

Jepang. Kelebihan lain, ikan segar sangat kaya nutrisi. Karena rendah kalori, ikan juga cocok dikonsumsi Anda yang sedang ingin mengurangi lemak hewani dan diet menurunkan berat badan. Menurut Arif Satria (2009), meski memiliki kandungan gizi dan protein relatif sama, daging ikan dianggap lebih baik karena mengandung Omega 3 dan Omega 6. Omega 3 dan Omega 6 termasuk asam lemak tak jenuh jamak esensial yang berguna untuk memperkuat daya tahan otot jantung, meningkatkan kecerdasan otak jika diberikan sejak dini, melenturkan pembuluh darah, serta dapat menurunkan kadar trigliserida, mencegah penggumpalan darah, dan mencegah munculnya berbagai jenis kanker. Wanita yang banyak mengonsumsi ikan saat hamil akan memperbaiki syaraf dan mental dibanding yang tidak mengonsumsi.

Kedua, faktor ekonomi, yakni meningkatnya permintaan terhadap produk ikan. Kenaikan konsumsi ikan akan menggairahkan usaha perikanan. Masyarakat akan terinspirasi mengembangkan budaya perikanan darat yang lebih mudah dan secara ekonomis sangat menguntungkan. Efek lain usaha ini akan banyak menyerap tenaga kerja yang akan megerakkan ekonomi perdesaan. Ini sesuai dengan target nasional bahwa tahun 2015 Indonesia akan menjadi negara produsen ikan terbesar dunia.

Ketiga, faktor jati diri bangsa. Kejayaan bangsa zaman dulu dengan sejarah kemaritimannya telah memberikan gambaran bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa maritim yang kaya akan ikan sehingga konsumsi ikan merupakan ciri budaya dan kultur yang sudah melekat kuat di bangsa ini. Akan tetapi, pertanyaannya adalah mengapa tingkat konsumsi ikan kita masih rendah dan bagaimana upaya peningkatannya?

Kesalahan Mainstream Konsumsi Ikan

Mengutip dari direktorat Jenderal Pemasaran dan Pengolahan hasil perikanan, menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat konsumsi ikan di Indonesia. Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat protein ikan bagi kesehatan dan kecerdasan. Faktor ini menjadikan masyarakat lebih memilih daging daripada ikan dengan asumsi bahwa daging adalah makanan orang “berkelas” dibanding ikan. Sosialisasi yang kurang tentang informasi gizi ikan membuat paradig ini berkembang dikalangan masyarakat pesisir.

Kedua, rendahnya suplai ikan, khususnya ke daerah-daerah pedalaman akibat kurang lancarnya distribusi pemasaran ikan. Sarana dan infrastruktur daerah penghasil ikan yang jelek mengakibatkan keengganan penjual ikan untuk membawa ke daerah pedalaman yang secara *demand* juga tidak terlalu banyak.

Nilai bisnisnya menjadi rendah jika harus banyak kehilangan *cost* untuk membawa menuju daerah pedalaman (*up land*).

Ketiga, belum berkembangnya teknologi pengolahan/pengawetan ikan sebagai bentuk keanekaragaman dalam memenuhi tuntutan selera konsumen. Pengolahan ikan yang dilakukan oleh ibu-ibu nelayan dan masyarakat pesisir belum banyak tersentuh oleh faktor teknologi modern. Teknologi sederhana berbasis ilmu turun-temurun menjadikan kualitas olahan kita menjadi tidak menarik secara penampilan dan rendah dalam kualitas.

Keempat, pola pikir atau mainstream pola konsumsi pangan global. Menjamurnya produk makanan instan seperti McDonal's, KFC, Quick Chiken telah menggeser pola konsumsi ikan yang berada di kalangan menengah ke atas. Bahkan, masyarakat awam pun merasa lebih senang makan di KFC atau McDonal's daripada makan di warung *sea food* pinggir laut milik nelayan dan pedagang kecil yang secara gizi lebih bagus. Pengaruh globalisasi pangan membuat ikan bukan pilihan utama untuk makan.

Agenda ke Depan

Melihat rendahnya konsumsi ikan di atas, ada beberapa agenda yang bisa dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menjadikan ikan sebagai

menu utama dalam pola konsumsi pangan keluarga. Pertama, pemerintah melalui gerakan gemar makan ikan menjadikan program lokal yang dimasukkan dalam muatan lokal di sekolah TK sampai SMA. Kampanye *Fish For School* tiada henti oleh pemerintah akan memberikan efek kuat bagi masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan untuk kemajuan bangsa. Selain itu, pemerintah bisa memperbanyak cluster kampung–kampung ikan, seperti kampung lele, kampung gurami, kampung mujahir berbasis kabupaten/kota yang memiliki potensi perikanan besar. Kedua, masyarakat melakukan penguatan usaha perikanan berbasis keluarga. Program *satu keluarga satu kolam ikan* akan membuat meningkatkan konsumsi ikan secara signifikan, kolam yang bisa berbentuk terpal dan drum menjadi alternatif keluarga yang tidak memiliki lahan untuk membuat kolam. Ketiga, peran swasta dalam menggerakkan ekonomi perikanan bisa dilakukan dengan menanamkan investasi untuk membantu modernisasi *home industri* perikanan menuju industri yang memiliki daya saing yang kuat. Kuatnya Jepang dalam konsumsi ikan tidak terlepas peran swasta yang sangat kuat mendukung nelayan dalam permodalan dalam mengolah ikan menjadi produk unggulan yang bernilai ekonomis tinggi. Ketiga syarat di atas bisa dilakukan oleh bangsa kita, sekarang waktunya ikan menjadi primadona bangsa ini.

“

Kejayaan bangsa zaman dulu dengan sejarah kemaritimannya telah memberikan gambaran bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa maritim yang kaya akan ikan sehingga konsumsi ikan merupakan merupakan ciri budaya dan kultur yang sudah melekat kuat di bangsa ini.

”

Sawit dan Dialog Peradaban

Kasus penolakan CPO Indonesia oleh AS dengan alasan isu lingkungan membuat SBY berang. Indonesia di beri waktu sampai 27 Maret untuk menjelaskan kepada AS mengenai produk CPO yang ditolak oleh mereka. Ini menjadi masalah serius karena sawit selain primadona perkebunan nasional juga menyangkut hajat hidup petani pekebun sawit. Selain masalah ekonomi, ada masalah yang lebih besar mengenai perkebunan sawit. Perkebunan sawit besar (PSB) masalah serius mengenai sejarah dan peradaban bagi petani dan masyarakat sekitar. Inilah sisi penting yang lain dalam kasus perkebunan sawit, termasuk isu lingkungan dan kemanusiaan.

PSB sejak dulu bersifat kolonial dan selalu menindas. Itulah warisan awal keberadaan perkebunan sawit dibuat oleh Belanda. Tepatnya 140 tahun sebelum Indonesia merdeka, keberadaan perkebunan sawit sudah dibuat oleh penjajah Belanda. Keberadaan perkebunan sawit saat itu untuk kepentingan penjajah semata, bukan masyarakat lokal. Perguliran perkembangan sawit saat ini cukup mengiurkan, bahkan menjadi primadona usaha agribisnis korporasi–korporasi besar nasional.

Gudang Garam, Bakrie Group, Wilmar Group, dan perusahaan asing dari AS, Malaysia, Cina, semua berpacu membuat perkebunan sawit. Efeknya mengesankan, lahan semakin berkurang, rakyat lokal menjerit karena merasa

di gusur hak tanah dan hak adatnya seiring meluasnya perkebunan sawit. Kasus terbaru soal kerusakan di Mesuji berupa pembakaran kantor PT BSMI serta kasus pembantaian orang hutan di Kaltim semakin menjelaskan bahwa sawit juga mengancam hewan dilindungi serta lingkungan.

Kasus penolakan CPO dan berbagai konflik perkebunan semakin membuat kita bertanya-tanya? Bagaimana nasib peradaban lokal dan nasib petani dan pekebun 100 tahun ke depan? Masihkah mereka memiliki tempat tinggal dan peradaban? atau Kalimantan, Sumatera yang terkenal penghasil sawit akan menjadi peradaban kapitalis liberal yang menggusur masyarakatnya? Serta membunuh petani-petani kecil yang dalam bahasa Maxrian sebagai kaum lemah yang harus memperjuangkan dirinya dengan revolusi?

Perkebunan adalah sebuah ide, gagasan, dan dialog antara manusia dan lingkungan atas karunia sumber daya alam sebagai sarana untuk memakmurkan bumi. Inilah kita mengatakan bahwa perkebunan bukan sekedar komoditi atau produk yang bernilai ekonomis, namun lebih dari itu perkebunan sebagai sarana menciptakan keberlanjutan kelestarian antara manusia dan alam. Di sinilah pentingnya kita harus peduli terhadap permasalahan perkebunan, khususnya sawit yang saat ini Indonesia menjadi penghasil CPO terbesar dunia.

Sawit dan Pemberdayaan

Dari data Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, tampak total perkebunan kelapa sawit rakyat hingga akhir 2010 mencapai 3,8 juta hektar atau 47,65 persen dari total luas lahan perkebunan kelapa sawit nasional 7,976 juta hektar. Dan sebagian lagi merupakan perkebunan kelapa sawit swasta 3,5 juta hektar dan perkebunan negara yang dikelola PT Perusahaan Perkebunan Nusantara 676 ribu hektar. Sawit Watch merilis data potensi produksi dalam negeri CPO sebesar 21 juta dengan kegunaan untuk biodiesel sebanyak 10-12 juta Ha. Produktifitas sebanyak 3.37 ton CPO/Ha. Perluasan perkebunan sawit sangat cepat, izin lokasi sampai 2010 sudah mencapai 26,7 juta ha dengan target CPO 2020 sebesar 40 juta ton.

Inilah luar biasanya potensi sawit Indonesia yang sangat menggiurkan. Namun, besarnya potensi ini belum mampu mensejahterakan petani pemilik lahan sawit yang oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan mengatur beberapa hal pokok. Khususnya pasal 11 yang menyatakan Perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Serta pemberdayaan melalui

program kemitraan yang bertujuan penguatan kelembagaan petani/pekebun serta kemandirian ekonomi.

Pemberdayaan masih sebatas wacana, banyak PBS (perusahaan besar sawit) menolak permentan ini. Di Kalteng ada sebuah perusahaan sawit memiliki 50.000 Ha lahan yang menolak permentan ini. Kondisi ini juga diakui oleh GAPKI, bahwa hanya sekitar 10% perusahaan yang baru melaksanakan permentan ini. Kantong kemiskinan pekebun yang berada dipinggiran hutan tidak mampu mengakses lahan sawit sebesar 20% karena minimnya pemberdayaan secara ekonomi oleh perusahaan.

Konflik perkebunan dan masyarakat sampai 2010 sudah terjadi sebanyak 660 kali tanpa penyelesaian yang jelas. Agus Pakpahan, peneliti Litbang Deptan, menyatakan ada hampir 550 konflik di daerah perkebunan nasional membuat ruh permentan soal pemberdayaan hilang. Penyebabnya adalah pemaksaan dan pemerdayaan masyarakat oleh PBS. Masyarakat adat Dayak di Kalteng juga merasa terpinggirkan karena keberadaan perkebunan sawit besar yang melanggar permentan ini di lapangan.

Perlu titik temu antara potensi luar biasa sawit dengan pembangunan kebudayaan yang menghasilkan peradaban manusiawi bagi masyarakat. Samuel Hutington, penulis buku "Benturan Dialog Peradaban", menyatakan bahwa peradaban sebagai hasil konklusi atas norma-norma dan kebudayaan suatu massa yang

menghasilkan nilai bagi kepentingan bersama. Inilah pentingnya pemberdayaan untuk menghasilkan nilai-nilai bagi masyarakat.

Menuju Dialog Peradaban

Saat ini ada sekitar 40.000–50.000 anak – anak bekerja di perkebunan sawit Malaysia (Sawit Watch, 2010). Ini ancaman serius punahnya peradaban anak manusia. Mereka dieksploitasi oleh perkebunan sawit untuk bekerja bersama orang tua mereka yang menjadi buruh pabrik kelapa sawit. Rasanya sulit membangun dialog peradaban dalam konteks mewujudkan nilai kebaikan dan kesejahteraan bagi pekebun khususnya dan bagi alam sebagai amanah Tuhan kepada manusia. Namun, setidaknya kita perlu merintis agar nasib anak cucu kita 100 tahun ke depan masih bisa berlanjut. Keberadaan orang hutan dan kelestarian lingkungan sebagai syarat adanya peradaban akan tetap lestari.

Pertama, peradaban diawali oleh adanya ide dan gagasan untuk melakukan perubahan sosial, kaum Helegian dan Weberian yakin bahwa perubahan kesejahteraan masyarakat kecil atau tertindas dimulai oleh ide bahwa adanya perusahaan sawit bukan semata untuk tujuan kapitalisme atau kolonialisme yang sudah “mati” ratusan tahun dari negeri ini. Pengusaha sawit harus mau berbagi dengan masyarakat, lingkungan, serta alam. Ide ini harus dimiliki oleh PBS.

Kedua, bahwa pandangan pengusaha tentang penguasaan lahan dan alat-alat produksi sebagai cara menuju perubahan sosial masyarakat yang akan melahirkan peradaban modern terbantahkan. Justru pandangan inilah yang menghancurkan peradaban barat Rusia berhaluan komunis sehingga Rusia terbelah menjadi lahan konflik sepanjang sejarah. Petani dan lahan mereka bukan robot yang bisa dieksploitasi sedemikian rupa. Keberadaan mereka sudah lebih dulu ada sebelum kebun sawit dibangun melalui izin kepada pemerintah. Sudah puluhan atau ratusan tahun petani dan masyarakat adat tinggal nyaman bersama alam mereka.

Terakhir, mewujudkan peradaban dalam pandangan kearifan lokal adalah menjadikan keberadaan kebun sawit 100% milik rakyat. Pengalaman ratusan tahun adanya kebun sawit industri negeri ini juga tidak ada yang maju. CPO diekspor ke luar negeri dengan harga murah. Keuntungan semata milik pengusaha. Saatnya rakyat mengurus 100% lahan sawitnya bersama perusahaan sebagai mitra sejajar mengurus industrinya, petani mampu dan akan bisa membangun peradaban secara nyaman tanpa perlu konflik berkepanjangan.

Ini bisa dilakukan asalkan ada kemauan dan kebijakan politik yang memihak petani, alam, dan lingkungan untuk menghindari hilangnya peradaban masyarakat lokal. Kasus Mesuji menguji ketaatan hukum

negara dan kesadaran pengusaha untuk membangun peradaban masa depan, kapitalisme akan selalu membawa korban.

“

Saatnya rakyat mengurus 100% lahan sawitnya bersama perusahaan sebagai mitra sejajar mengurus industrinya, petani mampu dan akan bisa membangun peradaban secara nyaman tanpa perlu konflik berkepanjangan.

”

Kenaikan PPN Meningkatkan Harga, Menambah Petani, Peternak dan Nelayan Miskin

Semarang - Pengesahan UU perpajakan yang baru saja dilakukan oleh pemerintah dan DPR membawa kabar buruk bagi rakyat rentan miskin. Petani dan nelayan, rakyat di pantai dan desa akan semakin banyak yang masuk kategori dari rentan miskin menjadi miskin. Kebijakan yang tidak adil kepada rakyat disaat kondisi pandemi belum pulih.

"Pengesahan kenaikan PPN 11% di tahun 2022 dan 12 di tahun 2024 akan memicu kenaikan harga dan tentu rakyat kecil, petani, nelayan peternak akan menjadi paling terdepan kena dampaknya," papar Riyono, Ketua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan.

Bukan hanya PPN yang dikenakan kepada rakyat, waktu bersamaan Presiden juga mengesahkan adanya PP 85 tahun 2021 tentang PNBK sektor kelautan perikanan yang juga menyasar nelayan kecil dengan kapal 5 GT yang dikenakan 5%, jadi sebagai rakyat biasa nelayan akan kena PPN 11% jika berbelanja dan 5% hasil tangkapan mereka. Total kena pajak mereka 16%, akan semakin susah mereka bangkit dari kondisi pandemi. Belum harga pakan para peternak, kenaikan PPN 11% akan membuat produsen pakan menaikkan harga pakan bisa sampai 5%.

Benar-benar menjadi bencana bagi sektor perikanan pertanian peternakan.

"Kenaikan pungutan pajak ini bertentangan dengan spirit ekonomi Pancasila yang bercorak kerakyatan dan keadilan. Harusnya pemerintah memberikan insentif bagi petani, nelayan, dan peternak agar usaha mereka maju. Ini justru disinsentif yang bisa membuat mereka tambah miskin. Kenaikan pajak membuat daya beli semakin turun dan mengancam pertumbuhan ekonomi nasional," tambah Riyono.

Data BPS 2018 menyebutkan nelayan miskin antara 20-40% yang terkonfirmasi data BPS 2020 terjadi penambahan orang miskin di pedesaan pada September 2019 sebesar 12,60 persen, naik menjadi 12,82 persen pada Maret 2020. Para petani dan nelayan di pesisir semakin miskin. BPS 2020 mencatat peningkatan penduduk miskin pada September 2020 sebagian besar terjadi di pedesaan sebesar 13,20 persen. Sementara untuk posisi perkotaan hanya sebesar 7,88 persen.

"Negara membuat miskin rakyatnya dengan menaikkan pajak. Petani, nelayan, dan peternak akan semakin susah. Kenaikan orang miskin 13,20 persen harusnya menyadarkan pemerintah bahwa kebijakannya salah. Kenapa terus dilakukan? Makanya PKS jelas menolak UU perpajakan ini, bukan menambah sejahtera, justru menambah miskin rakyatnya," tutup Riyono.

Pak Jokowi, Harga Garam Rakyat 200/kg, Gak Ada Efek pertumbuhan 7%

Semarang - Kondisi petani garam saat ini cukup terpukul. Sudah 3 tahun ini harga tidak menguntungkan mereka. Serbuan garam impor yang harusnya masuk ke industri kadang rembes sampai pasar rakyat. Merebut pasar dan konsumen garam rakyat yang harusnya bisa bertahan hidup.

"Garam rakyat saat ini harganya di tengah tambak garam hanya dihargai 200 perak per kilogram. Harga di pinggir jalan dalam kemasan hanya 400 perak per kilogram. Petambak garam rugi dan menahan garamnya di gudang sudah 3 tahun lalu," kata Riyono, Ketua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan.

Saat ini kebutuhan garam industri 1 juta ton per tahun. Sekarang garam hancur, hanya 200 - 500 rupiah/kg, padahal ongkos produksi 750 rupiah. Petani sudah rugi 200-400 rupiah dan semakin terpuruk oleh garam impor yang rembes ke pasar atau konsumen.

Dari sisi kemampuan lahan produksi garam juga belum signifikan., Ada 49 titik dari 9 provinsi sentra garam mulai dari Jawa, Sulawesi, sampai NTT yang luasan lahan sekitar 21.348 hektar dengan kapasitas produksi garam 60 - 80 ton/Ha. Kita membutuhkan lahan minimal 37.000 Ha dengan produksi 80 ton/Ha.

Saat melakukan kunjungan dan bertemu petambak garam di Demak dan Jepara, Riyono mendapatkan informasi akan susahny nasib petambak garam. Selain harga yang selalu jatuh, petambak garam mengeluhkan pemasaran. Garam banyak tapi tidak ada yang mau membeli.

"Negara harus peduli kepada petani garam. Janjinya 2017 swasembada. Faktanya impor yang merajalela. 2019, Pak Luhut janji kembali tidak akan impor, tapi 1,5 juta ton garam dari Australia masuk ke Indonesia. Petani garam sudah susah, jangan ditambah susah lagi," tutup Riyono.

Pak Presiden, Anggaran untuk Petani dan Nelayan Jangan di Potong.

Jakarta (15/07) — Di tengah kondisi keuangan negara yang berat, nampaknya pemerintah hilang kompas dalam mengelola negara. Bingung memilih sektor mana yang berfungsi sebagai "gas" dan "rem" bagi pertumbuhan ekonomi rakyat.

Kabar bahwa KKP akan melakukan refocusing benar adanya. Kementerian Keuangan telah mengusulkan untuk melakukan pengurangan anggaran KKP sebesar 1,4 triliun dan Kementan sebesar 1,9 triliun .

"Pak Presiden Jokowi, tahun 2020 petani dan nelayan telah menyelamatkan negara dengan kontribusi positif sektor pertanian dan perikanan. Data BPS tahun 2020 sektor pertanian dan perikanan tumbuh 1,75 persen dibandingkan sektor pertambangan minus 1,95 persen, industri pengolahan minus 2,93 persen, konstruksi minus 3,26 persen, perdagangan dan reparasi minus 3,72 persen," papar Riyono, Ketua Bidang Petani dan Nelayan DPP PKS.

Harusnya sektor pertanian dan perikanan yang menghidupi petani dan nelayan sebagai bagian rakyat yang miskin dan rentan kemiskinan ditambah karena bagus kontribusinya.

Memurut Riyono, pemerintah harus mereset ulang formula menggerakkan ekonomi ditengah pandemi. PDB pertanian tumbuh 16,24 persen pada triwulan-II 2020 (*q to q*) dan bahkan secara *yOy*, sektor pertanian tetap berkontribusi positif yakni tumbuh 2,19 persen.

Subsektor tanaman pangan berupa panen yang memberikan kontribusi sebesar 9.3 persen. Ini fakta bahwa petani kecil dan tradisional memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi negara di tengah pandemi.

Sebab sektor yang telah menyumbang 14,2 persen struktur PDB nasional dengan nilai Rp2.115 triliun mengalami pemotongan anggaran yang cukup besar.

"Kenapa Kemenku seolah tidak mempertimbangkan realitas ini? Kalau sektor yang positif saja dipotong trus pertumbuhan ekonomi dari mana akan bergerak?" tanya Riyono.

Di tahun 2021, kementerian pertanian juga sudah mengalami pengurangan anggaran pada tahun sebesar Rp 6,3 triliun, dari semula Rp 21,8 triliun di tahun 2020 menjadi Rp 15,5 Triliun.

"Kondisi pandemi saat ini harusnya Presiden memberikan arah kebijakan yang jelas dan tepat. Sektor pertanian dan perikanan pilihan yang bisa diandalkan. PKS meminta agar anggaran KKP dan Kementan jangan di potong. Itu uang untuk petani dan nelayan," tutup Riyono.

Pak Jokowi, Petani Muda Hanya 8% bukan 29%.

Semarang - Keterangan dan harapan Jokowi bahwa pemerintah akan mendukung regenerasi petani masih sebatas janji. Kondisi faktual yang dirilis oleh Badan Penyuluhan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian mencatat petani muda di Indonesia yang berusia 20-39 tahun hanya berjumlah 2,7 juta orang.

"Hanya sekitar 8 persen dari total petani kita 33,4 juta orang. Sisanya lebih dari 90 persen masuk petani kolonial, atau petani yang sudah tua," paper Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi, pada acara Pengukuhan Duta Petani Milenial (DPM) dan Duta Petani Andalan (DPA) di Jakarta, Senin, 13 April 2020.

"Kutipan berita di atas membantah apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa petani muda 29 persen. Dari mana Pak Presiden mendapatkan data itu? Masa iya dalam setahun petani muda bertambah 21 persen?" tanya Riyono, Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan

Sebelumnya, Jokowi meresmikan duta petani milenial sebanyak 2000 orang. Ini langkah bagus sebenarnya untuk melakukan regenerasi petani yang sudah nyaris punah. Namun, jangan sampai salah langkah

dan salah data yang akhirnya membuat program tidak berjalan.

"Janji Jokowi untuk mendorong agar pemuda menjadi petani harus ditunaikan. Berikan jaminan kerjaan untuk sarjana pertanian dan buat modernisasi pertanian berbasis produk ekspor. Pasti pemuda akan tertarik," papar Riyono.

Usia petani menurut LIPI saat ini di atas 47 tahun, pemuda yang mau bertani hanya 3 persen, Catatan Kementan 2010-2013 ada penurunan 5,1 juta rumah tangga petani yang setara dengan 21 juta jiwa. Artinya, petani semakin tidak menarik untuk pemuda dan rakyat umumnya.

"Salah satu penyebab pemuda malas bertani karena kebijakan impor pangan yang merajalela. Janji stop impor pangan ternyata hanya alat kampanye. Ini membuat petani akan cepat hilang dan membuat ketergantungan kepada impor semakin tinggi," tambah Riyono

Regenerasi petani wajib saat ini dilakukan dengan anggaran dan kebijakan politik yang betul-betul berpihal kepada petani. "Petani adalah soko guru kebangkitan ekonomi nasional. 98 persen pangan dunia dihasilkan oleh petani kecil. Pak Jokowi jangan hanya janji mengenai kebijakan pangan yang sering merugikan petani," tutup Riyono.

Indonesia Bisa Rugi 115 T karena Perubahan Iklim, Petani Akan Semakin Susah.

Semarang - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan kerugian ekonomi akibat perubahan iklim bisa mencapai Rp115 triliun pada 2024. Pemerintah harus terus itu mendorong adanya pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

"PKS terus mengingatkan pemerintah agar semua pembangunan harus ramah lingkungan, berbagai aktifitas pembangunan yang merusak lingkungan sudah nyata dampaknya terutama kepada sektor pertanian," papar Riyono, Ketua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan.

Menurut Riyono, dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan dengan turunnya produktivitas dan luas panen. Turunnya produktivitas diakibatkan maraknya hama pengganggu tanaman yang mengakibatkan gagal panen. Dampak perubahan iklim terhadap pertanian bersifat langsung dan tidak langsung dan aspek biofisika maupun sosial ekonomi. Perhatian terbesar dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian adalah munculnya kekhawatiran akan kestabilan bahan pangan.

Catatan berbagai riset menyebutkan bahwa perubahan iklim akan menyebabkan kekeringan,

penurunan air tanah, peningkatan suhu (pemanasan global), banjir, kekurangan kesuburan tanah, perubahan cuaca, dan lain-lain yang beresiko gagal panen dan kelaparan. Contohnya pada saat terjadi El Nino pada tahun 1997 yang merusak 426.000 hektar sawah

"Kerugian 115 triliun itu menjadi ancaman serius terhadap sektor pertanian dan masyarakat pesisir. Pemerintah harus bersiap kenaikan harga pangan. PKS mendorong agar pemerintah mengantisipasi sejak dini demi menyelamatkan petani," tutup Riyono.

PPN 12%, Impor Pangan Semakin Menggila, Produk Dalam negeri semakin Lemah

Semarang - rencana pengenaan tarif PPN 12% bagi hampir 100% produk pertanian dan peternakan sangat mengganggu sektor pertanian secara luas. Kinerja positif di tengah pandemi dan menjadi pendorong pergerakan ekonomi rakyat kecil akan melemah, bahkan bisa negatif.

"Pemerintah harusnya sadar bahwa ekonomi kita saat ini hampir 50 persen didukung oleh konsumsi rakyat kecil yang hidup di pedesaan dan pesisir. Saat ini kondisi daya beli menurun, beban mereka sangat berat," papar Riyono, Ketua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan

Kebijakan pengenaan PPN 12% bagi kebutuhan pangan akan berdampak menyakiti perasaan 33,4 juta rumah tani petani juga akan merusak spirit anak-anak petani untuk enggan bertani. Saat ini ada 2,7 juta petani muda usia 20-30 tahun yang harusnya bisa menjadi regenerasi petani tua yang usianya sudah di atas 50 tahun. Kebutuhan pangan nasional 80% diproduksi oleh petani kecil, FAO menyebutkan 90% stok pangan global juga diproduksi oleh petani, namun kondisi petani tetap miskin.

"Saat ini Indonesia krisis petani muda. Lalu, kalau mau jadi petani dan berproduksi dikenai pajak yang tinggi

maka sebenarnya di balik PPN 12% ada pesta para importir yang mengambil untung besar - besaran," tambah Riyono.

Impor gula periode 2015 hingga 2018 mencapai total 17,2 juta ton atau lebih tinggi 4,5 juta ton dibandingkan periode 2010-2015 yang mencapai 12,7 juta ton.

"Jika gula saja dalam 3 tahun naik 4,5 juta ton, maka jika gula dalam negeri produksi petani dikenai PPN 12% maka akan semakin sedikit produksi dalam negeri karena petani enggan berproduksi tebu. Maka solusinya kembali ke impor atas nama stabilisasi harga," terang Riyono.

Dampak pengenaan PPN 12% bagi hampir 100% produk petani akan semakin luas bagi ekonomi rakyat kecil. Pertama, produk petani asli akan semakin menurun jumlahnya karena lebih mudah impor. Kedua, ancaman hilangnya regenerasi petani yang merupakan bahaya besar kedaulatan pangan nasional, semakin tidak kompetitif harga produk pertanian karena minim perlindungan. Ketiga, Indonesia akan terus bergantung kepada produk luar dengan impor.

"Impor akan semakin deras masuk ke Indonesia. Produk petani akan semakin melemah dan akhirnya PPN 12% menjadi mesin pembunuh ekonomi rakyat kecil," tutup Riyono.

Sisa 1.7 Juta Beras Impor tahun 2018, Masih mau Impor 2021?

Jakarta - Carut marutnya kebijakan pangan nasional, khususnya beras, semakin terbuka di publik. Pengakuan Buwas dalam RDP bersama DPR pada Senin, 15/3/2021, bahwa dari impor 2018 sebanyak 1.785.450 beras sampai sekarang masih tersisa 275.811 ton beras yang belum tersalurkan. Dari jumlah tersebut, 106.642 ton di antaranya merupakan beras turun mutu.

"PKS apresiasi informasi Bulog yang penting ini, ternyata sisa beras impor 2018 masih ada. Lalu Presiden membuat kebijakan impor 1 juta ton untuk apa? Cadangan maret 2020 masih ada 900 ribu ton. Prediski panen 2021 juga ada sisa stok 1 juta ton lebih. Sekali lagi, impor ini untuk siapa?" tanya Riyono, Ketua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan

Kebijakan impor ini akan dilakukan di tengah kondisi sektor pertanian yang berkinerja bagus. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor sektor pertanian pada periode Januari dan Februari 2021 mengalami pertumbuhan positif, yakni sebesar US\$ 0,65 miliar atau 8,81% (*yoy*). Lalu, khusus bulan Februari 2021, nilai ini tumbuh di angka 3,16% (*yoy*).

Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat produksi padi mencapai 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG)

pada 2020, naik tipis 0,08 persen atau 45.170 ton dari produksi pada 2019 yang sebesar 54,60 juta ton.

Jika dikonversikan menjadi beras, maka sepanjang 2020 produksi beras mencapai 31,33 juta ton. Realisasi ini naik tipis 0,07 persen atau 21.460 ton dari produksi beras di 2019 yang sebesar 31,31 juta ton.

Peningkatan produksi akan bisa naik di 2021. BPS mencatat potensi produksi padi dalam negeri selama Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 25,37 juta ton gabah kering giling (GKG).

Angka potensi ini 26,88% atau 5,37 juta ton dibandingkan produksi padi di periode yang sama tahun 2020 yang sebesar 19,99 juta ton GKG.

Bila dikonversikan, maka selama Januari-April 2021 potensi produksi beras mencapai 14,54 juta ton, naik 3,08 juta ton atau 26,84 persen dari periode yang sama di 2020 yang sebesar 11,46 juta ton.

Ada pun pada Januari 2021 produksi padi sudah terealisasi sebanyak 2,06 juta ton GKG, serta realisasi produksi beras sebanyak 1,18 juta ton

"Masih ada surplus beras petani di 2020 dan proyeksi 2021. Ini prestasi petani yang harus dihargai pemerintah. Seharusnya diberi kado bagus dengan menjaga HPP agar stabil dan jika perlu dinaikkan. Petani dan sektor pertanian saat pandemi menjadi penyelamat ekonomi nasional. Lalu apa penghargaan pemerintah ke petani? Impor beras? Sangat menyakitkan," tutup Riyono.

Petani, Akademisi, DPR sudah tolak Impor beras. Ada apa Ngotot Impor?

Jakarta - Keputusan impor beras oleh pemerintah banyak menuai kritik keras di tengah masa panen raya petani yang sudah mulai Februari ini. Keputusan yang sangat kontraproduktif dengan seruan Jokowi untuk membenci produk asing dan mencintai produk dalam negeri.

"Kenapa keputusan impor ini dibuat bulan Januari dan pemerintah sudah tau kalau panen raya akan mulai bulan Februari? Dari awal memang kelihatan bahwa pemerintah ingin impor beras 1 juta ton," tanya Riyono, Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi mencapai 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2020, naik tipis 0,08 persen atau 45.170 ton dari produksi pada 2019 yang sebesar 54,60 juta ton.

Jika dikonversikan menjadi beras, maka sepanjang 2020 produksi beras mencapai 31,33 juta ton. Realisasi ini naik tipis 0,07 persen atau 21.460 ton dari produksi beras di 2019 yang sebesar 31,31 juta ton.

Peningkatan produksi akan bisa naik di 2021. BPS mencatat potensi produksi padi dalam negeri selama Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 25,37 juta ton gabah kering giling (GKG).

"Data di atas memberikan gambaran bahwa petani kita berdaya dan mampu sediakan kebutuhan dalam negeri, anehnya pemerintah malah akan impor. Penolakan petani di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan berbagai daerah tidak didengarkan oleh pemerintah," tanya Riyono

Bahkan akademisi seperti Rektor IPB juga menyatakan menolak impor beras dengan alasan bahwa produksi beras dalam negeri aman. Karena begitu impor terjadi dampaknya akan sangat serius terhadap harga dan itu akan merugikan petani. Saya kira kita harus menghargai petani yang sudah bersusah payah, berjerih payah dan bekerja keras untuk memberikan kepada kita suplai pangan yang cukup.

Komisi IV DPR RI juga menyatakan menolak impor beras dalam RDP pada senin 15 Maret 2021 dengan Bulog, PT Garam, Kementan, dan stakeholder yang lain.

"Kalau petani sebagai pelaku utama menolak impor beras, DPR juga sudah menolak serta kalangan profesional akademis menolak impor beras kenapa pemerintah tetap ngotot impor? Ada apa ini? Aneh dan sangat merugikan bangsa ini." tutup Riyono

Mana Janji 4000 ha Lahan garam dan harga 1000 rupiah/kg, kok Impor Garam 3 juta ton?

Jakarta - Belum selesai kontroversi rencana impor beras 1 juta ton di 2021, pemerintah akan berencana impor garam sebanyak 3 juta ton. Bak disambar petir siang hari, kebijakan ini jelas merusak harga garam dan melukai spirit petani garam yang selama ini hanya di ghosting sama pemerintah.

"Dulu 2017, Pak Luhut janji akan stop impor garam 2020-2021 dengan kebijakan pemerintah yang disiapkan, di antaranya buka lahan garam 4000 Ha di NTT dan menjaga harga garam rakyat kisaran 1000 rupiah/kg. Mana janji itu?" Tanya Riyono, Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPP PKS.

Saat ini produksi garam nasional hanya mampu 2 juta ton per tahun. Sedangkan kebutuhan garam konsumsi dan industri 3 juta ton. Ada defisit kebutuhan garam industri 1 juta ton per tahun. Saat ini harga garam hancur, hanya 350 rupiah/kg padahal ongkos produksi 750 rupiah. Petani sudah rugi 400 rupiah dan semakin terpuruk oleh garam impor yang rembes ke pasar atau konsumen.

Dari sisi kemampuan lahan produksi garam juga belum signifikan. Ada 49 titik dari 9 provinsi sentra garam

mulai dari Jawa, Sulawesi, sampai NTT yang luasan lahan sekitar 21.348 hektar dengan kapasitas produksi garam 60 - 80 ton/Ha. Kita membutuhkan lahan minimal 37.000 Ha dengan produksi 80 ton/Ha.

"Kalau Pak LBP serius harusnya segera benahi tata niaga garam, cabut PP No. 9 tahun 2018 tentang Kebijakan Impor garam yang memberikan jalan gelap impor merajalela," usul Riyono, Kabid Petani Nelayan DPP PKS.

Penderitaan petani garam semakin dalam. Kita masih ingat di tahun 2019, kasus di Pati dan Rembang di mana petani penggarap hanya diberi upah 25.000 per hari atau 200.000 per pekan. Petani sudah enggan menjual garamnya, bahkan di Madura garam dibuang ke jalan sebagai bentuk kekecewaan kepada pemerintah.

"Rencana impor garam 2021 yang sudah diputuskan sejak Januari 2021 membuktikan bahwa pemerintah tidak konsisten dengan Janji akan stop impor garam 2021. Mana janji Pak Luhut soal stop impor garam? Petani garam sudah lelah dengan janji dan janji berulang yang hanya berujung janji," tambah Riyono.

Petani, Akademisi, DPR Sudah Tolak Impor Beras. Ada Apa Ngotot Impor?

Jakarta - Keputusan impor beras oleh pemerintah banyak menuai kritik keras di tengah masa panen raya petani yang sudah mulai Februari ini. Keputusan yang sangat kontraproduktif dengan seruan Jokowi untuk membenci produk asing dan mencintai produk dalam negeri.

"Kenapa keputusan impor ini dibuat bulan Januari dan pemerintah sudah tau kalau panen raya akan mulai bulan Februari? Dari awal memang kelihatan bahwa pemerintah ingin impor beras 1 juta ton," tanya Riyono, Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi mencapai 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2020, naik tipis 0,08 persen atau 45.170 ton dari produksi pada 2019 yang sebesar 54,60 juta ton.

Jika dikonversikan menjadi beras, maka sepanjang 2020 produksi beras mencapai 31,33 juta ton. Realisasi ini naik tipis 0,07 persen atau 21.460 ton dari produksi beras di 2019 yang sebesar 31,31 juta ton.

Peningkatan produksi akan bisa naik di 2021. BPS mencatat potensi produksi padi dalam negeri selama Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 25,37 juta ton gabah kering giling (GKG).

"Data di atas memberikan gambaran bahwa petani kita berdaya dan mampu sediakan kebutuhan dalam negeri, anehnya pemerintah malah akan impor. Penolakan petani di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan berbagai daerah tidak didengarkan oleh pemerintah," papar Riyono.

Bahkan, akademisi seperti Rektor IPB juga menyatakan menolak impor beras dengan alasan bahwa produksi beras dalam negeri aman. Karena begitu impor terjadi dampaknya akan sangat serius terhadap harga dan itu akan merugikan petani. Saya kira kita harus menghargai petani yang sudah bersusah payah, berjerih payah dan bekerja keras untuk memberikan kepada kita suplai pangan yang cukup.

Komisi IV DPR RI juga menyatakan menolak impor beras dalam RDP pada senin 15 Maret 2021 dengan Bulog, PT Garam, Kementan, dan stakeholder yang lain.

"Kalau petani sebagai pelaku utama menolak impor beras, DPR juga sudah menolak serta kalangan profesional akademis menolak impor beras kenapa pemerintah tetap ngotot impor? Ada apa ini? Aneh dan sangat merugikan bangsa ini," tutup Riyono.

Dukung Bulog Tidak Impor Beras, Tidak Ada Toleransi Buat Mafia Impor

Jakarta - Pengakuan Jendral Buwas, Kepala Bulog, bahwa tidak ada pembahasan soal impor beras dalam pengambilan keputusan impor beras 1 juta ton cukup mengagetkan publik. Sebagai pelaksana urusan pangan, harusnya Bulog ikut memberikan masukan dan pertimbangan terkait kebijakan strategis nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Sangat aneh dan bisa jadi ada miskordinasi antar lembaga pemerintah dalam keputusan impor beras ini. Bagaimana jadinya Bulog tidak tau soal impor beras ini?" tanya Riyono, Ketua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan.

Menurut Buwas, data per 14 Maret 2021, stok beras Bulog mencapai 883.585 ton. Terdiri dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 859.877 ton dan beras komersial 23.708 ton.

Perkiraan panen mulai Maret-April 2021, penyerapan beras oleh Bulog pada periode itu untuk CBP bisa mencapai 390.800 ton. Artinya, setelah panen raya, maka pasokan beras untuk CBP saja sudah lebih dari 1 juta ton.

"Ini data Bulog jelas ada surplus 1 juta ton beras, lalu siapa yang menghendaki impor? Bisa jadi ada kekuatan luar pengejar rente impor yang bernilai besar,

pemerintah tidak boleh kalah. Sikat mafia impor beras," tukas Riyono.

PKS mendukung sikap Bulog untuk tidak merealisasikan rencana impor beras 1 juta ton dan mendorong agar penyerapan beras petani harus dimaksimalkan.

"Jangan kasih celah mafia impor yang merusak kedaulatan pangan dan menyakiti petani Indonesia. Bulog harus berani menyampaikan kepada Presiden bahwa kebijakan impor ini merugikan Bulog dan petani," tambah Riyono.

Pengakuan bahwa Bulog hanya bisa masuk ke 6% pangsa pasar pangan nasional dan 94% dikuasai oleh sindikasi memang membuat kebijakan soal pangan terbentur dengan kepentingan bisnis para mafia impor.

"Penguatan Bulog dan Satgas Pangan yang sudah ada sampai level kabupaten kota harus dilakukan. Mafia impor jangan dikasih kesempatan merusak dengan selalu impor yang diandalkan," tutup Riyono.

Pak Jokowi, Harga Gabah Petani Anjlok Karena kebijakan Impor.

Semarang - Kritik keras dari kampus yang menyatakan tidak ada alasan kuat dan faktual untuk melakukan impor beras. Impor 1-1,5 juta ton beras membuat semakin lemah petani Indonesia serta hancurnya harapan kedaulatan pangan nasional yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi di periode pertama.

"Kebijakan impor beras 1-1,5 juta ton tidak memiliki alasan akademik dan faktual serta membuat harga gabah petani yang akan panen menjadi anjlok. Harusnya Presiden sadar efek impor ini," kata Riyono, Ketua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan.

Saat ini para petani sudah mulai panen, beras impor belum datang saja sudah dirasakan efeknya sampai ke petani. Dampak kebijakan impor beras ini sistemik dan terstruktur. Di level nasional dapat melemahkan spirit kedaulatan pangan, semakin tergantungnya kebutuhan pangan dengan impor berbagai pangan strategis dan bisa berujung kepada lemahnya ketahanan nasional kita.

"Urusan pangan adalah urusan strategis nasional, jangan kita bergantung kepada asing. Kalau semua kebutuhan pokok dipenuhi dengan impor, maka akan merusak mental petani kita," kata Riyono.

Pengaruh di level perdagangan akan merusak harga beras di pasar tradisional, psikologi pasar hancur karena kebijakan beras impor. Banyak pedagang beras kecil yang rugi karena harga beras anjlok.

"Pak Presiden Jokowi, harga gabah di petani saat ini anjlok, harga per kilo gabah kering yang dipatok pemerintah dengan HPP 4200 di level petani kisaran Rp3000-3600 per kilo. Contoh di Pekalongan, Jawa Tengah, harga gabah hanya Rp3500 per kilo. Di Pangandaran, Jawa Barat, harga biasanya bisa Rp5000 sekarang hanya Rp3700. Di Malang, Jawa Timur, harganya Rp3800, padahal sebelumnya bisa tembus Rp5000 per kilo," terang Riyono.

Jeritan petani padi yang akan panen mulai menggema sejak kenaikan harga pupuk yang saat ini hasil panen tidak cukup untuk biaya produksi. "Kalau hasil panen harganya jeblok terus, petani mau bayar sekolah dan kebutuhan harian dari mana? Petani kecil dengan luas lahan 0.5 Ha bisa dapat 3.5 ton dengan nilai uang 12,2 juta untuk 3 bulan. Jika dikurangi ongkos produksi, petani bisa minus," kata Riyono.

PKS meminta Presiden Jokowi membatalkan kebijakan impor beras yang jelas-jelas merugikan petani. "Kalau tidak dibatalkan, pertanyaannya Presiden membela petani mana? Indonesia apa asing?" tutup Riyono.

Impor Beras Percepat Hilangnya Petani Indonesia, Petani Asing Semakin Sejahtera.

Semarang - Rencana impor beras sebanyak 1-1,5 juta ton menuai kritik keras dari kalangan akademisi dan aktifis. Setelah Presiden Jokowi menyerukan cinta produk dalam negeri, namun berselang hari kabar impor beras akan dilakukan dengan dalih cadangan pangan nasional.

"Janji Presiden untuk stop impor ini sejak periode pertama 2014-2019. Faktanya, sejak 2014-2020, Presiden sudah melakukan impor beras hampir 9 Juta ton atau rata-rata 1 juta ton per tahun. Nyaris tidak ada perubahan kebijakan soal impor beras, lalu apa prestasinya?" tanya Riyono, Ketua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan.

Kebijakan impor pangan di saat persiapan panen raya selain menyakiti perasaan 33,4 juta rumah tani petani, juga akan merusak spirit anak-anak petani untuk enggan bertani. Saat ini ada 2,7 juta petani muda usia 20-30 tahun yang harusnya bisa menjadi regenerasi petani tua yang usianya sudah di atas 50 tahun. Jika ini terus dilakukan oleh pemerintah, maka Indonesia hanya akan menjadikan petani asing semakin sejahtera. Kebutuhan pangan nasional 80% diproduksi oleh petani kecil. FAO menyebutkan 90% stok pangan global juga diproduksi oleh petani, namun kondisi petani tetap miskin.

Usia petani menurut LIPI saat di atas 47 tahun, pemuda yang mau bertani hanya 3%. Catatan Kementan 2010-2013 ada penurunan 5,1% rumah tangga petani yang setara dengan 21 juta jiwa. Artinya petani semakin tidak menarik buat pemuda dan rakyat umumnya.

"Dunia pertanian saat ini semakin tidak menarik bagi petani milenial, padahal di saat pandemi petani yang menolong kondisi ekonomi nasional. Apa ini balasan pemerintah kepada petani? Prestasi dibalas dengan impor beras. Kebijakan impor juga akan membuat jatuh harga gabah ditingkat petani, petani sudah jatuh tertimpa tangga lagi," keluh Riyono.

Jika impor beras tidak dibatalkan maka sama saja pemerintah mensejahterakan petani asing dan membuat petani lokal semakin susah. Pemerintah harusnya mendengar masukan akademisi dan kalangan aktifis agar jangan membuat kebijakan yang merugikan petani.

"Undang - Undang 19/2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani mengamanatkan agar petani bisa menjadi aktor utama pembangunan Indonesia. Saat ini petani hanya menjadi penonton kebijakan pemerintah yang tidak pro petani lokal. Impor adalah wujud pro petani asing," tambah Riyono.

***Food Estate* Jelas Potensi Kegagalanya, Kenapa Diteruskan?**

Semarang - wabah Covid mengharuskan kita siap semua dalam segala aspek. Pangan adalah krusial dan wajib di penuhi oleh negara. Pangan adalah hak asasi manusia.

Itu mandat *World Conference* PBB 1993 yang harus dilaksanakan oleh semua negara di dunia. Ada 3 kewajiban negara soal pangan; memenuhi, melindungi, dan menghormati.

"Indonesia sedang devisit pangan, ini harus dicarikan jalan keluar yang tepat agar kebijakan yang dibuat oleh Presiden tidak menambah krisis multidimensi di era Korona ini," kata Riyono, Ketua DPP Petani dan Nelayan PKS.

Wacana cetak sawah baru seluas 600.000 Ha oleh pemerintah dan BUMN membuat PKS bertanya-tanya. Potensi kegagalan tinggi dan biaya sangat besar. Catatan PKS pada periode pertama, Jokowi membuat program cetak sawah baru dengan luasan 1 Juta hektar dengan biaya hampir 6 triliun gagal dilaksanakan. Hanya terealisasi 500.000 Ha.

Perlu diketahui rencana anggaran biaya (RAB) konstruksi cetak sawah pada 2016 bagi 138 kabupaten

sebesar Rp 16 juta per hektar, serta khusus untuk daerah Maluku dan Papua sebesar Rp 19 juta per hektar.

"Buat apa cetak 600.000 Ha sawah baru? Selain membutuhkan biaya rata-rata di luar Jawa 17 juta per hektar sehingga minimal butuh 10 triliun lebih. Lalu 500 ribu Ha yang sudah di cetak sekarang bagaimana? Berpotensi gagal seperti era pertama Jokowi memimpin?" tambah Riyono.

Mandat kepada Prabowo oleh Jokowi untuk membuka lahan 30.000 Ha di Kalteng dengan pengajuan anggaran 68 triliun untuk tanaman singkong sangat rawan dan resiko kegagalan tinggi.

"Cetak sawah 600.000 saja oleh BUMN belum jelas, ini mau buat lagi di saat negara mengalami devisa anggaran," kata Riyono

PKS menawarkan agar Presiden fokus kepada ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Menghormati pangan lokal bisa jadi solusi. Keanekaragaman pangan lokal sangat mampu menjadi solusi atas kebutuhan pangan di daerah.

"Jangan diartikan selalu bahwa pangan itu hanya beras. Ini harus diinstal ulang ke seluruh rakyat bahwa pangan lokal saat ini sangat penting bagi ketahanan pangan di tengah situasi pandemi korona. Ada 30 jenis pangan lokal penghasil karbohidrat selain beras," ungkap Riyono.

"Daripada membuat program cetak sawah baru dengan istilah *food estate* yang terbukti gagal, lebih baik perkuat pangan lokal yang beraneka ragam dan sudah dimiliki oleh masing-masing daerah dan dana 10 triliun bisa menambah program *recovery* pasca Covid 19," tambah Riyono.

Belum lagi dampak deforestasi yang akan semakin memperparah kondisi lingkungan hidup di kawasan *food estate*, belum tentu berhasil sediakan pangan tapi merusak lingkungan sudah pasti.

"Kalau akademisi juga menilai *food estate* tanpa kaidah ilmiah yang kuat, kenapa Presiden meneruskan program ini? Kegagalan sudah jelas di depan mata. Kenapa diteruskan?" tanya Riyono.

“

Pangan adalah krusial dan wajib dipenuhi oleh negara. Pangan adalah hak asasi manusia.

”

Pak Jokowi Katanya Benci Produk Asing, Kok Impor beras 1,5 Juta Ton?

Semarang - Semangat cinta produk dalam negeri dan benci produk asing yang disampaikan Presiden harus betul diwujudkan dalam kebijakan, bukan hanya sekedar ucapan tanpa bukti dan akhirnya rakyat kembali yang jadi korban.

Kebijakan *food estate* yang banyak dikritisi kalangan kampus dan aktivis sebagai kebijakan yang salah dengan potensi kegagalan yang tinggi masih juga dilaksanakan oleh pemerintah. *Food estate* bukan menambah ketersediaan pangan, justru merusak sumber pangan dengan rusaknya sumber air alami dari hutan.

"Dari kebijakan *food estate* ini saja menjadi bukti bahwa Presiden "cinta" produk asing dengan kebijakan sekarang yang akan impor beras 1-1,5 juta ton beras dan daging serta gula yang akan dipercepat. Mana bukti Presiden cinta produk dalam negeri?" tanya Riyono, Kabid Tani dan Nelayan DPP PKS.

Saat ini pemerintah melalui Kemenko Perekonomian sedang mempersiapkan realisasi impor 500 ribu ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog.

Kebijakan impor beras, gula, daging, dan berbagai produk pangan akan semakin menjauhkan cita dan

kebijakan Presiden yang berjanji akan stop impor sejak menjadi Presiden periode pertama.

"Pak Jokowi harusnya membela petani dan membuat kebijakan yang lebih pro kepada petani, bukan menjadikan impor sebagai jalan utama dalam pemenuhan pangan nasional. Sudah sejak 2014-2021 kebijakan pangan tidak mampu hadirkan cinta bagi produk dalam negeri," tegas Riyono

Berdasarkan catatan BPS, pergerakan produksi beras mencapai 54,56%, masih lebih tinggi ketimbang 2019 yang hanya 54,60%. Sementara total luasan panen pada 2020 lalu mencapai 10,66 juta hektar, dengan sentra produksi terbesarnya Provinsi Jawa Timur.

Harga gabah kering giling di tingkat petani masih mengalami kenaikan sebesar Rp5.320 atau naik 0,03 persen. Ke depan, pergerakan produksi harga gabah kering panen masih akan meningkat.

Di samping itu, produksi beras pada 2020 lalu juga naik 31,33% ketimbang 2019 hanya 31,31%. Meski naik tipis, kata Suhariyanto, pemerintah berhasil mengendalikan produksi beras, sehingga kebutuhan masyarakat masih tercukupi dengan baik.

"Pak Jokowi, para petani kita di tahun 2021 ini masih bisa produksi beras yang bagus, harga juga mulai naik, tapi kenapa Pak Jokowi mau impor beras dari petani asing?" tutup Riyono.

Indeks Pangan Kalah Sama Ethiopia, Malu Sama Petani

PKS - Kabar buruk terdengar dari sektor pangan nasional. Indeks pangan nasional negara kalah dengan negara miskin dan jauh dari kata berkembang, Ethiopia. Menurut FSI (Food Sustainability Index) Indonesia berada diurutan 60 dari 67 negara dalam hal keberlanjutan pangan.

"Data ini mengejutkan dan menunjukkan bahwa pembangunan sektor pertanian dan pangan belum berhasil, padahal di era pandemi ini petani memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi nasional," kata Riyono, Ketua DPP Tani dan Nelayan PKS.

Food Sustainability Index mengacu tiga indikator indikator utama. Dua indikator adalah limbah pangan dan pertanian yang berkelanjutan alias tidak merusak lingkungan dan menjaga ekonomi-sosial sekitarnya. Indikator ketiga atau terakhir adalah persoalan nutrisi seperti obesitas.

Di sisi lain, data FSI menyebutkan bahwa kemampuan Indonesia menjaga indeks keamanan pangan juga rendah dengan skor 62 terendah di bawah Ghana 57.

"Apa ini artinya Indonesia tidak mampu menyediakan pangan yang aman bagi rakyatnya? Masa iya

kalah sama Ghana? Ini intropeksi bagi jajaran kabinet," tambah Riyono

Pangan menjadi masalah besar secara global, bahkan target MDGs menghilangkan 1 M orang yang kelaparan gagal dipenuhi tahun 2015 kemarin. Bahkan, dengan adanya pandemi ini tingkat ketersediaan pangan dunia juga memburuk.

Indeks kelaparan Global Indonesia memiliki skor 19.1 sama dengan Kamerun dan Gambia. Ini harus menjadi warning serius bagi ketersediaan pangan di rakyat kecil dan pinggiran pedesaan.

"Pangan adalah 50% persen masalah bangsa kita. Jika kita berhasil sediakan pangan, maka berhasil kita menyelesaikan masalah rakyat kecil kita," terang Riyono.

Pak Jokowi, Subsidi Pupuk Bukan ke Petani, tapi ke Pabrik Pupuk

Semarang - Pernyataan Jokowi tentang apa hasil subsidi pupuk yang mencapai 330 triliun selama 10 tahun terakhir harus kita lihat dengan utuh. Membangun sektor pertanian sehingga unggul dan mampu berdaulat bukan soal pupuk saja, benih juga sangat berpengaruh.

"Subsidi yang 330 triliun itu bukan langsung ke petani, tetapi ke pabrik Pupuk yang notabene mereka BUMN yang harus berpikir bisnis. Itulah kenapa subsidi terus ke pabrik pupuk, tapi faktanya harga sekarang naik dan batang di lapangan langka, petani jadi korbannya," kata Riyono, Ketua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan.

Pupuk selalu menjadi masalah menjelang musim tanam. Mulai dari harga yang tidak sesuai HET, pupuk langka di petani, muncul pupuk palsu, pupuk subsidi disalahgunakan ke non subsidi, sampai tidak cukupnya ketersediaan pupuk waktu musim tanam.

PKS sudah menyatakan menolak kenaikan pupuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 49 Tahun 2020 tertanggal 30 Desember 2020, Pemerintah telah menetapkan harga baru HET beberapa jenis pupuk bersubsidi sektor pertanian.

Menurut PKS, sebaiknya subsidi pupuk berikan langsung kepada petani melalui petani secara langsung

dalam bentuk transfer seperti bansos di era Pandemi sekarang.

"Bantuan tunai subsidi pupuk akan tepat sasaran karena memang petani butuh untuk membeli pupuk. Pemerintah tugasnya memastikan stok dan alokasi pupuk sesuai dengan kebutuhan per kabupaten/kota," tegas Riyono.

Sekalian itu penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan pestisida (P2KP) harus sampai kepada level tindakan. Jika ada distributor nakal maka cabut izinnya dan pastikan dapat hukuman. Ini akan memberikan efek jera bagi mafia pupuk subsidi.

***Omnibus Law* Sengsarakan Petani, Sejahterakan Importir**

Semarang - Target pemerintah mengesahkan RUU *Omnibus Law* di bulan Oktober menjadi lonceng kesengsaraan bagi petani dan sektor pertanian pada umumnya.

Arus impor pangan yang tidak terbendung di era Jokowi semakin menguatkan bahwa kesejahteraan petani, bukanlah prioritas bagi pemerintah, faktanya berbagai kebijakan pangan justru merugikan petani Indonesia.

"Pasal 66 dalam RUU OBL menyatakan sumber pangan dalam negeri, cadangan pangan nasional sejajar dengan impor pangan. Ini jelas melukai dan merusak kedaulatan pangan nasional kita," jelas Riyono, Ketua DPP PKS bidang Pekerja Petani dan Nelayan.

Dalam UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, memberikan mandat bahwa impor pangan hanya dilakukan jika produksi dalam negeri tidak mampu terpenuhi, itupun dilakukan bukan saat panen raya petani.

"Justru dalam RUU OBL, pemerintah mengusulkan bahwa impor pangan bisa dilakukan kapan saja demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ini sangat berbahaya bagi petani. Praktiknya sering terjadi pemerintah melakukan impor di saat petani panen raya, akhirnya harga jatuh dan petani makin sengsara," tambah Riyono.

Pasal 33 dalam RUU OBL menghapus ketentuan dalam UU No. 19 tahun 2013 yang menjadikan petani sebagai soko guru bagi produksi pangan dalam negeri dengan lebih mengutamakan impor.

Riyono menjelaskan jika impor pangan selalu menjadi kebijakan utama maka kesejahteraan petani hanya utopia, importirlah yang akan mendapatkan nilai tambah dan keuntungan ekonomi. Ini jelas tidak adil dan melawan spirit nasionalisme kita untuk bangga dengan produksi dalam negeri.

Harusnya petani dan sektor pertanian yang menjadi penyelamat di tengah resesi ini diberikan penghargaan. Merekalah yang memberikan sumbangsih pertumbuhan bagi penyerapan tenaga kerja nasional.

"Jika RUU OBL sektor pertanian ini tidak diubah oleh pemerintah dengan kembali ke UU 18 tentang Pangan dan UU 19 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, maka bisa dipastikan petani sengsara dan importir sejahtera," tutup Riyono.

Kinerja Petani Bagus di Tengah Pandemi, tapi Belum Sejahtera

Semarang - Situasi tak menentu ekonomi nasional yang nyaris masuk jurang resesi karena kontraksi 5,32% membuat pemerintah kebingungan membuat formula mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Hampir semua sektor mengalami kinerja negatif yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

"Penopang utama pertumbuhan ekonomi kita saat ini adalah konsumsi dalam negeri, artinya rakyat kecil yang jadi tulang punggung pergerakan ekonomi nasional. Saat ini sektor makanan minuman tumbuh minus 22,31%. Rakyat daya belinya turun," tambah Riyono.

Fakta hampir semua sektor tumbuh negatif sangat riskan akan penambahan jumlah penduduk miskin, sektor keuangan minus 10,32%, transportasi dan pergudangan 29,22%, kesehatan 4,5%, industri 6,49%, perdagangan 6,71%.

"Bahkan jasa konstruksi yang menopang proyek infrastruktur nasional juga minus 7,37%, artinya banyak pekerja bangunan yang dirumahkan dan menambah pengangguran," kata Riyono, Ketua DPP PKS bidang Pekerja Petani dan Nelayan.

Menurut Riyono, saat ini sektor pertanian dalam arti luas semakin tumbuh. Kinerja positif 16,24% membuktikan bahwa sektor inilah sebagai penyelamat ekonomi nasional saat ini. Petani dan semua turunan pertanian dalam arti luas bisa memberikan kontribusi positif.

"Petani sebagai aktor utama yang memproduksi bahan pangan pertama sangat berperan saat ini di tengah pandemi untuk mengurangi potensi kerugian sampai level pedesaan. Inilah jasa petani kita," sambung Riyono yang juga adeg provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah harus mereset ulang formula menggerakkan ekonomi di tengah pandemi. PDB pertanian tumbuh 16,24 % pada triwulan-II 2020 (*q to q*) dan bahkan secara *y0y*, sektor pertanian tetap berkontribusi positif yakni tumbuh 2,19 %. Subsektor tanaman pangan berupa panen yang memberikan kontribusi sebesar 9,3%.

"Melihat fakta saat ini, Presiden Jokowi harus mengutamakan sektor pertanian dan kesejahteraan petani sebagai upaya mempertahankan pergerakan ekonomi pedesaan, berikan perhatian khusus sektor pertanian," tambah Riyono

Walaupun punya kontribusi positif di tengah pandemi tapi justru kesejahteraan petani stagnan. Nilai Tukar Petani (NTP) Juli 2020 pada level 100,09 yang mengalami kenaikan 0,49% dibandingkan bulan lalu.

Artinya petani masih rugi jika diukur dari produksi dan nilai jualnya.

"Jangan sampai petani menjadi korban di tengah pandemi walau kerja mereka sangat bagus untuk menolong perekonomian negara, petani harus sejahtera," tutup Riyono.

“

Petani dan semua turunan pertanian
dalam arti luas bisa memberikan
kontribusi positif.

”

Kalah di Perundingan WTO, Ayam Impor Serbu Indonesia, 68% Ayam Nasional Dikuasai Asing

Sumber kekacauan dan ketidakadilan perdagangan pangan dunia salah satunya berasal dari ide perdagangan bebas yang dipromotori oleh WTO. Organisasi perdagangan dunia ini lebih condong dan mendukung upaya liberalisasi perdagangan dunia dengan mengesampingkan nilai kedaulatan dan keadilan distribusi pangan dunia.

Prinsip yang besar menang dan yang kecil kalah atau harus tunduk kepada kemauan negara besar menjadi perilaku organisasi ini. Akhirnya banyak kasus dan negara berkembang menjadi "bak sampah" produk negara maju. Kasus kekalahan perundingan akibat gugatan yang diajukan Brazil sejak 2014 tentang aturan larangan impor daging ayam membuat posisi Indonesia semakin lemah. Produk ayam Brazil akan membanjiri pasar Indonesia bahkan bisa masuk pasar rakyat. Kondisi yang sangat merugikan peternak ayam lokal yang sudah berjuang mewujudkan swasembada daging ayam sejak 2008.

Kekalahan dalam perundingan dagang di WTO sering dialami Indonesia, bukan hanya soal daging ayam saja. Soal tembakau Indonesia juga kalah dari Australia. Data Bisnis.com menyebutkan rentang 2014—2018 ada 8

sengketa dagang melibatkan Indonesia yang berakhir di meja WTO melalui panel *Dispute Settlement Body* (DSB). Dari 8 kasus itu, 5 di antaranya telah diputuskan, dan hanya 1 kasus yang dimenangkan oleh Indonesia.

Kekalahan tragis yang sudah bisa ditebak sejak awal akan posisi kuatnya negara besar yang ingin menyerbu Indonesia dengan tangan WTO.

Lemahnya posisi Indonesia dalam sidang WTO terjadi karena lemahnya kemampuan negosiator dalam menunjukan bukti dan fakta persidangan di WTO. Indonesia cenderung "menyerah" terhadap kasus gugatan di WTO. Kekalahan soal impor daging ayam ini akan berdampak besar bagi peternak lokal. Peternak lokal bisa bangkrut dan semakin sengsara. Dunia perunggasan nasional saat ini dari hulu ke hilir hampir 80% dikuasai oleh asing ditambah serbuan daging ayam impor, maka sudah tidak ada ruang peternak lokal untuk bisa hidup. Nyawa peternak lokal sangat bergantung kepada pabrikasi pemodal besar dengan sistem kemitraan yang semakin lama semakin merugikan peternak lokal.

Potensi produksi daging ayam menurut BPS 2018 ada sekitar 3,3 juta ton dengan estimasi kebutuhan nasional 3,05 juta ton per tahun. Data ini memberikan keyakinan bahwa Indonesia tidak butuh daging ayam impor dari Brazil yang rawan membawa penyakit. Pada tahun 2018 ditemukan kasus daging ayam Brazil ada Salmonella.

Pemerintah harus bisa melindungi peternak lokal yang semakin tertekan dengan serbuan daging ayam impor. data dari Pinsar dan Gabungan Asosiasi Pengusaha Peternak Ayam Nasional (Gopan), 68% kebutuhan ayam nasional dipenuhi oleh pengusaha besar yang rata-rata pemodal asing. Peternak lokal hanya mengisi 20-30%. *Share* bisnis yang sangat kecil yang memberikan pesan bahwa siap-siap saja 2030 kebutuhan ayam nasional akan semua dipenuhi oleh korporat pemilik modal yang 90% adalah modal asing. Kiamat bagi peternak lokal, kasus teriakan peternak lokal di Blitar saat kunjungan Jokowi dan berujung penangkapan salah satu bom atom peternak yang sudah tidak mampu bersaing dengan industri besar.

Saat ini ada 170.000 peternak lokal yang nasibnya di ujung tanduk, kebangkrutan sudah di depan mata. Asing menguasai sektor perunggasan nasional yang bisa jadi 10 tahun ke depan bisa jadi 100% kebutuhan daging ayam nasional dipenuhi oleh impor dan pengusaha bermodal asing yang ada di Indonesia.

Peternak lokal hanya akan menjadi konsumen dan penonton karena semua dikuasai oleh asing. Inilah akibat politik pangan yang mengandalkan impor. Perlindungan yang diharapkan akhirnya "menyerah" kepada korporasi yang hanya mencari keuntungan tanpa berpikir tentang Pancasila sebagai ruh dan idiologi ekonomi negara. Rakyat kecil menjadi korbannya.

“

Peternak lokal hanya akan menjadi konsumen dan penonton karena semua dikuasai oleh asing. Inilah akibat politik pangan yang mengandalkan impor.

”

Lampiran Dokumentasi



Panen Padi di Karawang Jawa Barat



Riyono sedang berdialog dengan seorang nelayan kecil di perkampungan tambak lorok Kota Semarang yang sedang memperbaiki jalanya



Bersama Presiden Asyik PKS meninjau garam rakyat di Kab Pamekasan Jawa Timur



Mendampingi Ketua Majelis Syuro PKS Doktor Salim dan Presiden PKS ahmad Syaiku berdialog dengan petani di Kab Karawang



Bersama Petani Kota Pekalongan lihat hasil Panen Padi yang sedang jatuh



Bersama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ustd Sohbul Iman dan Bendum Ustd Mahfuz Abdurohman melihat tambak budidaya Udang Vaname di Pemalang



Bersama Wakil ketua Majelis Syuro PKS ustd Ahmad heriyawan dan Ketua DPD PKS Pemalang Ustd Suwarso dalam acara pembekalan anggota PKS



Menyerahkan Buku Puisi Aku Mencari Tuhan dan Buku Kinerja FPKS Jateng kepada Sekjen PKS habib Abu Bakar Al Habsi



PKS : Usut Siapa yang Impor Beras 41.600 Ton, Presiden Sudah Janji Gak ada Impor Beras

Kabar mengejutkan disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyampaikan bahwa sampai Juli 2021 ada realisasi impor beras 41.600 Ton setara 19 juta US dollar. Ditengah kondisi harga gabah di bulan Maret-Juni yang hanya 3500-4000 rupiah per kg membuat petani menjerit karena rugi. Ketua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan Riyono mempertanyakan siapa yang berani impor beras sebanyak 41.600 Ton ini? Kok berani "melawan" perintah Presiden untuk tidak melakukan impor. Presiden harus tegas dan ungkap siapa yang melakukan impor, Rabu (01/09/2021).

<https://pkk.id/content/pkk-usut-siapa-yang-impor-beras-41600-ton-presiden-sudah-janji-gak-ada-impor-beras>

PKS:info pks:info



PKS : Badan Pangan Nasional Jangan Berpikir Nyari Keuntungan

"Politik Pangan Negara masih belum mampu hadirkan cita - cita bangsa untuk mewujudkan Kedaulatan pangan, artinya menghadirkan negara di ruang ketahanan serta pemenuhan gizi bagi rakyat. Yang ada saat ini politik pangan kita masih mengandalkan impor. PKS berharap dan mengingatkan akan peran Badan Pangan Nasional yang intinya adalah mewujudkan kedaulatan pangan berbasis kemampuan sendiri, bukan impor apalagi berpikir mencari keuntungan terhadap rakyat sendiri. Jangan ada kembali beras impor masuk tanpa kendali harga gabah petani jatuh saat panen raya, tiba - tiba impor saat presiden melarang, atau beras tak layak dibagikan ke rakyat.. Oleh karena itu, sekali lagi BPN jangan berpikir mencari untung, tugas dalam perpres 66/2021 mengamankan menjaga pangan nasional bukan mencari keuntungan."

Riyono

Ketua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan

<https://pkk.id/content/pkk-badan-pangan-nasional-jangan-berpikir-nyari-keuntungan>

PKS:info pks:info



PKS : Impor Beras Percepat Hilangnya Petani Indonesia, Petani Asing Semakin Sejahtera

"Janji Presiden untuk stop impor ini sejak periode pertama 2014 - 2019. Faktanya sejak 2014 - 2020 Presiden sudah melakukan impor beras hampir 9 Juta ton atau rata - rata 1 juta ton/tahun. Nyaris tidak ada perubahan kebijakan soal impor beras. Kebijakan impor juga akan membuat jatuh harga gabah ditingkat petani, petani sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Undang - Undang 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani mengamanatkan agar petani bisa menjadi aktor utama pembangunan Indonesia, saat ini petani hanya menjadi penonton kebijakan pemerintah yang tidak pro petani lokal. Impor adalah wujud pro petani asing."

Riyono, S.Kel

Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPP PKS

<https://pks.id/content/pks-impor-beras-percepat-hilangnya-petani-indonesia-petani-asing-semakin-sejahtera>

PKS 



PKS: Pak Jokowi, Harga Gabah Petani Anjlok karena Kebijakan Impor

"Kebijakan impor beras 1 - 1,5 juta ton tidak memiliki alasan akademik dan faktual serta membuat harga gabah petani yang akan panen menjadi anjlok, harusnya Presiden sadar efek impor ini. Kalau (impor) gak dibatalkan, pertanyaannya Presiden membela petani mana? Indonesia apa asing?"

Riyono, S.Kel

Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan DPP PKS

<https://pks.id/content/pks-pak-jokowi-harga-gabah-petani-anjlok-karena-kebijakan-impor>

PKS 



DATA STOK BERAS AMAN TIDAK PERLU IMPOR !

PKS: Impor Beras Lagi. Bukti Pemerintah Lebih Peduli Kepada Petani Asing. Sekalipun Petani Indonesia Jeblok dan Merugi.

Pemerintah berencana mengimpor **1 juta ton beras** dalam waktu dekat. Impor ini dinilai kontradiktif dimana Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan **produksi beras akan naik hingga bulan April 2021.**

Perkiraan BPS Produksi Beras Januari-April 2021

14,54 juta Ton
(naik 26,84% dari 2020)

Produksi gabah kering giling (GKG) per Januari-April 2021

25,37 juta Ton
(naik 26,68% dari 2020)

Stok Beras Nasional per akhir Desember 2020

7.389.575 Ton

Menurut Perkiraan KEMANTAN bahwa produksi beras secara nasional s.d Mei 2021

17,5 juta Ton

Stok Beras s.d Mei 2021

24,9 juta Ton

Kebutuhan Beras s.d Mei 2021

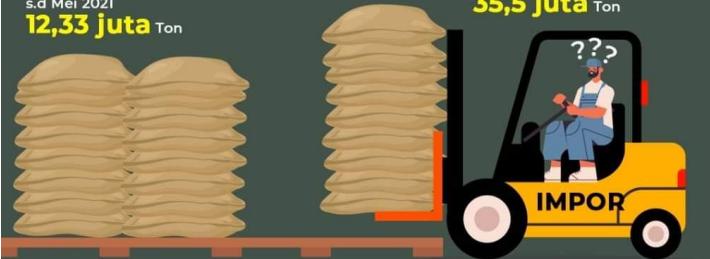
12,33 juta Ton

Maka akan ada surplus beras sebesar

12,6 juta Ton

USDA Foreign Agricultural Services memperkirakan produksi beras RI pada 2021 akan mencapai

35,5 juta Ton



PKS TV DPR RI | Fraksi PKS DPR RI | fraksipksdprri | @fpksdprri | fraksi.pks.id

• Sumber : Data BERAS dari BPS, Kementan & beberapa sumber • Grafis : Aditya Angga
• Olah Data : Tim Riset Fraksi PKS DPR RI



Partai Keadilan Sejahtera ✓



3 jam · 🌐

PAK JOKOWI, 2021 ADA IMPOR BERAS 41.600 TON. KENAPA BAPAK BILANG GAK ADA?

"Pernyataan Presiden Jokowi.. bahwa sepanjang tahun 2021 Indonesia tidak ada impor beras sungguh sangat disayangkan. Data BPS ada realisasi impor beras 41.600 ton,"
~ [Riyono Kel](#), Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan

Selengkapnya:



PKS.ID

PKS | PKS : Pak Jokowi, 2021 Ada Impor Beras 41.600 Ton. Kenapa Bapak Bilang Gak ...



Dapatkan Cerita Eksklusif
di Balik Berita

HOME > BISNIS >

PKS Kritik Pernyataan Jokowi Soal Impor Beras 2021: Dapat Data dari Mana?

Reporter: **Francisca Christy Rosana**

Editor: **Ali Akhmad Noor Hidayat**

Rabu, 1 Desember 2021 19:23 WIB



TEMPO.CO, Jakarta – Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi soal impor **beras**. Jokowi menyebut sepanjang 2021, tidak ada

Tak Bisa Tolak Impor Beras, Mentan SYL Minta Maaf ke DPR

Jurnal, 19 Maret 2021 | 09:06 WIB



Komentar



Lihat Foto

Dari India Sampai Vietnam, RI Impor Beras Rp 266 M Sebulan

Cantika Adhika, 19 August 2021 | 10:55

NEWS, 19 August 2021 | 10:55



suara.com

IKUTI

NEWS

Jokowi Sebut Indonesia Belum Impor Beras Sama Sekali Selama 2021

Tentang Penulis



Riyono. S.Kel M.Si., beralamat di RT 3/RW 10 Wonolopo Mijen Kota Semarang. Memiliki pengalaman memegang jabatan di dalam organisasi, di antaranya yakni sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan 2000, Koordinator Konggres Mahasiswa Undip (KM Undip) 2001-2002, Ketua Kastrat KAMDA Semarang 2002-2003, Ketua DPW PPNSI Jateng 2005-2010, Ketua DPW ISKINDO (Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia) Jateng 2017-2020, Ketua DPP ISKINDO Bidang Pengetahuan dan Komunitas Pesisir 2021-2026, Sekjen DPP PPNSI 2011-2015, Ketua 1 DPP PPNSI 2015-2019, Dewan Pembina PPNSI 2021-2026, Ketua Umum DPP Aliansi Nelayan Indonesia 2017-2020, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jateng 2014-2019 dan 2019-sekarang, Wakil Ketua Bidang Pekerja Petani dan Nelayan DPP PKS 2015-2020, Ketua Bidang Pekerja Petani NELAYAN DPP PKS 2019-2020, dan Ketua Bidang Petani dan Nelayan DPP PKS 2020-2025

Penghargaan yang pernah diraihnya meliputi Jateng Pos Award 2017 sebagai Tokoh Peduli Nelayan, Jawa Pos Award 2018 sebagai Tokoh Peduli Nelayan, Jawa

Pos Award 2019 sebagai Tokoh Peduli Ekonomi masyarakat Pesisir, dan PKS Award 2018 sebagai Tokoh peduli NELAYAN.

Beberapa pengalamannya di tingkat nasional yaitu dirinya pernah mendampingi perjuangan nelayan cantrang dan menyelamatkan 3500 kapal dari kebangkrutan Ekonomi dan 200.000 pelaku perikanan mulai nelayan, industri perikanan di wilayah Jabar, Jateng, Jatim, Medan, dan Lampung; sebagai negosiator pertemuan 2x bersama Presiden Joko Widodo dalam penyelesaian Kasus Cantrang; serta sebagai negosiator Penyelesaian Konflik Nelayan Jateng dan Papua.

Adapun pengalamannya di tingkat internasional di antaranya yaitu pernah menjadi Utusan Indonesia dalam Ajang Kursus Perikanan dan Kelautan ASEAN di Bohol Filiphina 2000; melakukan Pendampingan dan Advokasi PHK Tenaga Kerja Indonesia Kasus Crane di Saudi Arabia 2016; serta melakukan Pendampingan dan Advokasi Persidangan TKI di Singapura 2017.

Beberapa karya publikasinya yakni sebagai narasumber TV Nasional di TV One, Metro TV, Trans TV, MNC, dan Kompas TV; menerbitkan buku berjudul “Mengawal Kebangkitan NELAYAN Indonesia 2019”, “Bela Rakyat: Serial Advokasi Riyono 2014 -2019”, “Aku Mencari Tuhan, 2020”; dan menulis beberapa puisi dengan judul “Kamu Harus Kuat”, “Hukum 1 Rupiah Aku

Mencari Tuhan”, “Pesan Terakhir Tuhan”, “1000 Kisah Satu Hati”.

Publikasinya dalam bentuk artikel/berita pernah dimuat di berbagai media baik lokal maupun nasional, di antaranya yaitu Koran Republika, Koran Kompas, Koran Sindo, Koran Jawa Pos, Koran Suara Merdeka, Koran Tempo, Koran Bisnis Indonesia, Majalah Maritim, Koran Wawasan, Koran Jateng Pos, Detik.com, Okezone.com, Aktual.com, dan Teropongsenayan.com.

Selain itu, publikasinya juga pernah dimuat di berbagai stasiun televisi maupun radio, yakni TVRI Jateng, TV Ku Jateng, Cakra TV Jateng, Kompas TV Jateng, Radio Elshinta Semarang, RRI Semarang, Rasika FM Semarang, Trijaya FM, Beritasatu TV, Inews TV, Kompas TV Nasional, dan MNC TV.

